

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Sanksi Pelanggaran Pasal 113
Undang-undang No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta

1. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. **Setiap Orang** yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. **Setiap Orang** yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Dr. Kisman Karinda.,M.Si



SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

Diterbitkan pertama kali oleh CV. Diva Pustaka Hak cipta dilindungi oleh undang-undang All Rights Reserved Hak penerbitan pada Penerbit Diva Pustaka Dilarang mengutip atau memperbayak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin tertulis dari Penerbit.

Cetakan Pertama: Juli 2023

15 cm x 23 cm

ISBN: 978-623-8264-41-4

TIM PENYUSUN

PENULIS

: Dr. Kisman Karinda, M.Si

DESAIN

: Dwi Prasetyo

TATA LETAK

: Gilang Taruna Pratama

DITERBITKAN OLEH

: CV. DIVA PUSTAKA

NO.IKAPI

: 222/JTE/2021

EMAIL

: divapustaka@gmail.com

WEBSITE

: WWW.DIVAPUSTAKA.CO.ID

WHATSAPP

: 0858 - 6977 - 7792

DAFTAR ISI

| | |
|-----------------------------|------------|
| DAFTAR ISI | v |
| KATA PENGANTAR | vii |

BAB I

| | |
|--|----------|
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. PENGERTIAN, RUANG LINGKUP DAN METODOLOGI | 2 |
| B. SOSIOLOGI POLITIK INDONESIA : PERSPEKTIF DAN KARAKTERISTIK | 14 |
| C. SOSIOLOGI PEDESAAN DAN PEMERINTAHAN DESA..... | 24 |

BAB II

| | |
|---|-----------|
| DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGI PEMERINTAHAN | 28 |
| A. DIMENSI SUMBER DAYA MANUSIA..... | 28 |
| B. DIMENSI PENDUDUK..... | 32 |
| C. DIMENSI MASYARAKAT..... | 34 |
| D. DIMENSI BANGSA DAN NEGARA | 41 |
| E. DIMENSI PEMERINTAHAN | 45 |

BAB III

| | |
|---|-----------|
| PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 49 |
| A. KONSEP DAN TEORI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 49 |
| B. DIMENSI-DIMENSI PEMBERDAYAAN MASYARAKAT | 62 |
| C. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEMANDIRIAN | 72 |
| D. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PENDAPATAN MASYARAKAT | 75 |
| E. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL. | 77 |

BAB IV

| | |
|--|-----------|
| PARTISIPASI MASYARAKAT | 80 |
| A. KONSEP DAN TEORI PARTISIPASI | 80 |
| B. DIMENSI-DIMENSI PARTISIPASI MASYARAKAT | 83 |
| C. PARTISIPASI DAN EFEKTIVITAS PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | 98 |

| | |
|-----------------------------|-----|
| D. PARTISIPASI POLITIK..... | 100 |
|-----------------------------|-----|

BAB V

KONSEP DAN TEORI AKSI & TINDAKAN PEMERINTAHAN ...103

| | |
|---|-----|
| A. TEORI AKSI..... | 103 |
| B. TINDAKAN PEMERINTAHAN..... | 105 |
| C. PERILAKU PEMERINTAHAN..... | 108 |
| D. KEBIJAKAN PEMERINTAHAN..... | 112 |
| E. IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMERINTAHAN..... | 116 |

DAFTAR PUSTAKA.....120

BIODATA PENULIS.....124

KATA PENGANTAR

Rektor Universitas Muhammadiyah
Luwuk Dr. Sutrisno K. Djawa, SE,MM

Assalamualaikum wr.wb

Tri Dharma perguruan tinggi merupakan tiga pilar dasar pola pikir dan menjadi kewajiban bagi mahasiswa maupun civitas akademika di sebuah Perguruan Tinggi. Tiga dharma tersebut terdiri dari Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat. Selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Luwuk , Ke-tiga pilar diatas harus dapat berjalan sejajar, tanpa memprioritaskan pilar yang satu atas pilar lainnya, termasuk gagasan. Ide serta arah perubahan bagi para dosen dalam melakukan inovasi, ide dan gagasan penulisan karya tulis ilmiah berupa Buku dan penulisan jurnal ilmiah nasional maupun internasional.

Kemampuan Literasi menulis Buku dan Jurnal ilmiah membutuhkan kemauan yang kuat dan kemampuan diatas rata rata. Literasi menulis bagi sebagian besar civitas akademika khususnya para dosen di sebagian besar Perguruan Tinggi di Indonesia menghadapi berbagai tantangan sumber daya. Oleh karena itu, terbit nya karya tulis Buku yang digagas oleh dosendosen dilingkungan Universitas Muhammadiyah Luwuk mengandung arti yang penting untuk kepentingan saat ini dan kedepan bagi Universitas Muhammadiyah. Saya terus mendorong dan memotivasi para tenaga pengajar (para dosen) untuk tidak berhenti membaca dan menulis. Dengan mengutip pendapat seorang Guru besar Ilmu Pemerintahan Prof Dr. Talizi Nduhu Ndraha (alm) bahwa hanya ada 3 (tiga) kualitas SDM sebuah negara dan bangsa yang beradab, yaitu : pertama. membaca, kedua membaca dan ketiga menulis. Membaca tanpa menulis seperti seekor burung tanpa bisa terbang, sebaliknya menulis tanpa membaca seperti kendaraan yang tak memiliki energy bensin, karena Ilmu pengetahuan itu diikat dengan menulis. Semoga karya tulis berupa Buku ini dapat bermanfaat bagi para pembaca khususnya komunitas Mahasiswa dan juga publik yang mencintai buku. Salam Literasi.

Luwuk, medio mei 2023 Rektor,

Dr. Sutrisno K. Djawa,SE,MM

BAB I

PENDAHULUAN

Bab ini secara khusus akan membahas hal-hal terkait dengan pengertian, ruang lingkup dan metodologi dari apa yang dinamakan dengan Sosiologi Pemerintahan. Pengertian Sosiologi Pemerintahan dalam kajian buku ini akan lebih banyak disajikan dengan cara yang sederhana disertai beberapa contoh yang terjadi dimasyarakat, pemerintah serta kehidupan sehari-hari sehingga pembaca mudah memahaminya. Demikian pula ruang lingkup dari Sosiologi Pemerintahan disajikan dengan semudah mungkin sehingga memberikan penjelasan pada pembaca secara gampang, sekalipun bukan berlatar belakang Ilmu Pemerintahan, tetapi Ilmu Sosial secara umum. Bab ini juga diberi penjelasan tentang metodologi yang dipergunakan dalam membahas Sosiologi Pemerintahan, sebagai bagian dari Ilmu Sosial yang terus berkembang dan saling berkait berkelindan antara satu dengan ilmu sosial lainnya.

Dengan demikian diharapkan memudahkan memahami Sosiologi Pemerintahan dari sudut pandang Ilmu Sosial lain yang merupakan payung dari ilmu-ilmu sosial lainnya termasuk Ilmu Pemerintahan dan Sosiologi Pemerintahan. Sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan, telah mengalami perkembangan yang pesat, sehingga menimbulkan cabang-cabang baru yang lebih spesifik di dalam menganalisa dan menyelesaikan persoalan masyarakat yang semakin kompleks. Hal ini sejalan dengan dinamika masyarakat yang semakin maju seiring dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan tidak hanya di bidang ilmu pengetahuan, namun dalam hubungan masyarakatpun menimbulkan dampak yang mau tidak mau harus kita alami. Sosiologi sebagai salah satu ilmu yang berhubungan dengan kegiatan masyarakatpun dituntut untuk menyesuaikan diri, sehingga muncullah ilmu sosiologi hukum, sosiologi politik, sosiologi ekonomi, sosiologi pemerintahan dan sebagainya. Sebelum kita mempelajari sosiologi pemerintahan, kita akan memulai dengan konsep dasar, yang akan membahas pengertian sosiologi, sosiologi pemerintahan dan arti penting studi sosiologi pemerintahan serta ruang lingkup studi sosiologi Pemerintahan

A. Pengertian, ruang lingkup dan metodologi

1. Pengertian sosiologi

SOSIOLOGI merupakan salah satu bidang ilmu yang paling relevan dan praksis dalam kehidupan sehari-hari. Karena sosiologi fokus pada kehidupan dan interaksi manusia dalam kerangka struktur bermasyarakat. Maka, untuk mengenal lebih dalam dalam apa itu sosiologi. Menurut KBBI, sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat; ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Secara etimologis, sosiologi berasal dari gabungan dua kata, yaitu *socius* (bahasa Latin) yang berarti kawan dan *logos* (bahasa Yunani) yang bermakna ilmu pengetahuan. Maka, dapat disimpulkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang membidangi hubungan antara individu dalam kelompok masyarakat. Dalam buku *Ajar Antropologi dan Sosiologi (2020)* oleh St. Laksanto Utomo, sosiologi merupakan salah satu ilmu dasar dalam kehidupan manusia, dan telah dipelajari sejak lama oleh para filsuf Yunani dan Timur. Tercatat, pada 1842, ilmuwan Prancis August Comte memperkenalkan istilah ilmu sosiologi. August Comte juga dikenal sebagai bapak sosiologi. Pada abad ke-19, di Eropa, juga ditandai dengan munculnya filsuf, pemikir, dan para sosiolog baru, seperti, Herbert Spencer, Karl Marx, Max Weber, dan Emile Durkheim. Kelahiran mereka juga tidak dapat dipisahkan dari August Comte yang ikut memperkenalkan ilmu sosiologi saat itu. Ilmu sosiologi sebagai salah satu ilmu social telah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Secara etimologi, istilah “sosiologi” berasal dari kata *socius* (bahasa latin) yang berarti teman, dan *logos* (bahasa Yunani) yang berarti ilmu, kata, sabda. Berdasarkan kata-kata tersebut, beberapa ahli mendefinisikan pengertian sosiologi dengan sudut pandang masing-masing. Ada beberapa ahli yang mendefinisikan sosiologi, antara lain :

- 1) Pitirim Sorokin (Dalam Soekanto, 2003 : 19), menjelaskan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari :
 - a. Hubungan dan pengaruh timbale balik antara berbagai macam gejala social (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama, keluarga dengan moral, hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dan politik, dan sebagainya),
 - b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala social dan gejala non social (misalnya gejala geografis, biologis,

ekologis dan sebagainya), c. Ciri-ciri umum dari semua jenis gejala social.

- 2) Reece Mc. Gee dalam bukunya *Sociology : An Introduction* (1977), merumuskan tiga pengertian sosiologi, sebagai berikut :
 - a. Sosiologi dijelaskan sebagai studi tentang kelompok-kelompok manusia dan pengaruh mereka terhadap perilaku individual,
 - b. Sosiologi dijelaskan sebagai studi tentang tatanan social dan perubahan social, c. Sosiologi dijelaskan sebagai pencarian sebab-sebab social dari hal-hal, cara- cara dimana fenomena social mempengaruhi perilaku manusia.
- 3) Raucok dan Warren mengemukakan Sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok-kelompok.
 - a. Selo Sumardjan dan Soeleman Soemardi mengatakan bahwa sosiologi atau ilmu masyarakat adalah ilmu yang mempelajari struktur social dan proses social, termasuk perubahan social. Struktur social adalah kaidah-kaidah (norma-norma social), lembaga-lembaga social, kelompok social serta lapisan-lapisan social. Proses social adalah pengaruh timbal balik antara pelbagai segi kehidupan bersama.
 - b. Hassan Shadily dalam bukunya *Sosiologi Masyarakat Indonesia* menyebutkan bahwa sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antar manusia yang menguasai kehidupan ini.
- 4) August Comte mengatakan bahwa ilmu Sosiologi adalah ilmu yang didasarkan pada observasi dan klasifikasi yang bersifat empiris dan sistematis. Dalam mengkaji masyarakat, Comte membagi sosiologi dalam dua kategori, yaitu :
 - a. Static Social (social statis, terkait dengan statika social atau struktur social), mencakup struktur social masyarakat berupa kelompok, lembaga-lembaga social, lapisan dan kekuasaan.
 - b. Dynamic Social (social dinamis, terkait dengan dinamika social atau perubahan social). Sosial dinamis adalah fungsi-fungsi masyarakat yang terlibat dalam proses

social, perubahan social, atau interaksi dan konflik yang terjadi antar individu atau antar kelompok.

- 5) Y. B.A. F. Mayor Polak mengatakan bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari masyarakat sebagai keseluruhan, yakni hubungan antar manusia, manusia dengan kelompok, baik formil maupun materiil, baik statis maupun dinamis. Dari berbagai definisi di atas, menurut Rina Martini dkk sosiologi mempelajari tiga hal pokok, yaitu :
- a. Masyarakat, yang berwujud interaksi individu dan individu, kelompok dan kelompok atau individu dan kelompok,
 - b. Lembaga social, yaitu sebuah organisasi yang berfungsi sebagai regulator dan fasilitator dalam setiap interaksi yang terjadi pada pelbagai macam kelompok dan berbagai macam kepentingan dalam masyarakat,
 - c. Interaksi social, yaitu hubungan yang terjadi di dalam masyarakat, baik yang berupa kerjasama, akomodasi, persaingan maupun konflik.

2. Pengertian Pemerintahan

Pemerintahan berasal dari kata “perintah” yang setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, dan ketika ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan, dalam hal ini beda antara “pemerintah” dengan “pemerintahan” adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintahan berarti perihal ataupun hal ikhwal pemerintahan itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung di dalamnya, yaitu sebagai berikut: 1. Ada dua pihak yang terlibat, 2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah, 3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat, 4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan (Syafie, 2011: 61). Secara umum, pemerintahan dapat didefinisikan sebagai organisasi yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu. Pemerintah merupakan sebuah organisasi yang memiliki: 1) Otoritas memerintah dari sebuah unit politik; 2) Kekuasaan yang memerintah suatu masyarakat politik (political); 3) Aparatus yang merupakan badan pemerintahan yang berfungsi dan menjalankan kekuasaan; 4) Kekuasaan untuk membuat peraturan perundangundangan,

untuk menangani perselisihan dan membicarakan putusan administrasi dengan monopoli atas kekuasaan yang sah. Pemerintahan dalam bahasa Inggris disebut government yang berasal dari bahasa Latin; *gubernare*, Greek *kybernan* yang berarti mengemudikan, atau mengendalikan. Tujuan pemerintah meliputi external security, internal order, justice, general welfare dan freedom. Tidak berbeda jauh dengan pendapat S.E. Finer yang melihat pemerintah mempunyai kegiatan terus-menerus (process), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty), dan cara atau metode serta sistem (manner, method, and system) dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Pendapat tersebut berbeda dengan R. Mac Iver, yang memandang pemerintah dari sudut disiplin ilmu politik, "government is the organization of men under authority... how men can be governed". Maksudnya, pemerintahan itu adalah sebagai organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan... bagaimana manusia itu bisa diperintah. Jadi ilmu pemerintahan bagi R. Mac Iver adalah sebuah ilmu tentang bagaimana manusiamanusia dapat diperintah (a science of how men are governed)". Kebutuhan akan pemerintahan berangkat dari fakta bahwa manusia butuh hidup dalam komunitas, juga otonomi pribadi harus dipertahankan dalam komunitas-komunitas ini. Sebuah negara yang memiliki luas dan kompleksitas yang sangat besar biasanya akan memiliki tingkatan pemerintahan: lokal, regional, dan nasional. Sehubungan dengan pengertian pemerintah sangat tergantung pada masing-masing sistem pemerintahan, antara lain:

- 1) Monarki (Monarchy) Monarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang telah diwariskan secara turun temurun. Monarki, berasal dari bahasa Yunani yaitu *monos* yang berarti satu, dan *archein* yang berarti pemerintah. Monarki merupakan sejenis pemerintahan di mana raja menjadi kepala negara. Monarki atau sistem pemerintahan kerajaan adalah sistem tertua di dunia. Pada awal kurun abad ke-19, terdapat lebih 900 buah tahta kerajaan di dunia, tetapi menurun menjadi 240 buah dalam abad ke-20. Sedangkan pada dekade kedelapan abad ke-20, hanya 40 tahta saja yang masih ada.

- 2) Despotisme (Despotism) Despotisme adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seorang pemimpin saja dan semua rakyatnya dianggap sebagai hamba.
- 3) Kediktatoran (Dictatorship) Kediktatoran adalah pemerintahan yang dipimpin oleh seseorang yang memiliki kekuasaan penuh atas rakyat dan negaranya.
- 4) Oligarki (Oligarchy) Oligarki adalah pemerintahan yang dipimpin oleh sekelompok kecil orang yang memiliki kepentingan bersama atau memiliki hubungan kekeluargaan.
- 5) Plutokrasi (Plutocracy) Plutokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari kelas tertinggi atau kelompok kaya.
- 6) 6. Demokrasi (Democracy) Demokrasi adalah pemerintahan yang rakyatnya memegang kekuasaan. Demokrasi dapat bersifat langsung (direct democracy) maupun melalui perwakilan (representative democracy). Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warga negara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politica yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas (independen) dan berada dalam peringkat yang sejajar antara satu dengan lainnya. Kesejajaran dan independensi ketiga jenis lembaga negara ini diperlukan agar ketiga lembaga negara ini bisa saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip checks and balances.
- 7) Teokrasi (Theocracy) Teokrasi adalah pemerintahan yang dipimpin oleh para elit keagamaan.
- 8) S.E. Finer (Finer, 1974 dalam Sumaryadi, 2010: 18) mengklasifikasikan pemerintah ke dalam 4 (empat) pengertian, yakni: 1. Pemerintah mengacu pada proses pemerintahan, yakni pelaksanaan kekuasaan oleh yang berwenang. 2. Istilah ini juga bisa dipakai untuk menyebut keberadaan proses itu sendiri kepada kondisi adanya tata aturan. 3. Pemerintah sering berarti orang-orang yang mengisi kedudukan otoritas dalam masyarakat atau lembaga, artinya kantor atau jabatan-jabatan dalam pemerintahan. 4. Istilah ini juga bisa mengacu pada bentuk, metode, sistem pemerintah dalam suatu masyarakat, yakni

struktur dan pengelolaan dinas pemerintah dan hubungan antara yang memerintah dan yang diperintah. Selain kata pemerintahan, ada juga kata kepemerintahan, yang menurut Ndraha diartikan sebagai segala sesuatu yang menyangkut keadaan pemerintah (Ndraha, 2005: 141). Lebih lanjut dikatakan bahwa kata government dapat diartikan sebagai pemerintah (the governing body of persons in a state) dan bisa juga diartikan pemerintahan (the political direction and control exercised over the action of the members, citizens or inhabitants of communities, societies, and state). Kata governance menurut leksikografi diartikan juga sebagai government, exercise of authority, control; method or system of government. Baik government maupun governance berasal dari kata govern (memerintah, dari Latin; gubernare, gerik; kybernan, to steer, mengemudi kapal, dan sebagainya).

Governing terjadi dan terdapat di mana-mana dan kapan saja pada setiap bentuk kehidupan sosial, termasuk kehidupan sosial khusus yang oleh Aristoteles dikategorikan sebagai "polity". Governing (dalam) "polity" disebut "openbaar bestuur" (Soewargono, 1993 dalam Sumaryadi, 2010: 19). Masih menurut sumber yang sama, hubungan antara government dengan governance diungkapkan oleh Leo Fonseka dalam Good governance..... while the term government indicates a political unit for the function of policy making as distinguished from the administration of policies, the word governance denotes an overall responsibility for both the political and the administrative functions. It also implies ensuring moral behavior and ethical conduct in the task of governing i.e. the continuous ethical exercise of authority on both the political and administrative units of governments. Kata governance (policy making, regeren, mengatur dan administration, besturen, mengurus) lebih luas daripada government (policy making saja). Menurut Leo Fonseka, there are three main regimes involved in good governance. They are the State, the Civil Society, and the Private Sector. Dalam The International Encyclopedia of Social Science (1974), pemerintah diartikan sebagai sekelompok orang yang bertanggung jawab atas penggunaan kekuasaan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemerintah diartikan sebagai sistem menjalankan wewenang dan kekuasaan, atau sistem menjalankan perintah, yang memerintah. Di Belanda, pemerintah disebut juga *administratie* untuk pemerintah dalam arti luas, *bestuur* dalam arti sempit. Dalam konteks lain disebut juga *overheid*, yang di Indonesia disebut penguasa. Filosof J.J. Rousseau, pencetus teori *The Social Contract*, mengartikan pemerintah sebagai suatu badan penengah yang didirikan antara rakyat sebagai subjek dan penguasa, untuk saling menyesuaikan, ditugaskan melaksanakan hukum dan memelihara dengan baik kemerdekaan sipil dan politik. Sementara, Max Weber (dalam Dahl, 1994) mengartikan pemerintah sebagai apa pun yang berhasil menopang klaim bahwa dialah yang secara eksklusif berhak menggunakan kekuatan fisik untuk memaksakan aturaturannya dalam suatu batas wilayah tertentu. Soewargono, mengartikan pemerintah sebagai pemegang kekuasaan politik, sering disebut pula penguasa sebagai penyelenggara pemerintahan umum (Soewargono, 1979 dalam Sumaryadi, 2010: 20).

3. Pengertian Sosiologi Pemerintahan

Sebagaimana dijelaskan di muka, bahwa pusat perhatian sosiologi adalah tingkah laku manusia, baik individu maupun kelompok, namun lebih banyak pada kelompoknya dan hubungannya dengan masyarakat, sehingga merupakan studi tentang tingkah laku manusia dalam konteks social, atau lebih tegas lagi bahwa sosiologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kehidupan manusia dalam masyarakat yang mencakup hubungan antara seseorang dengan orang lain, antara perseorangan dengan kelompok dan hubungan antara kelompok dengan kelompok lainnya. Kalau kita membahas pemerintahan, pastilah akan kita ingat kembali bahwa unit analisa studi pemerintahan adalah negara dan pemerintahan berasal dari kata “ perintah “ yang mengandung beberapa unsure pokok, yaitu ada dua pihak, yakni yang memerintah dan yang diperintah, kedua pihak tersebut mempunyai hubungan fungsional, pihak yang memerintah mempunyai wewenang dan pihak yang diperintah mempunyai ketaatan. Sedangkan pengertian ilmu pemerintahan telah banyak disajikan oleh banyak pakar. Afan Gaffar, misalnya mengatakan bahwa ilmu

pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara. Dengan menggabungkan pengertian sosiologi dan ilmu pemerintahan di atas, kemudian berkembang menjadi Sosiologi pemerintahan. Secara umum, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dengan yang memerintah (pemerintah) yang dipandang sebagai usaha penataan masyarakat. Secara khusus, sosiologi pemerintahan mengkaji hubungan antara yang diperintah (masyarakat) dengan yang memerintah (pemerintah) khususnya tentang sejauhmana pengaruh dari yang memerintah (pemerintah) mampu dalam mengadakan perubahan hubungan masyarakat atau kelompok dalam masyarakat dan sebaliknya juga melihat sejauhmana yang diperintah (masyarakat) atau kelompok-kelompok dalam masyarakat diubah dalam hubungan-hubungan masyarakat tersebut.

Menurut Taliziduhu Ndraha, Sosiologi Pemerintahan adalah kajian tentang pemenuhan kebutuhan rakyat akan jasa public yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil dilihat dari sudut proses social, institusi social, perilaku social dan system nilai yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Sosiologi Pemerintahan sebagai salah satu kajian ilmu social dalam perkembangan masyarakat merupakan sebuah ilmu yang semakin mendapat perhatian dari kalangan intelektual. Hal ini dilandasi sebuah pemikiran , bahwa di dalam sebuah proses politik, pasti bertolak dari kenyataan adanya sifat dasar yang melekat pada manusia sebagai makhluk individu sekaligus makhluk social. Pemahaman sebagai makhluk individu dan social merupakan titik tolak dalam memahami sosiologi pemerintahan. Sebagai makhluk individu, manusia mempunyai dua komponen, yakni jiwa dan raga, sehingga dalam perkembangannya perlu adanya keterpaduan diantara keduanya. Sebagai makhluk individu, manusia hidup dan bertanggungjawab terhadap kehidupannya. Karena sifat yang demikian, setiap orang pasti mempunyai ciri khas tersendiri yang berbeda dengan orang lain. Setiap individu mempunyai kepentingan yang berbeda, sehingga kadang menimbulkan konflik. Sifat dasar yang demikian oleh penganut aliran individualistic dimaknai sebagai satu ketetapan yang mana individu mempunyai hak mutlak yang harus dipenuhi oleh

masyarakat dan hak-hak individu ini tidak boleh dikorbankan demi kepentingan bersama. Sebagai konsekuensinya, upaya pemenuhan berbagai kepentingan individu diprioritaskan daripada kepentingan masyarakat. Sebagai makhluk social, individu hidup bersama di dalam masyarakat, di mana akan terjadi interaksi social dan ia adalah pelaku proses social tersebut. Proses social meliputi proses asosiatif (proses dekat mendekati) dan proses disosiatif (jauh menjauhi). Apabila di lihat dari sudut pelaku, mendekati yang satu dapat berarti menjauhi yang lain. Sebagai makhluk social, ia bertanggungjawab sebagai bagian dari kehidupan bersama, sehingga berbeda dengan paham individualistic yang memandang sifat social manusia hanya sekunder. Pada penganut aliran kolektifisme, kepentingan masyarakat lebih diutamakan daripada kepentingan pribadi, sehingga individu bahkan kepentingan individu dapat dikorbankan demi kepentingan masyarakat. Kedua pandangan di atas merupakan pandangan yang bersifat ekstrim, karena masing-masing mementingkan dirinya sendiri. Namun ada pandangan yang mengkombinasikan keduanya, yakni paham yang seimbang, di mana pada hakekatnya manusia tidak bisa melepaskan diri dari orang lain, sehingga di samping sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk social.

Pandangan ini menegaskan bahwa antara individu dan masyarakat tidak bisa dipisahkan. Masyarakat secara hakiki menentukan individualitas dan kepribadian manusia. Hidup dan berkembangnya individu sangat tergantung pada orang lain. Kenyataan tersebut disebabkan bahwa pada diri manusia mempunyai dua dimensi, yakni dimensi social dan dimensi politik. Dimensi social yang dimiliki oleh manusia menurut Magniz Suseno merupakan ketergantungan dan keterlibatan individu dengan masyarakat. Sifat kesosialan manusia menjelma dalam tiga dimensi, yakni : a. Dalam penghayatan spontan manusia b. Berhadapan dengan lembaga-lembaga social, c. Melalui pengertian-pengertian simbolis terhadap realitas. Adanya sifat ketergantungan manusia dengan masyarakat, pertama-tama disadari dan dihayati manusia dalam kehidupan yang nyata dan spontan setiap hari. Semua kegiatan yang dilakukan manusia akan sangat dirasakan ditentukan oleh adanya manusia yang lain; sehingga dengan demikian manusia membutuhkan kebersamaan. Hubungan

social yang dilakukan manusia tidak bersifat tanpa bentuk, akan tetapi berstruktur. Ada kebutuhan individu yang hanya dapat dipenuhi dalam kebersamaan dengan orang lain, dan ada yang lebih banyak lagi dimana pemenuhannya sangat dipermudah apabila diusahakan bersama-sama. Untuk menjamin agar fungsi-fungsi itu lestari, dikembangkan pola-pola bertindak bersama yang tidak lagi tergantung dari orang-orang dan situasi-situasi tertentu. Pola-pola tindakan bersama tersebut disebut sebagai lembaga. Dimensi kesosialan manusia yang lain adalah segala macam paham, kepercayaan, pandangan tentang makna realitas sebagai keseluruhan. Dunia simbolik, pengertiannya termasuk agama, pandangan dunia, system nilai dan pandangan moral, politik dan estetis, keyakinan-keyakinan filsafati dan bermacam ideology. Fungsi utama system tersebut adalah memberikan legitimasi terhadap struktur-struktur social yang dihadapi manusia sehingga ia mendapatkan orientasi dan kepastian.

Di samping mempunyai dimensi kesosialan, manusia juga mempunyai dimensi politis. Menurut Frans Magniz Suseno, dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai keseluruhan. Ciri khas suatu pendekatan “ politis “ yakni bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dengan demikian, dimensi politis manusia dapat ditentukan sebagai dimensi di mana manusia menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindakannya. Dimensi politis ini mencakup lingkaran kelembagaan hukum dan Negara, system-system nilai serta ideology yang memberikan legitimasi kepadanya. Dengan pemahaman yang komprehensif tentang hakekat manusia sebagai makhluk individu dan social di atas, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa berinteraksi dengan orang lain. Kita membutuhkan lembaga-lembaga social, masyarakat dan Negara serta membutuhkan system nilai dan ideology yang menjadi pedoman dan tujuan hidupnya sebagai warganegara. Demikian pula sebaliknya, proses hidupnya sebagai pribadi turut memberi bentuk kepada lembaga social, system nilai dan ideology yang bersangkutan Hidup manusia hanya mungkin terlaksana dalam interaksi yang bersifat kompleks dengan berbagai aspek social, termasuk di dalamnya interaksi dengan

pemerintah yang diatur dengan aturan tertentu. Keberadaan pemerintah atau Negara diperlukan dalam rangka memadukan potensi dan kekuatan nyata yang ada di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang sudah disepakati bersama. Dengan demikian, fungsi Negara adalah sebagai wasit dalam menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat dalam melaksanakan interaksi dengan berbagai aspeknya. Untuk itu pemerintah harus mempunyai kewenangan yang sah untuk melaksanakan fungsinya, disertai dengan sebuah pertimbangan bahwa aspek kepentingan masyarakat harus lebih dikedepankan.

4. Ruang Lingkup

Sebagai sebuah ilmu yang mengalami perkembangan cukup signifikan, sosiologi Pemerintahan mempunyai beberapa ruang lingkup yang menjadi pokok kajiannya. Ada beberapa kajian yang merupakan ruang lingkup dari Sosiologi Pemerintahan, yaitu :

1) **Gejala-gejala pemerintahan dan Civil Society.**

Pemerintahan suatu negara akan mengalami dinamika, dimana peran masyarakat akan semakin menonjol, disinilah kemudian akan melahirkan masyarakat madani (civil society) secara alamiah. Pada negara tertentu, munculnya masyarakat madani dapat berkembang dan tetap eksis, namun bisa jadi di suatu negara masyarakat madani tidak dapat berkembang karena kuatnya tekanan dari pemerintah. Dalam negara yang demokratis, fenomena masyarakat madani menjadi hal yang mutlak, bahkan eksistensinya akan semakin canggih,

2) **Gejala kekuasaan dan kewenangan.** Gejala kekuasaan merupakan fenomena yang menyertai keberadaan masyarakat, hal ini terjadi karena di masyarakat pasti akan muncul sekelompok orang dapat mempengaruhi kelompok yang lain. Kelompok orang yang mempunyai kekuasaan pasti melekat kewenangan. Di dalam kekuasaan mengandung unsure-unsur pengaruh, kepatuhan, pemaksaan dan otoritas.. Kekuasaan dan kewenangan merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan, namun kewenangan menekankan pada unsure hak, yakni pemegang kewenangan mempunyai hak untuk melakukan dan menetapkan sesuatu, yang berarti bahwa kekuasaannya memiliki legitimasi.

Implementasi dari gejala kekuasaan dan kewenangan bisa dilihat dari adanya dominasi antara individu atau kelompok terhadap individu atau kelompok yang lain, sehingga akan muncul fenomena : (1) pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah, atau (2) pihak yang menguasai dan pihak yang mentatati, dimana pihak yang menguasai selalu jumlahnya lebih kecil dari pihak yang dikuasai.

- 3) **Gejala konflik dalam pemerintahan.** Penyelenggaraan pemerintahan di dalam pelaksanaannya pasti akan menimbulkan konflik. Konflik akan terjadi manakala kekuasaan dan kewenangan yang ada dalam masyarakat tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Tegasnya, konflik akan terjadi manakala penguasa tidak mampu mendistribusikan secara adil kekuasaan yang dimiliki kepada kelompok-kelompok yang ada di masyarakat. Bahkan konflik juga dapat terjadi apabila ada perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat tentang hakekat kekuasaan dan kewenangan itu sendiri.
- 4) **Gejala birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan.** Birokrasi sebagai salah satu ruang lingkup sosiologi pemerintahan mempunyai tipe yang sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat setempat. Di Indonesia, khususnya, budaya jawa masih sangat dominant, sehingga birokrasi yang ada juga masih terpengaruh budaya jawa. Demikian juga dengan kepemimpinan yang ada di birokrasi sangat dipengaruhi budaya yang dianut masyarakat.
- 4) **Kebijakan pemerintah.** Kebijakan pemerintah sebagai implementasi dari peran regulasi pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh komitmen dari pemerintah. di mana pada hakekatnya pemerintah mempunyai kewajiban untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat , sehingga kebijakan yang diambil harus benar-benar bermuara pada aspirasi masyarakat, karena apabila ini diabaikan pasti akan mendapatkan reaksi yang negative dari masyarakat.

Sosiologi Pemerintahan sebagai salah satu ilmu yang mempelajari masyarakat secara keseluruhan semakin diperlukan dalam kehidupan manusia, hal ini beranjak bahwa di dalam diri manusia terdapat dua dimensi yang saling berkaitan, yakni dimensi social dan dimensi politik yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu.

Sosiologi Pemerintahan mempelajari masyarakat, lembaga social dan interaksi yang ada di dalam masyarakat. Ada beberapa ruang lingkup bahasan sosiologi pemerintahan, yaitu gejala pemerintahan dan civil society, gejala kekuasaan dan kewenangan, gejala konflik dalam pemerintahan, gejala birokrasi dan kepemimpinan pemerintahan dan kebijakan pemerintah.

5. Metodologi

- 1) SOSIOLOGIS : MENGURAIKAN ANTAR VARIAN-FAKTOR DAN GEJALA SOSIAL PEMERINTAHAN
- 2) HISTORIS : MENGURAIKAN BERDASARKAN URUTAN PERISTIWA ATAU KEJADIAN MASALAH
- 3) ANTROPOLOGIS : MENJELASKAN KONDISI MASING-MASING SUBJEK SEBAGAI KOMUNITAS ATAU KELOMPOK MASYARAKAT

B. SOSIOLOGI POLITIK INDONESIA : PERSPEKTIF DAN KARAKTERISTIK

Setelah pada bab sebelumnya dikemukakan latar belakang, pengertian, ruang lingkup serta metodologi tentang sosiologi Pemerintahan, maka pada bab ini secara khusus hendak dikemukakan perkembangan pemikiran Islam Indonesia tentang politik dan Islam. Pada bab ini secara detail hendak dikemukakan terkait dengan fenomena Islam Indonesia yang sangat beragam dalam pemikiran politik dan teologisnya. Kita akan dapat saksikan perubahan-perubahan pandangan politik dan teologis masyarakat karena banyak factor yang turut mempengaruhinya sehingga tidak mudah untuk menempatkan satu kelompok murni dalam kelompoknya. Hal ini karena adanya fakta bahwasatu kelompok Islam ternyata memiliki berbagai identitas kelompok yang saling meminjam sehingga tampak tumpang tindih, dimana secara sosiologis merupakan hal yang disebut dengan percampuran masyarakat dan kultur. Istilah yang paling cocok bisa disebutkan disana adalah praktek multikulturalisme dan hetegorenisme menjadi hal yang paling nyata di masyarakat Indonesia kontemporer. Nyaris tidak ada yang menyangkal jika dikatakan bahwa Indonesia merupakan Negara yang unik dan jamak. Pelbagai pemikiran keislaman berkembang dari yang dikatakan paling kiri (Komunisme Islam)

atau Kiri Islam dalam perspektif pembelaan kaum mustadafin, moderat seperti Muhammadiyah dan NU, sampai yang paling kanan seperti Front Pembela Islam, Hizbut Tahrir Indonesia, sekarang oleh negara hendak dibubarkan menunggu keputusan Kehakiman dan Menteri Hukum dan HAM, apakah HTI akan dibubarkan secara resmi ataukah tidak. Selain itu, kita juga dapat melihat Majelis Mujahidin semua bersemai di Indonesia. Bahkan sekarang ini pasca Pemilu Presiden 2014, dengan adanya Pemilihan Kepala daerah (PILAKDA Langsung), tahun 2018 dan seterusnya kita mendengar dengan terang benderang adanya apa yang dinamakan Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI (GNPF) dengan ketua bahtiar Nasir. Diantara mereka kadang tampak saling bertabrakan, tetapi dilain kesempatan saling bertemu dan Nampak akur. Dalam beberapa hal memang diantara mereka tidak bisa bertemu karena perbedaan perspektif teologis, tetapi dalam perspektif sosial dan ekonomi tampaknya bisa bertemu; baik yang Kiri, Moderat maupun Kanan sama-sama tidak menyetujui system kapitalisme dan neoliberalisme yang menghancurkan Negara. Ketiganya berharap system sosial ekonomi yang membela kaum miskin, sekalipun dengan metodenya masing-masing, tidak sama dalam implementasinya. Kiri Islam (Komunisme Islam) cenderung mengawinkan antara Islam dan komunisme. Moderatisme Islam cenderung menempatkan kaum miskin dalam posisi perlu dibela dengan ekonomi karitaif dan pemberdayaan, sementara Kanan Islam lebih menempatkan perubahan system ekonomi dari nasional (mungkin Pancasila) menjadi Islamic economics.

Secara ringkas dapat dikatakan Indonesia adalah Negeri yang memang subur makmur, termasuk dalam hal pertumbuhan partai politik Islam. Selama era Reformasi partai Islam senantiasa terlibat dalam pemilu, tidak pernah kurang dari lima. Rata-rata 7 partai Islam ikut pemilu selama era reformasi 1999-2009. Namun kecenderungan perolehan suaranya adalah menurun. Dengan kondisi seperti itu sebenarnya dapat dikatakan bahwa partai Islam telah mengalami kemerosotan pamor dan kredibilitasnya di mata para pemilih. Hal ini juga mengindikasikan bahwa dengan banyaknya muncul partai Islam (santri) baru, sebenarnya tidak jelas apa misi, tujuan dan untuk apa berdiri. Partai Islam tak lebih dari sebuah gagasan sebagian orang yang cenderung menjaga “syahwat politik” kaum muslim yang merasa adanya

keharusan Islam masuk dalam politik praktis Indonesia karena sejarah politik Islam Indonesia telah lahir sejak sebelum kemerdekaan bangsa ini. Partai politik hilang muncul ibarat jamur dimusim penghujan. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir (tepatnya pasca Reformasi politik 1998, sampai 2009) jumlah partai politik yang turut didaftarkan Pemilu Legislatif tidak pernah kurang dari 40 partai) termasuk jumlah partai Islam yang selalu hadir lebih dari 10. Benar pada akhirnya partai Islam yang dapat bertahan dan lolos batas minimal perolehan suara tidak lebih dari 10 partai politik, paling banter 7 partai politik Islam. Partai Islam dan partai tidak Islam agak sulit dibedakan kecuali dalam hal asasnya. Keduanya sama-sama berebut kekuasaan dan berebut massa konvensional Islam. Bahkan belakangan dalam hal partai yang bersih dapat dikatakan sama-sama buruknya. Kasu anggota legislative dan pejabat partai yang korupsi, sama-sama banyaknya. Bahkan pernah suatu ketika seluruh anggota dewan sebuah provinsinsi semuanya menjadi tersangka kasus korupsi sehingga harus masuk penjara sekalipun tidak jadi dipenjara. Kondisi memburuk seperti itu, tidak datang secara tiba-tiba, tetapi terdapat proses panjang yang mengikutinya. Jika kita lihat salah satu penyebabnya adalah munculnya *patron-client* yang berorientasi pada perebutan kekuasaan secara vulgar. Antar elemen partai politik tidak lagi menunjukkan etika berpolitik yang santun, ramah dan tidak haus kekuasaan.

Para politisi cenderung menerapkan sistem penyelamatan individu ketimbang menyelamatkan bangsanya. Karakteristik politisi demikian oleh Mochtar Mas'ood dikatakan sebagai strategi *political survival*, yang mengutamakan adanya pilihan-pilihan yang berkaitan dengan kepentingan individual atau kepentingan partainya, bukan kepentingan rakyatnya. Bahkan jika kita hendak mengikuti Pramoedya Ananta Toer, kita sekarang tengah berada pada periode politik kriminal dan kriminal politik, sebuah periode dimana politik tidak lepas dari masalah-masalah kriminalitas seperti korupsi, dan politisinya adalah orang-orang yang bertindak kriminal dan dikriminalkan oleh hukum serta *public*. Santri dalam berpolitik tidak lagi sublim, tetapi vulgarisme politik yang memiliki tujuan bukan mensejahterakan bangsa. Santri dalam berpolitik tidak memiliki etika politik dan kesantunan berpolitik (alias *fatsoen* politik yang rendah) sehingga tidak ada bedanya antara mereka yang

tidak melabelkan dirinya sebagai politisi muslim. Kondisi seperti ini tampak jelas terlihat dengan banyaknya politisi muslim yang akhirnya harus mendekam di penjara karena pelbagai macam kasus hukum yang menjeratnya. Politisi muslim pun terjerat karena korupsi, kasus VCD porno, penggemukan sapi, mark up dana pengadaan barang seperti sarung, mark up budget pembangunan fasilitas publik sampai merekayasa dana penghijauan. Semunya dilakukan oleh politisi muslim. Kita dapat menyaksikan betapa terjadi kesenjangan yang kuat antara para pejabat, pengusaha dengan rakyat dalam kepemilikan ekonomi. Benar bahwa tidak semua pengusaha dibawah ini merupakan pengusaha hitam, tetapi kesenjangan ekonomi merupakan hal yang nyata adanya. Lihatlah daftar aparat birokrat kita yang tertangkap karena menggelapkan uang Negara (alias melakukan korupsi) sejak bulan Februari 2011 sampai 24 Nopember 2011 secara berturut-turut. Mereka adalah (1) Dwi Seno Widjanarko, Jaksa di Kejaksaan Negeri Tangerang, Banten, tertangkap dengan dugaan menerima suap dari pegawai BRI Kantor Cabang Jaunda Ciputat. (2) Wafid Muharam, Sekretaris Kemenpora. Diduga menerima suap berupa tiga lembar cek seniali Rp. 3,2 miliar terkait pembangunan wisma atlet SEA Games 2011 di Palembang. (3) Imas Dianasari, seorang hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial, Pengadilan Negeri Bandung. Ditangkap dalam dugaan kasus suap sebesar Rp. 200 juta terkait dengan perkara hubungan industrial PT Onoamba Indonesia. (4) I Nyoman Suisnaya dan Dadong Irbarelawan, Pejabat Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi. Diduga menerima suap sebesar Rp. 1,5 miliair sebagai "fee" pencairan dana perceatan pembangunan infrastruktur daerah Transmigrasi 2011. (5) Sistoyo, Kepala Sub Bagian Pembinaan Negeri Cibinong Jawa Barat. Ditangkap di halaman Kejari Cibinong dengan barang bukti uang Rp. 99,9 juta dari pengusaha AB dan E, diduga untuk meringankan tuntutan terhadap terdakwa E. (6) Agung Purno Sardjono dan Sumartono, anggota DPRD Kota Semarang, serta Akhmad Zaenuri, Sekretaris Daerah Kota Semarang. Ditangkap di halaman parker Balaikota Semarang mmbawa 10 amplop diduga berisi uang panjar untuk memuluskan pembahasan RAPBD Kota Semarang 2012. (Kompas, 25 Nopember 2011) Lihat pula kasus korupsi yang menimpa pembangunan Wisma Atlet di Palembang terkait Sea Games 2011.

Nama-nama politisi seperti (1) Mohammad el Idris, menemui Rizal Abdullah (Ketua Komite Pembangunan Wisma Atlet Palembang dan meminta supaya PT Duta Graha Indah yang mengerjakan proyek. Idris juga memberikan cek senilai 4,5 miliar kepada Nazaruddin Politisi dan Bendahara Partai Demokrat. (2) Angelina Sondakh, meminta Nazaruddin dan Rosa agar menghubungi pihak Kemenpora. (3) mindo Rosalina Manulang, beberapa kali menemui Wafid terkait proyek wisma atlet, memperkenalkan El Idris dan Dudung Purwadi kepada Wafid, bersama El Idris bertemu Rizal. (4) Wafid Mharam, meminta Rosa menghubungi pihak-pihak yang akan melaksanakan proye di daerah. Meminta Rizal agar PT Duta Graha Indah dibantu supaya menjadi pelaksana proyek. (5) Yulianis da Oktarina Furi menerima cek sebesar 4,5 miliar. (Kompas, 2 Desember 2011) Bahkan paling mengerikan lagi adalah Indonesia sebagai Negara mayoritas muslim, ternyata Departemen yang mengurus soal nurani dan keyakinan seseorang yakni Departemen Agama merupakan Departemen terkorup di Indonsia bersama Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, disusul Departemen Koperasi dan UKM. Hasil survey yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia terhdap 22 instansi pusat yang diteliti. Kementrian Agama RI menduduk peringkat terbawah dalam indeks intergritas, yang berhubungan dengan praktik suap dan gratifikasi (pemberian hadiah) Penilaian indeks integritas Pusat mencapai standart 7,07.

Kementrian Agama hanya mencapai 5,37 dibawah Suryadarma Ali politisi Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan partai Islam dan berasaskan islam,. Kementrian Transkertran (Kementrian Tenagar Kerja dan Transmigrasi mendapatkan nilai indeks integritas 5,44, dimana menterianya adalah Muhaimin Iskandar dari Partai Kebangkitan Bangsa yang merupakan partai yang didirikan oleh para tokoh agama (kiai NU) dan berjamaah Islam (NU); serta Kementrian Komperasi dan UKM, dimana Menteriya berasal dari Partai Demokrat yakni Syarif Hasan menempati rangking terburuk ketiga dengan indeks integritas 5,52. Tiga kementrian yang strategis menjadi sarang berseminya korupsi sehingga negeri ini menjadi negeri terkorup secaa terus menerus dalam tiga tahun terakhir. Dimanakan pemberantasan korupsi berlangsung, jika indeks nilai korupsi Indonesia selalu tinggi? Benar terjadi

pemberantasan korupsi tetapi korupsi kelas teri, bukan korupsi kelas kakap dan hiu, sebab korupsi kelas kakap dan hiu merupakan korupsi yang diduga melibatkan banyak pihak termasuk tokoh-tokoh partai dan politisi bahkan birokrat yang dekat dengan presiden bahkan ada dugaan melibatkan presiden. Kasus Bank Century adalah korupsi yang paling ramai dibahas dan vulgar adanya, selain skandal Gubernur Bank Indonesia yang melibatkan Mirnada Goeltom sebagai Deputy Senior Bank Indonesia. Lihatlah kasus Miranda S Goletom sampai tahun 2012 tidak selesai diurus oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (Kompas, Kedaulatan Rakyat, Koran Tempo, 28 Januari 2012). Memperhatikan kondisi seperti itu sungguh menjadi perhatian kita semua. Betapa sebuah departemen yang mengurus masalah ibadah dalam hal ini urusan Haji berhubungan dengan perpanjangan ijin perjalanan haji khusus dan perpanjangan kelompok bimbingan haji merupakan ladang paling subur terjadinya praktek suap dan gratifikasi (pemberian hadiah untuk dapat menyelenggarakan ijin haji dan bimbingan haji). Sementara departemen yang mengurus pekerjaan manusia dan nasib hidup bangsa yang terjadi ijin untuk menggunakan tenaga kerja asing, sedangkan untuk urusan koperasi yang menjadi penopang ekonomi rakyat terjadi monopoli pelayanan dan data akses pasar domestic oleh perumahapengusaha dan perusahaan tertentu oleh pihak Kementrian Koperasi dan UKM. (Kompas, 29 Nopember 2011) Dengan kondisi seperti itu, Indonesia kembali lagi menempati posisi Negara terkorup di Dunia bersama Argentina, Tome and Principe, Suriname, dan Tanzania. Indonesia berada pada posisi ke-100 dari 183 negara yang disurvei dengan nilai 3,0. Indonesia lebih buruk posisi korupsinya dibandingkan dengan Negara-negara Asia seperti Singapura, Brunei, Malaysia dan Thailand sebagai dilaporkan Transparency International. (Kompas, 2 Desember 2011) Kondisi semacam itu tentu harus dihubungkan dengan kondisi partai politik di Indonesia. Termasuk partai politik Islam yang bekerja dan bertarung dalam perpolitikan nasional berbarengan dengan partai-partai non Islam dalam arti asas dan basis massanya.

Partai Islam tentu saja menyumbangkan kondisi terpuruknya Indonesia dalam hal korupsi sebab dalam beberapa survey belakangan, kondisi paling buruk adalah politisi-politisi yang ada di senayan termasuk politisi muda yang

melenggang ke senayan menjadi anggota dewan tingkat pusat. Performance buruknya partai-partai di Indonesia dapat saja menjadi factor utama memburuknya birokrasi Indonesia sebab birokrasi kita dihuni oleh para kader partai yang tidak memiliki etika politik, kecuali memiliki hasrat mendapatkan keuntungan material secara mendadak dan tidak bertanggung jawab. Jalan-jalan korupsi melalui pembekakan anggaran, rekanan proyek, mark up budget, biaya perjalanan sampai dengan pembelian peralatan kantor termasuk mebelair adalah cara-cara korup yang dilakukan oleh birokrat sekaligus politisi nasional. Kita tentu saja masih mengingat dengan segar betapa Dewan Perwakilan Rakyat DPR) hendak merevosi ruangan Dewan yang luasnya 20 meter persegi dengan biaya 20 miliar, dan biaya pengharum ruangan 2 miliar serta mebelair seharga 2,4 miliar. Fantastik dan mengagetkan banyak pihak dan menuai protes tetapi DPR bergeming, bahkan Kejaksaan dan Kehaikam ikut-ikutan untuk mengganti mebelainya dengan harga yang tidak kurang dari 2, 5 miliar. (Kompas, Kedaulatan Rakyat, Koran Tempo, 15-25 Januari 2012) Kondisi partai-partai Islam yang sedemikian memburuk tampak memunculkan banyak pilihan politik santri yang didasarkan pada ideologi dan tampilan permukaan. Mereka sibuk melakukan pencitraan diri sebagai partai moralis, partai yang bersih, dan yang paling membela kepentingan rakyat. PKS, misalnya, yang sejak kemunculan awalnya (Partai Keadilan) mengambil bentuk partai ideologis, kini lebih memilih penampilan permukaan yang manis. PKS adalah partai yang dianggap paling sukses mencitrakan dirinya sebagai partai bersih, profesional, dan merakyat. Namun, sayangnya semua itu tidak berpengaruh signifikan pada perolehan suara pemilu sejak 1999 sampai 2009. Dengan demikian, pada akhirnya partai Islam gagal total dalam mencitrakan dirinya. Perolehan suara PKS dan partai politik santri lainnya melempem, tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang mayoritas. Perolehan suara partai Islam tidak berjejer lurus dengan banyaknya umat Islam. Partai Islam maupun partai nasional semuanya diam bahkan pura-pura tidak mengetahuinya, sampai Ketua Dewan Marzuki Ali dari Partai Demokrat dengan tanpa dosa mengatakan tidak tahu menahu. Benar-benar tidak masuk akal.

Ajaib sebagai Ketua Dewan sampai persoalan anggaran renovasi ruangan mengatakan tidak tahu, sebab semuanya pasti

di setuju oleh Pimpinan Dewan. Oleh sebab itu, hal yang perlu dikemukakan di sini adalah bahwa pemilihan partai Islam sebenarnya didasarkan pula pada apa yang dinamakan dengan pemilahan kultur dan afiliasi partai dalam tubuh Islam di Indonesia. Karena itu, kendati pemilahan partai Islam banyak menuai kritik dari para pengamat, tetapi pemilahan terhadap partai Islam rasional modernis, Islam tradisional, dan Islam progresif ternyata di dalam realitasnya masih mendapatkan tempat signifikan. Secara makro kelompok rasional modernis seringkali dialamatkan pada kelompok politisi dan partai berhaluan Muhammadiyah, Masyumi tahun 1955, maupun Syarikat Islam. Sedangkan afiliasi Islam tradisional sering dialamatkan pada politisi dan partai berhaluan NU dan sejenisnya seperti PPP, Muslimin Indonesia, yang cenderung dekat dengan massa muslim kalangan pesantren dan sebagian pedesaan dan berpendidikan keislaman klasik. Sementara kultur partai dan politisi progresif lebih cenderung dialamatkan pada politisi dan partai yang tidak secara langsung berasaskan Islam tetapi sebagian pengurusnya adalah aktivis Islam atau mantan aktivis Mahasiswa muslim. Bisa disebut disana adalah Partai Golkar, bahkan belakangan Partai Demokrat dan Gerindra serta Hanura yang di di dalamnya banyak mantan aktivis mahasiswa muslim menjadi pengurus sekaligus anggota legislative dari mantan aktivis mahasiswa. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang semula dianggap sebagai kelompok yang dekat dengan kaum jawa abangan dan petani, belakangan tidak kurang-kurangnya membenrtuk sekoci untuk menampung poitisi-politisi muslim yang aktivis yakni Baitul Muslimin Indonesia (BMI) sebagai sayap muslim politik PDI Perjuangan. Disana bisa disebut beberapa nama misalnya Zuhairi Misrawi (kaum muda NU), Afnan Malay (mantan aktivis HMI Yogyakarta tahun 1980-1990); Hamid Basyaib (Jaringan Islam Liberal), dan seterusnya. Kita dapat menyaksikan pertengkaran dalam tubuh partai berafiliasi dengan massa muslim adalah Partai Amanat Nasional dan Partai Matahari Bangsa keduanya saling berebut massa konvensional Muhammadiyah (modernis).

Kasus di Muhammadiyah misalnya, karena kekecewaannya pada politisi-politisi Muhammadiyah di dalam Partai Amanat Nasional (PAN) maka dalam Sidang Tanwir di Banjarmasin tahun 2005 akhirnya berikhtiar membentuk partai

baru yang berafiliasi pada Muhammadiyah, yakni Partai Matahari Bangsa (PMB). Demikian pula kelompok kiai yang kecewa dengan Abdurrahman Wahid mendirikan Partai Kebangkitan Nahdlatul Umat (PKNU), serta kekecewaan terhadap politisi PPP maka sosok kiai sejuta umat, KH. Zainuddin MZ, mendirikan Partai Bintang Reformasi (PBR). Hal yang dapat dibaca dari adanya kekecewaan para politisi muslim adalah mereka sebenarnya sedang berebut pada arena yang sama, yakni sesama umat Islam kubu modernis dan tradisional. Kubu muslim modernis dari Muhammadiyah diperebutkan PAN dan PMB sementara kubu muslim tradisional diperebutkan PKB dan PKNU. (Zainuddin Maliki, 2010) Massa pemilih sebagian besar tidak memiliki basis Muhammadiyah memilih PAN pada Pemilu 1999, 2004 dan 2009, namun nyatanya PAN jauh lebih unggul dari PMB yang muncul belakangan dari rahim Muhammadiyah. Namun dalam makna yang sesungguhnya, sebenarnya baik PKB, PKNU, PAN maupun PMB adalah partai Islam yang telah mengalami kebangkrutan dari para pemilih muslim. Partai Islam bangkrut karena ulahnya sendiri yang tidak mampu menjaga etika politik yang dahulu dimiliki oleh para politikus muslim semacam M. Natsir, Prawoto Mangkusasmito, Kasman Singodimedjo, Mr. Jusuf Wibisono, Agus Salim, Cokroaminoto, Syafruddin Prawiranegara dan sebagainya. Merujuk pada bangkrutnya partai-partai Islam di Indonesia menjadi menarik sebab dengan penduduk muslim mayoritas ternyata pemilih Indonesia tidak menghendaki partai Islam, sekalipun sebagian dari aktivis partai Islam menyatakan bahwa partai Islam akan mendapatkan dukungan dari masyarakat. Buktinya dengan pelbagai macam Perda yang berhubungan dengan Syariat, misalnya Perda Jilbab, Perda Miras dan Perda Perjudian. Padahal jika boleh dikatakan adalah bahwa masyarakat Islam memang benar adanya tidak menyukai atau mendukung perdukunan, perjudian, minum minuman keras alias mabuk-mabukkan, mendukung pemakaian jilbab, mendukung membayar zakat dan sodakoh, dan ibadah lainnya. Tetapi tidak serta merta mendukung partai Islam dalam Pemilu atau menjadikan aspirasi suaranya melalui partai-partai berasaskan Islam. Sebab masyarakat muslim telah mulai paham bahwa antara syariat Islam dengan partai porupakan dua hal yang berbeda, tidak dapat serta merta disamakan. Politik berhubungan dengan urusan kekuasaan dan jabatan, sementara

syariat dan Islam merupakan hal yang berhubungan dengan ibadah atau pengabdian pada Tuhan oleh para hamba-Nya. Disini sebenarnya paham yang dinamakan sekularisasi telah menjadi pandangan hidup masyarakat.

Masih ada banyak penyebab yang menjadikannya partai-partai Islam tidak laku di hadapan para pemilih muslim. Salah satu penyebab yang paling kentara adalah bahwa pilihan ideologi politiknya adalah “perolehan kekuasaan” sebagai tujuan, bukan murni berlandaskan perjuangan nilai-nilai keislaman untuk kesejahteraan rakyat. Agak sulit untuk menemukan tujuan luhur partai Islam yang dijalankan secara sungguh-sungguh di lapangan. Yang justru tampak adalah bahwa partai-partai Islam mendulang suara dengan mengakomodir persoalan-persoalan keduniawian, power sharing, dan sharing oppornunity sesama para politisi sehingga apa yang menjadi trade mark partai Islam lenyap seketika. Partai Islam memang masih ada beberapa tetapi nyaris tidak mendapatkan perhatian public, sebab dari prosentase suara yang diperolehnya jelas tidak signifikan dengan jumlah penduduk muslim Indonesia. Ada kemungkinan karena telah terjadinya arus substansialisasi Islam dalam public politik ketimbang formalisasi politik Islam Indonesia, sebagai bentuk baru politik Islam Indonesia. Namun tidak menutup kemungkinan juga karena telah munculnya kejenuhan public atas format politik Islam Indonesia yang tidak jelas dan hanya daur ulang atas politik Islam masa lalu dan tidak berbeda dengan politik bukan format Islam. pendidikan dan pengetahuan partai yang memadai, sehingga dalam menentukan pilihan partai didasarkan pada adanya ikatan emosional pada seseorang atau tokoh tertentu di dalam partai. Abdurrahman Wahid adalah salah satu tokoh PKB yang menjadi ikon terpenting dalam partai ketimbang kiai NU lainnya. Sementara dalam PAN, sekalipun dianggap sebagai partai modernis, Amien Rais menjadi figur sentral yang terus menerus dipakai oleh partai untuk mendulang suara. Dari sana kemudian dapat dikatakan bahwa para pemilih bukan pemilih rasional, tetapi emosional. PKB Abdurrahman Wahid masih bisa bertengger di lima besar. Begitupun PAN, sekalipun tidak ada instruksi resmi dari PP Muhammadiyah agar setiap orang. Dalam bahasa lain dapat dikatakan tidak ada perbedaan signifikan antara politik Islam dan politik bukan Islam dalam

perilakunya, hanya dibedakan oleh asas yang dipergunakannya. Inilah hal yang menarik untuk dikaji terus oleh pengamat Islam politik Indonesia dan tentu saja oleh aktivis Islam politik Indonesia. Perhatian public atas Islam politik penting dilakukan sebab Indonesia merupakan Negara dengan penganut Islam terbesar dimuka bumi, dan dianggap paling moderat bukan format Islam radikalisme.

Dalam bagian ini saya akan memberikan beberapa catatan terkait dengan perkembangan gerakan Islam yang terjadi selama sepuluh tahun terakhir di Indonesia. Catatan ini masih berupa catatan awal karena itu masih perlu elaborasi lebih jauh sehingga dapat memberikan “gambar” yang semakin jelas tentang formula gerakan Islam Indonesia (sekurang-kurangnya sepuluh tahun terakhir) sekalipun kemunculannya telah terjadi sejak tahun 1990-an di Indonesia. Hanya saja saya memperhatikan pada tahun 1990-an masih bersifat embrional, dan pada tahun 2000-an benar-benar menemukan bentuknya karena ruang artikulasinya demikian terbuka lebar. Pertanyaannya gerakan Islam manakah yang akan menjadi pemenang sehingga mempengaruhi pola keislaman Indonesia menjadi hal yang hemat saya perlu mendapatkan perhatian dari intelektual muslim Indonesia tahun 2000-an sekarang ini.

C. Sosiologi Pedesaan dan Pemerintahan Desa

Sosiologi pedesaan adalah salah satu cabang dari sosiologi itu sendiri. Secara historis, ia berkembang setelah segi-segi kemanusiaan dari pertanian mendapat perhatian di Amerika Serikat, yaitu pada tahun 1908. 2 Kajiannya bermula dari tulisan seorang pendeeta Kristen yang kondisi social ekonomi masyarakat pedesaan di bagian utara Amerika. Lewat tulisan itu mereka memecahkan persoalan yang timbul di pedesaan akibat lahirnya industry, sehingga menyebabkan sebagian daerah pedesaan menjadi terbengkalai. Selain itu, berakhirnya masa penjelajahan daerah baru ke daerah Barat akhir abad 19. Pada tahun 1920-an, mata kuliah tentang persoalan kehidupan pedesaan mulai dikaji di berbagai universitas terutama di The American Sociological Society. Sosiologi Pedesaan dipahami sebagai penerapan teori-teori (umum) sosiologi dalam mempelajari masyarakat. Smith dan Zophf dalam Bahrein (1996) mengemukakan bahwa sosiologi pedesaan adalah sosiologi dari kehidupan pedesaan (sociologi of rural life). Studi

ini adalah suatu pengetahuan yang sistematis sebagai hasil, penerapan metode ilmiah dalam upaya mempelajari masyarakat pedesaan, struktur dan organisasi sosialnya, sistem dasar masyarakat, dan proses perubahan sosial yang terjadi. Pendapat Smith dan Zophf didukung oleh Wiriartmaja dimana sosiologi pedesaan adalah ilmu yang mencoba mengkaji hubungan anggota masyarakat di dalam dan antara kelompok-kelompok di lingkungan pedesaan. Sementara itu Rogers dkk dalam Bahrein (1996), melihat sosiologi pedesaan sebagai ilmu yang mempelajari perilaku spasial (fenomena) masyarakat dalam setting pedesaan yang berhubungan dengan kelompoknya. Sosiologi pedesaan lebih sering dipakai dalam pemecahan masalah masyarakat pedesaan.

Oleh karena itu, studi ini lebih berorientasi pada proses perubahan sosial dan pemecahan masalah. Tidak jauh berbeda jauh dengan Galeski (1972), sosiologi pedesaan disebutnya sebagai studi yang cenderung deskriptif, karena pedesaan merupakan daerah pertanian, terdapat pola-pola pertanian dan bertani, kehidupan keluarga di desa, tingkat kehidupan dan perkembangan penduduknya, struktur sosial yang berhubungan dengan pekerjaan, lembaga-lembaga pedesaan, adat dan kebiasaan penduduk dan sebagainya. Bahkan dewasa ini sosiologi pedesaan ada yang menganggap sama dengan sosiologi pertanian (*sociology of agriculture*). Namun keduanya memiliki perbedaan, yaitu sosiologi pertanian cenderung memfokuskan upaya sosiologi bagi masyarakat desa yang menggeluti pertanian saja. Sedangkan sosiologi pedesaan menekankan studinya pada masyarakat pedesaan tanpa mempersoalkan hubungan mereka dengan usaha tani. Karena banyaknya masyarakat desa yang tidak lagi secara langsung terlibat pada sektor primer, tetapi sudah berkembang ke sektor sekunder. Peran pemerintahan desa pada masa era reformasi memiliki penguatan yang sangat mandiri dalam mengelola sistem pemerintahannya baik dari aspek perencanaan, pelaksanaan, hingga pada hasil yang diperoleh dari dampak pembangunan yang dilakukan. Secara historikal masyarakat desa memiliki sumbangsi yang sangat besar dalam membangun bangsa, mulai dimasa feodal, kolonial, perang kemerdekaan dan pasca kemerdekaan hingga era reformasi saat ini. Perkembangan dan dinamisasi akan kebutuhan masyarakat desa telah memberikan warna tersendiri dalam mencirikan

solusi alternatif bagi kehidupan desa dan masyarakatnya. Sistem pemilihan kepala desa yang dipilih secara langsung oleh rakyat, telah mewarnai prinsip demokrasi pada sistem pengelolaan pemerintahan desa. Perkembangan pembangunan desa sejak diberlakukannya penguatan otonomi desa dalam aspek pengelolaan keuangan desa menyebabkan terjadinya pembangunan tidak terprogram dengan baik, karena sudah muncul juga rasa egoisme dalam mewujudkan kepemimpinan yang silih berganti.

Berbagai kebijakan pemerintah desa, saat ini berjalan berdasarkan perkembangan dan kewenangan yang berdasarkan pada masuknya arus penggunaan teknologi sehingga memaksa desa perlu mendukung kebijakan dalam bidang pelayanan berbasis teknologi. Sebagai suatu bentuk organisasi pemerintahan, desa memiliki otonomi asli. Otonomi asli yaitu hak dan wewenang untuk mengatur dan mengurus atau menyelenggarakan rumah tangganya sendiri, yang diperoleh dari dalam masyarakat desa itu sendiri berdasarkan hukum adat. Sebagaimana pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah, jalannya pemerintahan desa tidak terlepas dari sosiologi masyarakat. Sisi-sisi kehidupan manusia berpengaruh besar terhadap implementasi pemerintahan desa. Atas dasar pemikiran inilah, meneropong implementasi pemerintahan desa tanpa mempertimbangkan aspek sosiologis merupakan keteledoran. Ketika menjalankan fungsi, perangkat desa selalu menyesuaikan diri dengan jadwal kegiatan sehari-hari. Di luar kewajibannya selaku organ pemerintahan desa, mereka juga berperan sebagai kepala atau anggota keluarga. Mereka dibebani "kewajiban rumah tangga" layaknya warga desa pada umumnya. Hal ini menyebabkan sejumlah program desa terbengkalai. Implementasi kebijakan pemerintah desa juga kurang maksimal. Baik kepala desa maupun perangkat lainnya cenderung mengesampingkan kewajibannya. Sosiologi pedesaan adalah cabang dari disiplin ilmiah sosiologi yang mempelajari tentang struktur sosial, kondisi, proses dan sistem sosial dari masyarakat pedesaan beserta segala hal yang terkait. Sosiologi pedesaan merupakan bagian dari ilmu sosiologi terapan yang ditujukan bagi masyarakat pedesaan. Pada masa klasik, sosiologi pedesaan diartikan sebagai keadaan sosial dari desa-desa di Eropa yang menggambarkan perbedaannya secara jelas bila dibandingkan dengan keadaan kota. Pada masa

modern, sosiologi pedesaan diartikan sebagai cara masyarakat pedesaan dalam menyesuaikan diri dengan kehidupan kapitalisme yang mempengaruhi pertanian.[3] Perkembangan ilmu sosiologi pedesaan berlangsung pesat di Amerika Serikat melalui karya tulis ilmiah T. Lynn Smith dan Paul E. Zopf pada tahun 1970 serta pada tahun 1972 melalui karya tulis ilmiah Galeski. Sudut pandang tentang sosiologi pedesaan terbagi menjadi sudut pandang klasik dan sudut pandang modern. Topik utama dalam kajian sosiologi pedesaan, yaitu struktur sosial, organisasi sosial, sistem dasar masyarakat dan proses perubahan sosial.

BAB II

DIMENSI-DIMENSI SOSIOLOGI PEMERINTAHAN

A. Dimensi Sumber Daya Manusia

Istilah sumber daya manusia (SDM) memiliki dua pengertian, yaitu pengertian mikro dan makro. Menurut pengertian mikro, sumber daya manusia adalah individu yang diposisikan sebagai aset dalam suatu keadaan, pekerjaan atau institusi yang biasanya disebut dengan buruh, pegawai, karyawan, pekerja, tenaga kerja dan lain sebagainya. Adapun dalam pengertian makro, sumber daya manusia adalah penduduk suatu negara yang memasuki usia kerja, meskipun dalam kenyataannya bisa saja penduduk tersebut belum mendapatkan pekerjaan. Dalam pengertian yang lebih luas, sumber daya manusia didefinisikan sebagai individu yang telah bekerja (pekerja) yang menjadi penggerak (motor) di tempat ia bekerja dan menjadi aset bagi institusi yang menaunginya sehingga individu tersebut dapat dikembangkan kemampuannya melalui pelatihan-pelatihan yang relevan. Sumber daya manusia merupakan salah satu elemen utama yang sangat penting dalam sebuah organisasi atau lembaga karena SDM menjadi kunci bagi tumbuh kembangnya sebuah lembaga. SDM yang merupakan sosok manusia, memegang kendali bagi realisasi perjalanan lembaga sekaligus motor penggerak mencapai tujuan lembaga.

Dewasa ini, seorang karyawan atau buruh tidak saja dipandang sebagai sumber daya saja, melainkan juga sebagai modal atau aset. SDM dianggap sebagai investasi bagi sebuah institusi. Oleh karena itu, kemudian dikenal istilah Human Capital (HC)¹. Sumber daya manusia dapat pula diartikan sebagai usaha kerja keras atas jasa yang terdapat dalam sebuah proses produksi. Dengan kata lain, SDM dipandang sebagai kualitas usaha yang diberikan seseorang dalam suatu waktu tertentu untuk menghasilkan barang atau jasa. Selanjutnya, dalam pengertian lain SDM diartikan sebagai hal yang berkaitan dengan manusia yang mampu bekerja untuk memberikan usaha dan jasa. Kemampuan untuk bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang bersifat ekonomis, yaitu kegiatan yang yang

dilakukan untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada yang mendefinisikan SDM sebagai rancangan sistem formal sebuah organisasi dalam rangka memanfaatkan bakat manusia secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan organisasi. Pandangan tersebut serupa dengan definisi yang mengatakan, bahwa SDM merupakan strategi perencanaan, pelaksanaan dan pemeliharaan dalam rangka mengelola manusia dan bertujuan mencapai kinerja yang optimal.² Agar tujuan organisasi atau lembaga dapat dicapai, maka target kinerja disandingkan pada SDM. Hal ini disebabkan oleh adanya kemampuan yang dimiliki SDM, seperti daya fisik dan daya pikir. Daya fisik, yaitu kecakapan yang diperoleh melalui usaha, belajar atau pelatihan, sedangkan daya pikir adalah kecerdasan “terberi” atau dibawa sejak lahir yang tolak ukurnya adalah Intelegence Quotient (IQ) dan Emotion Quality (EQ).

Berhubung adanya keterkaitan kinerja dengan SDM, maka istilah kinerja perlu didefinisikan. Kinerja merupakan penampakan hasil karya seseorang atau kelompok yang dapat berupa kualitas ataupun kuantitas dalam suatu organisasi. Tiga hal penting yang berkaitan dengan kinerja adalah tujuan, ukuran, dan penilaian. Penentuan tujuan setiap unit organisasi merupakan strategi untuk meningkatkan kinerja. Tujuan akan memberikan arah dan mempengaruhi bagaimana seharusnya perilaku kerja. Agar tujuan dapat dicapai, diperlukan ukuran dalam bentuk penilaian kualitatif atau kuantitatif atas tugas yang telah dilaksanakan. Ada dua dimensi yang dijadikan ukuran kinerja.

Pertama, tingkat kemampuan kerja (kompetensi) dalam melaksanakan pekerjaan, baik yang didapat dari hasil pendidikan, pelatihan maupun pengalaman kerja. Kedua, kemampuan eksekutif dalam memberikan motivasi kerja yang dapat mendorong individu bekerja sesuai tuntutan organisasi, lembaga atau masyarakat. Penilaian kinerja bertujuan pengembangan yang mencakup pemberian pedoman kinerja untuk dijalankan dalam jangka waktu paendek dan panjang. Jika ada umpan balik akan dapat membuka kesadaran akan kelebihan dan kekurangan kinerjanya agar dapat diperbaiki dan kemudian melakukan perbaikan. Penilaian kinerja dibuat, tak lain untuk mengidentifikasi, memecahkan persoalan kinerja, melakukan evaluasi dan mengembangkan kinerja sesuai harapan terbaik dari lembaga atau organisasi. Beberapa hal

penting yang mempengaruhi kinerja adalah kompensasi dan kompetensi. Kompensasi adalah penghargaan yang diberikan lembaga/ organisasi kepada individu atas kinerja yang sudah ditunjukkannya. Kompensasi akan membentuk fluktuasi kinerja yang jika diberikan dengan tepat akan mendapatkan capaian dan target kinerja yang diharapkan. Kompensasi yang diberikan dapat secara langsung, dapat juga secara tidak langsung. Kompensasi langsung dapat berupa gaji, uang transport dan berbagai tunjangan, sedangkan kompensasi tidak langsung dapat berupa asuransi, mutasi, promosi jabatan, tunjangan jabatan dan lain sebagainya. promosi jabatan, asuransi, tunjangan jabatan, dan mutasi. Kompensasi diberikan atas dasar prestasi kerja yang mencakup: upah potongan (piecework), komisi, bonus, bagian laba atau bagi produksi.

Sistem kompensasi merupakan salah satu alat untuk memotivasi para karyawan untuk mewujudkan tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Kompensasi umumnya diberikan sebagai imbalan atas perilaku kerja individual, tetapi dapat pula diberikan kepada kelompok. Sistem kompensasi menghubungkan antara kompensasi dan pembuktian hasil kerja bukan senioritas ataupun jumlah jam kerja. Program kompensasi yang efektif harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: Pertama, sederhana, yaitu memuat aturan-aturan dalam sistem kompensasi harus ringkas, jelas dan mudah difahami. Kedua, spesifik, yaitu memberikan ruang kepada pekerja untuk mengetahui dengan tepat apa yang harus dikerjakan. Ketiga, terjangkau, yaitu setiap pekerja atau pegawai harus mempunyai peluang yang wajar untuk memperoleh kompensasi. Keempat, terukur, yaitu sasaran-sasaran yang akan dicapai lembaga rasional. Hal ini penting karena menjadi dasar untuk membangun rencana-rencana atau program kompensasi. Program kompensasi akan menjadi tidak ada manfaatnya bila hasil/prestasi kerja spesifik tidak dapat dikaitkan dengan rupiah yang dikeluarkan.

Hal penting lain adalah kompetensi. Kompetensi merupakan elemen penting dasar yang berkaitan dengan kinerja individu atau tim. Kompetensi mencakup beberapa hal, yaitu pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan kemampuan (abilities) yang diperuntukkan mengidentifikasi bentuk pekerjaan yang paling sesuai dengan kemampuan dan prestasi yang dimiliki untuk kemudian diparalelkan dengan

apayang diharapkan lembaga atau tempat bekerja. Beberapa tingkat kompetensi yang diharapkan, yaitu: pertama, flexibility, yaitu kemampuan melihat perubahan sebagai sesuatu yang menggembirakan. Kedua, information seeking, motivation, and ability to learn, yaitu kemampuan mencari kesempatan belajar tentang hal-hal teknis dan interpersonal. Ketiga, achievement motivation, yaitu kemampuan untuk memandang inovasi sebagai upaya peningkatan kualitas dan produktivitas. Keempat, work motivation under time pressure, yaitu kemampuan mengendalikan diri, seperti menahan stres dalam lembaga atau organisasi dan komitmen dalam menyelesaikan pekerjaan. Kelima, collaborativeness, yaitu kemampuan bekerjasama atau membina hubungan secara kooperatif di dalam kelompok. Keenam, customer service orientation, yaitu kemampuan melayani konsumen, mengambil inisiatif dan mengatasi masalah yang dihadapi pengguna atau lembaga. Hal penting lain yang harus ada dalam membentuk sebuah kinerja adalah komitmen. Komitmen didefinisikan sebagai kekuatan yang berasal dari dalam individu untuk mengidentifikasi dan melibatkan diri masuk ke dalam organisasi atau lembaga tempat bekerja. Terdapat empat faktor utama yang mempengaruhi pembentukan komitmen.

Pertama, visibilitas, yaitu perilaku yang dapat diamati atau dicermati secara langsung oleh orang lain. Cara sederhana untuk membuat individu mempunyai komitmen pada organisasi adalah dengan melihat dukungannya kepada organisasi beserta tujuantujuannya. Visibilitas harus dikombinasikan dengan ketegasan. Kedua, ketegasan, berarti individu tidak dapat menyangkal perilaku yang terjadi. Ketegasan perilaku tergantung pada dua faktor, ialah dapat diamati dan jelas atau tidak samar-samar. Kalau perilaku yang tidak dapat diamati kecuali dengan cara merujuk maka hal ini kurang jelas. Ketiga, keteguhan perilaku, yakni perilaku adalah permanen, tidak dapat ditarik kembali atau dibatalkan. Keempat, kemauan pribadi yang mengikat karyawan pada tindakannya, yakni tanggung jawab pribadi. Tingkat kemauan dari tindakan berhubungan dengan pilihan, adanya tuntutan eksternal untuk bertindak, adanya dasar 13 ekstrinsik untuk bertindak dan adanya kontributor lainnya untuk bertindak . Selain hal-hal tersebut di atas, kepemimpinan merupakan hal dasar dapat membentuk kinerja, baik untuk dirinya sendiri

maupun untuk orang. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk memberikan semangat kepada orang dan membujuk anggota organisasi agar bergerak menuju arah yang diinginkan. Sebagian pemimpin ada yang efektif dan banyak juga yang tidak. Efektif atau tidak efektif seorang pemimpin ditentukan oleh dua faktor. Pertama, karakteristik kepemimpinan seperti yang dijelaskan dalam teori sifat kepemimpinan (trait theory). Kedua, karakteristik pribadi, seperti: kemampuan mental yang superior, kematangan emosi, dorongan emosi, ketrampilan pemecahan masalah, ketrampilan manajerial, dan ketrampilan kepemimpinan. Esensi kepemimpinan ini pada dasarnya adalah untuk membantu orang lain agar menampilkan segala potensi terbaiknya untuk kepentingan organisasi. Namun karakteristik pengikut atau bawahan berbeda satu sama lain, dan karena itu dalam kepemimpinan mencakup berbagai gaya yang dapat diterapkan.

B. Dimensi Penduduk

Malthus adalah orang pertama yang mengemukakan tentang penduduk. Dalam "Essay on Population", Malthus beranggapan bahwa bahan makanan penting untuk kelangsungan hidup, nafsu manusia tak dapat ditahan dan pertumbuhan penduduk jauh lebih cepat dari bahan makanan. Teori Malthus menyebutkan bahwa pertumbuhan penduduk mengikuti deret ukur sedangkan ketersediaan pangan mengikuti deret hitung, pada kasus ini dimana terdapat permasalahan meledaknya jumlah penduduk dikota yang tidak diimbangi dengan ketersediaan pangan pun berkurang, hal ini merupakan perimbangan yang kurang menguntungkan jika kita kembali kepada teori Malthus. Teori Malthus jelas menekankan tentang pentingnya keseimbangan pertumbuhan jumlah penduduk menurut deret ukur terhadap persediaan bahan makanan menurut deret hitung. Teori Malthus tersebut sebetulnya sudah mempersoalkan daya dukung lingkungan dan daya tampung lingkungan. Tanah sebagai suatu komponen lingkungan alam tidak mampu menyediakan hasil pertanian untuk mencukupi kebutuhan jumlah penduduk yang terus bertambah dan makin banyak. Daya dukung tanah sebagai komponen lingkungan menurun, karena beban manusia yang makin banyak. Jumlah penduduk harus seimbang dengan batas ambang lingkungan, agar tidak menjadi beban lingkungan atau

mengganggu daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan menampakkan bencana alam berupa banjir, kekeringan, gagal panen, kelaparan, wabah penyakit dan kematian. Menurut pendapatnya, faktor pencegah dari ketidakseimbangan penduduk dan manusia antara lain Preventive checks (penundaan perkawinan, mengendalikan hawa nafsu dan pantangan kawin), Possitive checks (bencana alam, wabah penyakit, kejahatan dan peperangan). Robert Malthus ini mengemukakan beberapa pendapat tentang kependudukan, yaitu : a. Penduduk (seperti juga tumbuhan dan binatang) apabila tidak ada pembatasan akan berkembang biak dengan sangat cepat dan memenuhi dengan cepat beberapa bagian dari permukaan bumi. b. Manusia untuk hidup memerlukan bahan makanan, sedangkan laju pertumbuhan makanan jauh lebih lambat (deret hitung) dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk (deret ukur). Meskipun demikian teori mendapat berbagai kritik karena Malthus tidak memperhitungkan hal-hal sebagai berikut : a. kemajuan bidang transportasi yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah lain sehingga distribusi makana dapat berjalan b. kemajuan bidang teknologi, terutama bidang pertanian c. Usaha pembatasan kelahiran bagi pasangan yang sudah menikah d. fertilitas akan menurun apabila perbaikan ekonomi dan standar hidup penduduk dinaikkan. Aliran ini tidak sependapat dengan Malthus (bila tidak dibatasi penduduk akan kekurangan makanan). Menurut Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis) Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Negara-Negara yang mendukung teori Malthus umumnya adalah negara berekonomi kapitalis seperti USA, Inggris, Prancis, Australia, Canada, dll Sedangkan negara-negara yang mendukung teori Marxist umumnya adalah negara-negara berekonmi Sosialis seperti Eropa Timur, RRC, Korea, Rusia dan Vietnam. Dasar Pegangan Marxist adalah beranjak dari pengalaman bahwa manusia sepanjang sejarah akan dapat menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman. Beda pandangan Marxist dan Maltus adalah pada "Natural Resource" tidak bisa dikembangkan atau mengimbangi kecepatan pertumbuhan penduduk. Menurut

Marxist tekanan penduduk di suatu negara bukanlah tekanan penduduk terhadap bahan makanan, tetapi tekanan terhadap kesempatan kerja (misalnya di negara kapitalis). Marxist juga berpendapat bahwa semakin banyak jumlah manusia semakin tinggi produk yang dihasilkan, jadi dengan demikian tidak perlu diadakan pembatasan penduduk. Berikut beberapa pendapat aliran Marxis : a. Populasi manusia tidak menekan makanan, tapi mempengaruhi kesempatan kerja.

C. Dimensi Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang karena tuntutan kebutuhan dan pengaruh keyakinan, pikiran, serta ambisi tertentu dipersatukan dalam kehidupan kolektif. Sistem dan hukum yang terdapat dalam suatu masyarakat mencerminkan perilaku-perilaku individu karena individu-individu tersebut terikat dengan hukum dan sistem tersebut. Menurut antropolog Elman Service, untuk memudahkan mempelajari keanekaragaman masyarakat, masyarakat dapat dibagi menjadi empat kategori berdasarkan peningkatan ukuran populasi, sentralisasi politik, serta stratifikasi sosial, yaitu: kawanan, suku, kedatuan, dan negara. Jenis masyarakat paling kecil atau kawanan biasanya hanya terdiri atas beberapa kelompok, banyak diantaranya merupakan kumpulan dari satu atau beberapa keluarga besar. Masyarakat merupakan sebuah sistem yang saling berhubungan antara satu manusia dengan manusia lainnya yang membentuk suatu kesatuan. Manusia sebagai makhluk sosial membutuhkan manusia lainnya untuk memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak dapat hidup sendiri dalam sebuah masyarakat. Kriteria interaksi antarmanusia dijabarkan sebagai berikut:

1. Harus ada pelaku yang jumlahnya lebih dari satu.
2. Ada komunikasi antarpelaku dengan menggunakan simbol-simbol.
3. Ada dimensi waktu (lampau, kini, mendatang) yang menentukan sifat aksi yang sedang berlangsung.

4. Ada tujuan-tujuan tertentu, terlepas dari sama atau tidaknya tujuan tersebut dengan yang diperkirakan pengamat.

Masyarakat terjelma bukan karena keberadaannya di satu saat dalam perjalanan waktu, tetapi mereka ada dalam waktu, mereka adalah jelmaan waktu. Masyarakat selalu ada dari masa lalu ke masa mendatang. Kehadirannya justru melalui fase antara apa yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Dalam masyarakat kini terkandung pengaruh, bekas, dan jiplakan masa disertai dengan bibit dan potensi untuk masa depan. Hakikat masyarakat sesuai dengan skenario penciptaan manusia sebagai khalifah di muka bumi, yakni tegaknya keadilan Ilahi yang berlaku untuk alam dan manusia. Masyarakat merupakan manusia yang senantiasa berhubungan (berinteraksi) dengan manusia lain dalam suatu kelompok. Kehidupan masyarakat yang selalu berubah (dinamis) merupakan sesuatu yang tidak dapat dihindari.

Masyarakat warga atau *political society* dibentuk dengan tujuan yang spesifik: menjamin hak milik pribadi dan melakukan penertiban sosial dengan menjatuhkan sanksi bagi para pelanggar peraturan. Masyarakat adalah sekumpulan manusia yang saling "bergaul", atau dengan istilah ilmiah, saling "berinteraksi". Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana agar warganya dapat saling berinteraksi. Negara modern misalnya, merupakan kesatuan manusia dengan berbagai macam prasarana, yang memungkinkan para warganya untuk berinteraksi secara intensif, dan dengan frekuensi yang tinggi. Suatu negara modern mempunyai suatu jaringan komunikasi berupa jaringan jalan raya, jaringan jalan kereta api, jaringan perhubungan udara, jaringan telekomunikasi, sistem radio dan televisi, berbagai macam surat kabar di tingkat nasional, suatu sistem upacara pada hari-hari raya nasional dan sebagainya. Negara dengan wilayah geografis yang lebih kecil berpotensi untuk berinteraksi secara intensif daripada negara dengan wilayah geografis yang sangat luas. Tambahan pula bila negara tersebut berupa kepulauan, seperti halnya negara kita.

Adanya prasarana untuk berinteraksi menyebabkan warga dari suatu kelompok manusia itu saling berinteraksi. Sebaliknya, bila hanya adanya suatu potensi untuk berinteraksi saja belum berarti bahwa warga dari suatu kesatuan manusia itu benar-benar akan berinteraksi. Suatu suku bangsa, misalnya

saja suku bangsa Bali, mempunyai potensi untuk berinteraksi, yaitu bahasa Bali. Namun, adanya potensi itu saja tidak akan menyebabkan bahwa semua orang Bali tanpa alasan mengembangkan aktivitas yang menyebabkan suatu interaksi secara intensif di antara semua orang Bali tadi.

Hendaknya diperhatikan bahwa tidak semua kesatuan manusia yang bergaul atau berinteraksi itu merupakan masyarakat, karena suatu masyarakat harus mempunyai suatu ikatan lain yang khusus. Sekumpulan orang yang mengerumuni seorang tukang penjual jamu di pinggir jalan tidak dapat disebut sebagai suatu masyarakat. Meskipun kadang-kadang mereka juga berinteraksi secara terbatas, mereka tidak mempunyai suatu ikatan lain kecuali ikatan berupa perhatian terhadap penjual jamu tadi. Demikian juga sekumpulan manusia yang menonton suatu pertandingan sepak bola, dan sebenarnya semua kumpulan manusia penonton apapun juga, tidak disebut masyarakat. Sebaliknya, untuk sekumpulan manusia itu kita pakai istilah *kerumunan*. Dalam bahasa Inggris telah dipakai istilah *crowd*.

Ikatan yang membuat suatu kesatuan manusia menjadi suatu *masyarakat* adalah pola tingkah laku yang khas mengenai semua faktor kehidupannya dalam batas kesatuan itu. Lagipula, pola itu harus bersifat mantap dan kontinu, dengan perkataan lain, pola khas itu harus sudah menjadi adat istiadat yang khas. Dengan demikian, suatu asrama pelajar, suatu akademi kedinasan, atau suatu sekolah, tidak dapat kita sebut masyarakat, karena meskipun kesatuan manusia yang terdiri dari murid, guru, pegawai administrasi, serta para karyawan lain itu terikat dan diatur tingkah lakunya oleh berbagai norma dan aturan sekolah dan lain-lain, tetapi sistem normanya hanya meliputi beberapa sektor kehidupan yang terbatas saja. Sedangkan sebagai kesatuan manusia, suatu asrama atau sekolah itu hanya bersifat sementara, artinya tidak ada kontinuitasnya. Selain ikatan adat istiadat khas yang meliputi sektor kehidupan dan kontinuitas waktu, warga suatu masyarakat harus juga mempunyai ciri lain, yaitu suatu rasa identitas bahwa mereka memang merupakan suatu kesatuan khusus yang berbeda dari kesatuan-kesatuan manusia lainnya. Ciri ini memang dimiliki oleh penghuni suatu asrama atau anggota suatu sekolah. Akan tetapi, tidak adanya sistem norma yang menyeluruh dan tidak adanya kontinuitas, menyebabkan

penghuni suatu asrama atau murid suatu sekolah tidak bisa disebut masyarakat. Sebaliknya suatu negara, suatu kota, atau desa, misalnya, merupakan suatu kesatuan manusia yang memiliki keempat ciri terurai di atas, yaitu (1) interaksi antar warga-warganya, (2) adat istiadat, norma, hukum dan aturan-aturan khas yang mengatur seluruh pola tingkah laku warga negara kota atau desa; (3) kontinuitass waktu; (4) dan rasa identitas kuat yang mengikat semua warga. Itulah sebabnya suatu negara atau desa dapat kita sebut masyarakat dan kita memang sering berbicara tentang masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Medan, masyarakat Sala, masyarakat Balige, masyarakat Ciamis, atau masyarakat desa Trunyan. Setelah uraian tadi, sekarang tiba waktunya untuk merumuskan suatu definisi mengenai konsep masyarakat untuk keperluan analisis antropologi. Dengan memperhatikan ketiga ciri terurai sebelumnya, definisi mengenai masyarakat secara khusus dapat kita rumuskan sebagai berikut: *Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama.*

Definisi itu mempunyai suatu definisi yang diajukan oleh J.L. Gillin dan J.P. Gillin dalam buku mereka *Cultur Sociology* (1954: hlm.139), yang merumuskan bahwa masyarakat tau *society* adalah “..... *the largest grouping in which common customs, traditions, attitudes and feelings of unity are operative*”. Unsur *grouping* dalam definisi kita, unsur *common customs* dan *traditions* adalah unsur “adat istiadat” dan “kontinuitas” dalam definisi kita, serta unsur *common attitudes and feelings of unity* sama dengan unsur “identitas bersama”. Suatu tambahan dalam definisi Gillin adalah unsur (*the largest*) “*terbesar*” yang memang tidak dimuat dalam definisi kita. Walaupun demikian, konsep itu dapat diterapkan pada konsep masyarakat suatu bangsa atau negara, miisalnya konsep masyarakat Indonesia, masyarakat Filipina, masyarakat Belanda, masyarakat Amerika, dalam contoh kita sebelumnya.

Meskipun kita sering berbicara tentang konsep masyarakat dalam arti luas, seperti konsep masyarakat negara Indonesia, tetapi kenyataannya, dalam pikiran kita tidak terbayang seluruh manusia yang berjumlah +- 230 juta jiwa Indonesia itu. Biasanya yang terbayang dalam pikiran kita ialah

lingkaran manusia Indonesia sekitar diri kita sendiri, manusia Indonesia di suatu lokasi tertentu, atau dalam ikatan suatu kelompok tertentu. Dalam bukunya, *Azas-azas Sosiologi* guru besar ilmu sosiologi Universitas Gadjah Mada, M.M. Djodjodigono, membedakan antara konsep “masyarakat dalam arti yang luas dan sempit”.

Berdasarkan konsep Djodjodigono ini dapat dikatakan masyarakat Indonesia sebagai contoh suatu “masyarakat dalam arti luas”. Sebaliknya, masyarakat yang terdiri dari warga suatu kelompok kekerabatan seperti *dadia*, *marga*, dan *suku*, kita anggap sebagai contoh dari suatu “masyarakat dalam arti sempit”.

Kesatuan wilayah, keatuan adat-istiadat, rasa identitas komunitas dan rasa royalitas terhadap komunitas sendiri, merupakan ciri-ciri suatu komunitas, dan pangkal dari perasaan seperti patriotism, nasionalisme dan sebagainya, yang biasanya bersangkutan dengan negara. Memang, suatu negara merupakan wujud dari suatu komunitas yang paling besar. Selain negara, keatuan-kesatuan seperti kota, desa, suatu RW atau RT, juga sesuai dengan definisi kita mengenai komunitas, yaitu: *suatu kesatuan hidup manusia yang menempati suatu wilayah yang nyata, dan berinteraksi menurut suatu sistem adat-istiadat, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas komunitas.*

Uraian sebelumnya, kesatuan hidup manusia di suatu negara, desa atau kota, juga kita sebut “masyarakat”. Apakah dengan demikian konsep masyarakat sama dengan konsep komunitas? Kedua istilah itu memang bertumpang-tindih, tetapi istilah masyarakat adalah istilah umum bagi suatu keatuan hidup manusia, dan karena itulah bersifat luas daripada istilah komunitas. Masyarakat adalah semua kesatuan hidup manusia yang bersifat mantap dan terikat oleh satuan adat-istiadat dan rasa identitas bersama, tetapi komunitas bersifat khusus karena ciri tambahan ikatan lokasi dan kesadaran wilayah tadi. Masyarakat sebagai suatu kelompok manusia yang sangat umum sifatnya, mengandung kesatuan-kesatuan yang sifatnya lebih khusus, tetapi belum tentu mempunyai syarat pengikat yang sama dengan suatu masyarakat. Kesatuan sosial yang tidak mempunyai syarat pengikat itu serupa dengan “kerumunan” atau *crowd* yang telah kita pelajari pada sebelumnya, tidak mempunyai sifat-sifat masyarakat. Kesatuan sosial itu adalah kategori sosial.

Kategori sosial adalah kesatuan manusia yang terwujud karena adanya suatu ciri atau suatu kompleks ciri-ciri objektif yang dapat dikenakan kepada manusia-manusia itu. Ciri-ciri objektif itu biasanya dikenakan oleh pihak dari luar kategori sosial itu sendiri tanpa disadari oleh yang bersangkutan, dengan suatu maksud praktis tertentu. Misalnya, dalam masyarakat suatu negara ditentukan melalui hukumnya bahwa ada kategori warga di atas umur 18 tahun, dan kategori warga di bawah 18 tahun, dengan maksud untuk membedakan antara warga negara yang mempunyai hak pilih dan warga negara yang tidak mempunyai hak pilih dalam pemilihan umum. Contoh lain adalah bahwa dalam masyarakat itu juga ada suatu kategori orang yang memiliki mobil, dan suatu kategori orang yang tidak memilikinya, dengan maksud untuk menentukan warga negara yang harus membayar sumbangan wajib dan yang bebas dari sumbangan wajib. Serupa dengan itu, dalam suatu masyarakat dapat diadakan bermacam-macam penggolongan berdasarkan ciri-ciri objektif untuk berbagai maksud, seperti kategori pegawai negeri untuk menghitung hadiah lebaran, kategori anak di bawah umur 17 tahun untuk larangan menonton film orang dewasa, kategori pejar untuk memperkirakan pendapatan negara dari SPP dan sebagainya. Dengan demikian, tidak hanya pemerintah suatu negara atau pemerintah suatu kota saja yang dapat mengadakan berbagai macam penggolongan seperti itu terhadap warga masyarakat, tetapi seorang peneliti untuk keperluan analisisnya dapat juga misalnya mengadakan berbagai macam penggolongan terhadap penduduk dari masyarakat yang menjadi objek penelitiannya tanpa disadari oleh mereka yang bersangkutan.

Kecuali persamaan ciri objektif tadi yang dikenakan kepada mereka oleh pihak luar, biasanya tidak ada unsur lain yang mengikat suatu kategori sosial. Orang-orang dalam suatu kategori sosial, misalnya semua anak di bawah 17 tahun, biasanya tidak ada suatu orientasi sosial yang mengikat mereka. Mereka juga tidak memiliki potensi yang dapat mengembangkan suatu interaksi di antara mereka sebagai keseluruhan. Mereka juga tidak mempunyai identitas (merupakan hal yang logis karena penggolongan ke dalam suatu kategori sosial itu dilakukan oleh pihak luar terhadap diri mereka, dengan ciri-ciri kriteria yang biasanya tidak mereka sadari). Suatu kategori sosial biasanya juga tidak terikat oleh

kesatuan adat, sistem nilai, atau norma tertentu. Suatu kategori sosial tidak mempunyai lokasi, tidak mempunyai organisasi, tidak mempunyai pimpinan. Masyarakat warga yang pertama adalah keluarga, lalu menjadi komunitas warga, meningkat menjadi masyarakat politik dan berujung pada terbentuknya institusi formal negara. Masyarakat warga ditandai dengan adanya tiga unsur: komunitas politik, pemerintahan dan hukum. Isi dari masyarakat warga adalah ketaatan pada hukum, persetujuan hidup bersama, kesetaraan dan penyelenggaraan pemerintahan. Masyarakat warga seperti roda putar hamster (hamster wheel) di mana individu terlibat dalam sirkuit tak berujung mengejar kekayaan dan penghargaan yang lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Sedangkan masyarakat barbar merujuk pada kehidupan yang selalu disandarkan pada hukum rimba, pada naluri-naluri alami manusia yang saling beradu satu sama lain. Masyarakat terbagi menjadi dua golongan utama, yakni penguasa atau pengeksploitasi dan yang dikuasai atau yang dieksploitasi. Golongan penguasa dilukiskan oleh al-Qur'an sebagai golongan "mustakbirin" (orang-orang yang sombong). Sedangkan golongan yang dikuasai dilukiskan al-Qur'an sebagai golongan :mustadh'afin (yang tertindas).

Kepribadian masyarakat tidak sama dengan kepribadian individu. Kepribadian ini terbentuk melalui penggabungan individu-individu dan aksi-reaksi budaya mereka. Masyarakat mempunyai sifat alami, ciri-ciri dan peraturannya sendiri, tindakan-tindakan serta reaksi-reaksinya dapat diterangkan dengan serangkaian hukum umum dan universal. Masyarakat mempunyai kepribadian independennya sendiri, karena itu hanya dapat mengatakan bahwa sejarah mempunyai suatu falsafah dan dibentuk oleh hukum dan norma.

Masyarakat warga terbentuk secara alamiah yang mendorong manusia untuk membentuk kehidupan sosial dan ikatan persahabatan. Masyarakat warga terbentuk melalui logika negatif, dengan mekanisme *leisure of evil*: hukum dan aturan diciptakan justru untuk membatasi dan memblokir insting-insting gelap manusia. [16] Masyarakat warga dikenal sebagai masyarakat borjuis di mana partikularitas dan individualitas jauh lebih menonjol daripada nilai-nilai

kebersamaan dan solidaritas. Dalam masyarakat warga, setiap orang menjadikan dirinya sebagai tujuan.

Dinamika atau perubahan masyarakat dapat terjadi karena beberapa faktor antara lain:

1. Penyebaran informasi, meliputi pengaruh dan mekanisme media dalam menyampaikan pesan-pesan ataupun gagasan (pemikiran)
2. Modal, antara lain sumber daya manusia ataupun modal finansial
3. Teknologi, suatu unsur dan sekaligus faktor yang cepat berubah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
4. Ideologi atau agama, keyakinan agama atau ideologi tertentu berpengaruh terhadap proses perubahan sosial
5. Birokrasi, terutama berkaitan dengan berbagai kebijakan pemerintahan tertentu dalam membangun kekuasaannya
6. Agen atau aktor, hal ini secara umum termasuk dalam modal sumber daya manusia, tetapi secara spesifik yang dimaksudkan adalah inisiatif-inisiatif individual dalam "mencari" kehidupan yang lebih baik.

D. Dimensi Bangsa dan Negara

Bangsa merupakan sekelompok manusia yang bersatu dalam suatu wilayah dan terikat dengan wilayah tersebut. Bagaimana konsep terbentuknya bangsa? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) bangsa merupakan kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sebuah bangsa mendiami suatu wilayah yang kemudian disebut negara. Pada hakikatnya, bangsa atau nation timbul karena adanya kesamaan, baik dari aspek budaya, bahasa, agama, maupun tradisi. Dikutip dari buku Kewarganegaraan oleh Aim Abdulkarim, bangsa sebagai sebuah kesatuan masyarakat ini memiliki cita-cita yang sama dalam kehidupannya. Para ahli seperti Hans Kohn, Ernest Renan, hingga Otto Bauer mendefinisikan bangsa dalam narasi yang beragam. Hans Kohn menyatakan bahwa bangsa adalah buah hasil karya atau daya hidup manusia. Menurutnya, sebuah bangsa memiliki faktor objektif tertentu yang membuatnya berbeda dengan bangsa lain. Sedangkan dalam pandangan Otto Bauer, bangsa didefinisikan sebagai kelompok manusia yang

memiliki persamaan karakter. Karakter tersebut tercipta atas persamaan senasib sepenanggungan dari masyarakat di dalamnya. Filsuf sekaligus sejarawan asal Prancis, Ernest Renan, mendefinisikan bangsa sebagai sebuah kehendak untuk bersatu dan bernegara. Menurut Ernest Renan, bangsa terjadi karena adanya keinginan untuk hidup bersama dengan perasaan setia kawan yang agung. Ia menyebutnya sebagai "Le désir d'être ensemble".

Ernest Renan menjelaskan, keinginan untuk bersatu dari kelompok masyarakat tersebut didorong oleh adanya persamaan sejarah dan cita-cita untuk meningkatkan rakyat menjadi sebuah bangsa. Mereka terikat oleh Tanah Air yang sama. Frederick Hertz dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics* memaparkan, terdapat empat unsur pembentuk suatu bangsa. Antara lain sebagai berikut:

1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, meliputi kesatuan sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Dalam hal ini, sebuah bangsa ingin terbebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing.
3. Keinginan untuk mencapai kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan dalam menjalani kehidupan.
4. Keinginan untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise di antara bangsa-bangsa lain.

Nah, itulah konsep terbentuknya bangsa menurut Ernest Renan. Selain itu, terbentuknya bangsa juga dipengaruhi oleh adanya persamaan nasib.

1. Frederick Hertz dalam bukunya yang berjudul *Nationality in History and Politics* memaparkan, terdapat empat unsur pembentuk suatu bangsa. Antara lain sebagai berikut:
 1. Keinginan untuk mencapai kesatuan nasional, meliputi kesatuan sosial, politik, ekonomi, agama, kebudayaan, komunikasi, dan solidaritas.
 2. Keinginan untuk mencapai kemerdekaan dan kebebasan nasional. Dalam hal ini, sebuah bangsa ingin terbebas dari dominasi dan campur tangan bangsa asing.
 3. Keinginan untuk mencapai kemandirian, keunggulan, individualitas, dan kebebasan dalam menjalani kehidupan.

4. Keinginan untuk mengejar kehormatan, pengaruh, dan prestise di antara bangsa-bangsa lain.

Nah, itulah konsep terbentuknya bangsa menurut Ernest Renan. Selain itu, terbentuknya bangsa juga dipengaruhi oleh adanya persamaan nasib.

Wawasan kebangsaan lahir ketika bangsa Indonesia berjuang membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, seperti penjajahan oleh Portugis, Belanda, Inggris, dan Jepang. Perjuangan bangsa Indonesia yang waktu itu masih bersifat lokal ternyata tidak membawa hasil, karena belum adanya persatuan dan kesatuan, sedangkan di sisi lain kaum colonial terus menggunakan politik adu domba atau "divide et impera". Kendati demikian, catatan sejarah perlawanan para pahlawan itu telah membuktikan kepada kita tentang semangat perjuangan bangsa Indonesia yang tidak pernah padam dalam usaha mengusir penjajah dari Nusantara. Dalam perkembangan berikutnya, muncul kesadaran bahwa perjuangan yang bersifat nasional, yakni perjuangan yang berlandaskan persatuan dan kesatuan dari seluruh bangsa Indonesia akan mempunyai kekuatan yang nyata. Kesadaran tersebut kemudian mendapatkan bentuk dengan lahirnya pergerakan Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908 yang merupakan tonggak awal sejarah perjuangan bangsa yang bersifat nasional itu, yang kemudian disusul dengan lahirnya gerakan-gerakan kebangsaan di bidang politik, ekonomi/perdagangan, pendidikan, kesenian, pers dan kewanitaan. Tekad perjuangan itu lebih tegas lagi dengan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 dengan ikrar "Satu Nusa, Satu Bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia". Wawasan kebangsaan tersebut kemudian mencapai satu tonggak sejarah, bersatu padu memproklamasikan kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945. Dalam perjalanan sejarah itu telah timbul pula gagasan, sikap, dan tekad yang bersumber dari nilai-nilai budaya bangsa serta disemangati oleh cita-cita moral rakyat yang luhur. Sikap dan tekad itu adalah pengejawantahan dari satu Wawasan Kebangsaan. Istilah Wawasan Kebangsaan terdiri dari dua suku kata yaitu "Wawasan" dan "Kebangsaan". Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) dinyatakan bahwa secara etimologis istilah "wawasan" berarti: (1) hasil mewawas, tinjauan, pandangan dan dapat juga berarti (2)

konsepsi cara pandang. Wawasan Kebangsaan sangat identik dengan Wawasan Nusantara yaitu cara pandang bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan (Suhady dan Sinaga, 2006).

“Kebangsaan” berasal dari kata “bangsa” yang menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2002) berarti kelompok masyarakat yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa, dan sejarahnya, serta berpemerintahan sendiri. Sedangkan “kebangsaan” mengandung arti (1) ciri-ciri yang menandai golongan bangsa, (2) perihal bangsa; mengenai (yang bertalian dengan) bangsa, (3) kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara. Dengan demikian wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara Prof. Muladi, Gubernur (Lemhannas RI 2005-2011), menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesatuan atau integrasi nasional bersifat kultural dan tidak hanya bernuansa struktural mengandung satu kesatuan ideologi, kesatuan politik, kesatuan sosial budaya, kesatuan ekonomi, dan kesatuan pertahanan dan keamanan. Wawasan kebangsaan menentukan cara bangsa mendayagunakan kondisi geografis negara, sejarah, sosio-budaya, ekonomi dan politik serta pertahanan keamanan dalam mencapai cita-cita dan menjamin kepentingan nasional. Wawasan kebangsaan menentukan bangsa menempatkan diri dalam tata berhubungan dengan sesama bangsa dan dalam pergaulan dengan bangsa lain di dunia internasional. Wawasan kebangsaan mengandung komitmen dan semangat persatuan untuk menjamin keberadaan dan peningkatan kualitas kehidupan bangsa dan menghendaki pengetahuan yang memadai tentang tantangan masa kini dan masa mendatang serta berbagai potensi bangsa. Wawasan kebangsaan dapat juga diartikan sebagai sudut pandang/cara memandang yang mengandung kemampuan seseorang atau kelompok orang untuk memahami keberadaan jati diri sebagai suatu bangsa

dalam memandang dirinya dan bertingkah laku sesuai falsafah hidup bangsa dalam lingkungan internal dan lingkungan eksternal (Suhady dan Sinaga, 2006). Dengan demikian dalam kerangka NKRI, wawasan kebangsaan adalah cara kita sebagai bangsa Indonesia di dalam memandang diri dan lingkungannya dalam mencapai tujuan nasional yang mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai kesatuan politik, sosial budaya, ekonomi dan pertahanan keamanan, dengan berpedoman pada falsafah Pancasila dan UUD 1945 atau dengan kata lain bagaimana kita memahami Wawasan Nusantara sebagai satu kesatuan POLEKSOSBUD dan HANKAM.

E. Dimensi Pemerintahan

Menurut Ndraha (2003:5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa publik dan layanan sipil, pemerintah juga merupakan kegiatan lembagalembaga publik dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai tujuan Negara, dan yang menjalankan pemerintah itu disebut pemerintah. Lebih lanjut Ndraha (2003:6) mengartikan pemerintahan adalah orang yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap anggota melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat di perlukan sesuai dengan tuntutan/harapan/keinginan yang di perintah. Sedarmayanti (2004:9) menjelaskan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang dapat menghormati kedaulatan rakyat, yang memiliki tugas pokok yang mencakup: 1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia 2. Memajukan kesejahteraan umum 3. Mencerdaskan kehidupan bangsa. 4. Melaksanakan ketertiban umum, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Fungsi-fungsi pemerintahan dapat dibagi dalam empat bagian yaitu, pelayanan (Public Service), pembangunan (Defelopment), pemberdayaan (Empowering), pengaturan(Regulation). Selanjutnya ia mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihat lah dari pemerintahannya, artinya fungsi-fungsi pemerintahan kualitas pemerintahan itu sendiri menurut Rasyid (dalam Labolo,2007: 22). Pemerintah sesuai dengan karakteristik struktural sebagai pemegang otoritas formal harus mampu bertindak netral dalam

konfleksitas kepentingan fungsi yang di jalankan pemerintahan sebagai pemerdaya masyarakat harus benar-benar di atas civic society yang sedang membangun diri (Moeljarto,2001;77). Menurut Ndraha (2003;7) ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan sipil, dalam hubungan pemerintahan, sehingga dapat diterima oleh orang yang bersangkutan.

Selanjutnya Ndraha menjelaskan bahwa ilmu pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut, pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat di terima oleh orang yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,”jadi normative, idea, das sollen”) dan kedua dari sudut bagaimana kenyataannya (“pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak , jadi empirik, das sein). Ndraha (2003;7) mengemukakan ruang lingkup ilmu pemerintahan yang terdiri dari; 1. Yang di perintahkan 2. Tuntutan yang diperintah (jasa public dan layanan civil) 3. Pemerintah 4. Kewenangan, kewajiban, dan tanggung jawab pemerintah 5. Hubungan pemerintah. 6. Pemerintahan yang bagaimana yang dianggap mampu menggunakan. kewenangan, menunaikan kewajiban, dan memenuhi tanggung jawabnya. 7. Bagaimana membentuk pemerintahan yang demikian itu. 8. Bagaimana pemerintah menggunakan kewenangan, menunaikan kewajiban dan memenuhi tanggung jawabnya. 9.

Bagaimana supaya kinerja pemerintahan sesuai dengan tuntutan yang diperintah dan perubahan zaman dimasa akan datang. Menurut Ndraha (2003;5) pemerintahan adalah sebuah sistem multi proses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang di perintah akan jasa pelayanan publik dan sipil. Menurut R. Mac Iver (dalam Inu Kencana Syafie, 2003:135), pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah. Bahkan ia juga melihat pemerintah sebagai sebuah perusahaan besar dari segala perusahaan manusia yang ada. Sedangkan menurut Samuel E Ward Finer (dalam Inu Kencana Syafie, 2003:135), pemerintah harus mempunyai kegiatan yang terus menerus (proses), wilayah negara tempat kegiatan itu berlangsung (state), pejabat yang memerintah (the duty), dan cara, metode serta sistem (manner,

method, and system) dari pemerintah terhadap masyarakatnya. Tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah untuk menjaga suatu sistem ketertiban di mana masyarakat bisa menjalani kehidupan secara wajar. Pemerintah diadakan tidaklah untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat, menciptakan kondisi yang mungkin setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai kemajuan bersama. Menurut Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:35).

Dengan demikian pemerintah dapat ditinjau dari sejumlah aspek penting seperti kegiatan struktur fungsional, maupun tugas kewenangan. Kegiatan pemerintah berkaitan dengan segala aktivitas yang terorganisasi, bersumber pada kedaulatan dan berlandaskan pada dasar negara, mengenai rakyat dan negara, serta demi tujuan negara. Struktur fungsional menyangkut pemerintahan sebagai seperangkat fungsi negara yang satu sama lain saling berhubungan secara fungsional dan melaksanakan fungsinya atas dasar tertentu demi tujuan negara. Sementara itu, tugas dan kewenangannya berhubungan dengan keseluruhan tugas dan kewenangan negara yang dilakukan oleh pemerintah.

Sedangkan menurut Ndraha (2005:57) pemerintah adalah segenap alat perlengkapan negara atau lembaga-lembaga kenegaraan yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan negara. Semua negara pada hakikatnya memiliki keinginan untuk membentuk pemerintahan yang kuat. Pemerintahan yang kuat tidaklah sekedar diukur dari adanya kekuatan militer yang banyak dan terlatih, tetapi lebih dari itu adalah seberapa besar akseptabilitas masyarakat dalam menyokong penyelenggaraan pemerintah dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terkait dengan upaya pelayanan itu, maka pemerintah menggunakan aparturnya yang disebut birokrasi, baik yang berada di tingkat pusat maupun daerah. Pelayanan pada level daerah merupakan wujud dari pemencaran kekuasaan yang sedemikian besar ke tingkat yang lebih rendah melalui cara desentralisasi. Rasyid (dalam Muhadam Labolo, 2011:32) membagi fungsi pemerintahan menjadi empat bagian, yaitu pelayanan (public service), pembangunan (development), pemberdayaan (empowering), dan pengaturan (regulation). Rasyid mengemukakan bahwa untuk mengetahui suatu masyarakat, maka lihatlah

pemerintahannya. Artinya fungsi-fungsi pemerintahan yang dijalankan pada saat tertentu akan menggambarkan kualitas pemerintah itu sendiri. Jika pemerintah dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Maka pelaksanaan fungsi pengaturan, yang lazim dikenal sebagai fungsi regulasi dengan segala bentuknya, dimaksudkan sebagai usaha untuk menciptakan kondisi yang tepat sehingga menjadi kondusif bagi berlangsungnya berbagai aktivitas, selain terciptanya tatanan sosial yang baik di berbagai kehidupan masyarakat. Pemberdayaan juga akan mendorong kemandirian masyarakat dalam pembangunan akan menciptakan kemakmuran dalam masyarakat. Ndraha menjelaskan bahwa pemerintah memiliki dua fungsi dasar, yaitu fungsi primer atau fungsi pelayanan, dan fungsi sekunder atau fungsi pemberdayaan.

Fungsi primer yaitu fungsi pemerintah sebagai provider jasa-jasa publik yang tidak dapat diprivatisasikan termasuk jasa hankam, layanan sipil, dan layanan birokrasi. Sedangkan fungsi sekunder, yaitu sebagai provider kebutuhan yang diperintah akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri karena masih lemah dan tak berdaya termasuk penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana. Fungsi primer secara terus-menerus berjalan dan berhubungan positif dengan keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin meningkat pula fungsi primer pemerintah. sebaliknya fungsi sekunder berhubungan negatif dengan tingkat keberdayaan yang diperintah. Artinya semakin berdaya masyarakat, maka semakin berkurang fungsi sekunder pemerintah dari pengaturan ke pengendalian. (Menurut Taliziduhu Ndraha, 2005:58).

BAB III

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

A. Konsep dan Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan menurut arti secara bahasa adalah proses, cara, perbuatan membuat berdaya, yaitu kemampuan untuk melakukan sesuatu atau kemampuan bertindak yang berupa akal, ikhtiar atau upaya (Depdiknas, 2003). Masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa identitas bersama (Koentjaraningrat, 2009). Dalam beberapa kajian mengenai pembangunan komunitas, pemberdayaan masyarakat sering dimaknai sebagai upaya untuk memberikan kekuasaan agar suara mereka didengar guna memberikan kontribusi kepada perencanaan dan keputusan yang mempengaruhi komunitasnya (Foy, 1994). Pemberdayaan adalah proses transisi dari keadaan ketidakberdayaan ke keadaan kontrol relatif atas kehidupan seseorang, takdir, dan lingkungan (sadan,1997).

Menurut Mubarak (2010) pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai upaya untuk memulihkan atau meningkatkan kemampuan suatu komunitas untuk mampu berbuat sesuai dengan harkat dan martabat mereka dalam melaksanakan hak-hak dan tanggung jawabnya selaku anggota masyarakat. Pada Pemberdayaan pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiaikan manusia. Dalam pandangan ini pelibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap berikutnya (Soetomo, 2006). Istilah konsep berasal dari bahasa latin *conceptum*, artinya sesuatu yang dipahami. Konsep merupakan abstraksi suatu ide atau gambaran mental, yang

dinyatakan dalam suatu kata atau symbol. Secara konseptual, pemberdayaan atau pemberkuasaan (*empowerment*), berasal dari kata power yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat (kelompok) yang meliputi penguatan *penguatan modal social* (. Apabila kita sudah mem Kepercayaan (*trusts*), Patuh Aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*))iliki modal social yang kuat maka kita akan mudah mengarahkan dan mengatur (direct) masyarakat serta mudah mentransfer knowledge kepada masyarakat. Dengan memiliki modal social yang kuat maka kita akan dapat menguatkan Knowledge, modal (*money*), dan people.

Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah Trasfer kekuasaan melalui penguatan modal social kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan social. Modal social yang kuat akan menjamin suistainable didalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build thr trust*). Oleh karena itu, ide utama pemberdayaan bersentuhan dengan konsep mengenai modal soaial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial (Sipahelut, 2010).

Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*), dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang-barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan keputusan yang mempengaruhi mereka (Suharto 2005). Jimmu, (2008) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan

perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Oleh karena itu, komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

Adedokun, et al., (2010) menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan.

Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya. Jimu (2008) menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri. Oleh karena itu, agen pembangunan pedesaan harus belajar untuk 'menempatkan terakhir terlebih dahulu' (Chambers, 1983 dalam Jimu, 2008). Secara teori, peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Passmore 1972 dalam Jimu, 2008). Dalam prakteknya, top-down perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada bottom-up

atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut 'pembangunan melalui negosiasi'. Hal ini sesuai Menurut Talcot Parsons (dalam Prijono, 1996:64-65) power merupakan sirkulasi dalam subsistem suatu masyarakat, sedangkan power dalam empowerment adalah daya sehingga empowerment dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah (Bottom-Up). Shucksmith, (2013) menyatakan pendekatan bottom-up untuk pembangunan pedesaan ('didorong dari dalam', atau kadang-kadang disebut endogen) berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya spesifik daerah – alam, manusia dan budaya – memegang kunci untuk perkembangannya.

Sedangkan pembangunan pedesaan top-down melihat tantangan utamanya sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan melalui promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur fisik, bawah ke atas Pengembangan melihat tantangan utama sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model bottom-up terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset. Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi praktek pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu – yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll – untuk mengubah di wilayah mereka. Pemberdayaan ini memiliki tujuan dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri,

mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya (Sipahelut, 2010).

Konsep pemberdayaan menurut Friedman (1992) dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumberdaya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui pengamatan langsung. Menurut Chambers, (1995) pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "*people centred, participatory, empowering, and sustainable*". Jika dilihat dari proses operasionalisasinya Jika dilihat dari proses operasionalisasinya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain : pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan (power) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya.

Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder, yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Sumodiningrat, 2002). Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh ketrampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Pearson et al, 1994 dalam Sukmaniar, 2007). Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus terus

berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya (Mubarak, 2010). Menurut Wilson (1996) terdapat 7 tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. *Tahap pertama* yaitu keinginan dari masyarakat sendiri untuk berubah menjadi lebih baik. Pada *tahap kedua*, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau factor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada *tahap ketiga*, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan tambahan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. *Tahap keempat* yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan lebih baik. Pada *tahap kelima* ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada *tahap keenam* telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada *tahap ketujuh* masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan kearah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literature tentang konsep-konsep Pemberdayaan Masyarakat maka konsep pemberdayaan adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/ daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis. Teori pemberdayaan masyarakat memberikan petunjuk apa yang sebaiknya dilakukan di dalam situasi tertentu. Teori dapat dalam bentuk luas atau ringkas mengenai pola pola interaksi dalam masyarakat atau menggambarkan pola yang terjadi dalam situasi tertentu (contoh : masyarakat, organisasi, atau kelompok populasi tertentu). Sebuah teori dalam pemberdayaan masyarakat dapat ditemukan atau diungkapk menggunakan 2 pendekatan.

Pendekatan pertama yaitu Deductive Theory Construction yaitu teori yang sudah ada atau ditemukan diawal kemudian dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat. Pendekatan kedua yaitu Konstruktive theory yaitu teori yang belum ada atau masih di duga dan untuk menyusunnya dilakukan penelitian pemberdayaan pada masyarakat. Teori dalam praktek pemberdayaan masyarakat menggambarkan distribusi kekuasaan dan sumberdaya dalam masyarakat, bagaimana fungsi organisasi dan bagaimana sistem dalam masyarakat mempertahankan diri. Teori di dalam pemberdayaan masyarakat mengandung hubungan sebab dan pengaruh yang harus dapat di uji secara empiris. Hubungan sebab dan akibat/outcome yang terjadi karena kejadian/aksi tertentu akan dapat memunculkan jenis intervensi yang dapat digunakan oleh pekerja sosial/LSM dalam memproduksi outcome. Dalam kerja sosial (social work), kita dapat menggunakan teori untuk menentukan jenis aksi/kegiatan atau intervensi yang dapat digunakan untuk memproduksi outcome/hasil. Pada umumnya beberapa teori digabung untuk memproduksi model outcome.

1. Teori Ketergantungan Kekuasaan (power-dependency)

Power merupakan kunci konsep untuk memahami proses pemberdayaan. Pemikiran modern tentang kekuasaan dimulai dalam tulisan-tulisan dari Nicollo Machiavelli (*The Prince*, awal abad ke-16) dan Thomas Hobbes (*Leviathan* abad, pertengahan-17). Tujuan dari kekuasaan adalah untuk mencegah kelompok dari berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan dan juga untuk memperoleh persetujuan pasif kelompok ini untuk situasi ini. Power merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari interaksi sosial. Kekuasaan adalah fitur yang tidak terpisahkan dari kehidupan sosial. Hal ini selalu menjadi bagian dari hubungan, dan tanda-tanda yang dapat dilihat bahkan pada tingkat interaksi mikro (Sadan, 1997). Lebih lanjut (Abbot, 1996:16-17) menyatakan bahwa pengembangan masyarakat perlu memperhatikan kesetaraan (equality), konflik dan hubungan pengaruh kekuasaan (power relations) atau jika tidak maka tingkat keberhasilannya rendah. Setelah kegagalan teori modernisasi muncul teori ketergantungan, dimana teori ketergantungan pada prinsipnya menggambarkan adanya suatu hubungan antar

negara yang timpang, utamanya antara negara maju (pusat) dan negara pinggiran (tidak maju). Menurut Abbot (1996: 20) dari teori ketergantungan muncul pemahaman akan keseimbangan dan kesetaraan, yang pada akhirnya membentuk sebuah pemberdayaan (empowerment) dalam partisipasi masyarakat dikenal sebagai teori keadilan. Sebagai contoh : Teori “ketergantungan-kekuasaan” (power-dependency) mengatakan kepada kita bahwa pemberi dana (donor) memperoleh kekuasaan dengan memberikan uang dan barang kepada masyarakat yang tidak dapat membalasnya. Hal ini memberikan ide bahwa lembaga/organisasi (non profit organization) /LSM sebaiknya tidak menerima dana dari hanya satu donor jika ingin merdeka/bebas. Pada konteks pemberdayaan maka teori ketergantungan dikaitkan dengan kekuasaan yang biasanya dalam bentuk kepemilikan uang/modal. Untuk mencapai suatu kondisi berdaya/ kuat/mandiri, maka sekelompok masyarakat harus mempunyai keuangan/ modal yang kuat. Selain uang/modal, maka ilmu pengetahuan/ knowledge dan aspek people/sekumpulan orang/ massa yang besar juga harus dimiliki agar kelompok tersebut mempunyai power. Kelompok yang memiliki power maka kelompok itu akan berdaya.

2. Teori Sistem (The Social System)

Talcott Parsons (1991) melahirkan teori fungsional tentang perubahan. Seperti para pendahulunya, Parsons juga menganalogikan perubahan sosial pada masyarakat seperti halnya pertumbuhan pada makhluk hidup. Komponen utama pemikiran Parsons adalah adanya proses diferensiasi. Parsons berasumsi bahwa setiap masyarakat tersusun dari sekumpulan subsistem yang berbeda berdasarkan strukturnya maupun berdasarkan makna fungsionalnya bagi masyarakat yang lebih luas. Ketika masyarakat berubah, umumnya masyarakat tersebut akan tumbuh dengan kemampuan yang lebih baik untuk menanggulangi permasalahan hidupnya. Dapat dikatakan Parsons termasuk dalam golongan yang memandang optimis sebuah proses perubahan. Parsons (1991) menyampaikan empat fungsi yang harus dimiliki oleh sebuah sistem agar mampu bertahan, yaitu :

1. Adaptasi, sebuah sistem harus mampu menanggulangi situasi eksternal yang gawat. Sistem harus dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan.
2. Pencapaian, sebuah sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya.
3. Integrasi, sebuah sistem harus mengatur hubungan antar bagian yang menjadi komponennya. Sistem juga harus dapat mengelola hubungan antara ketiga fungsi penting lainnya.
4. Pemeliharaan pola, sebuah sistem harus melengkapi, memelihara dan memperbaiki motivasi individual maupun pola-pola kultural yang menciptakan dan menopang motivasi.

Apabila dimasukkan dalam aspek pemberdayaan masyarakat, maka teori system social ini mengarah pada salah satu kekuatan yang harus dimiliki kelompok agar kelompok itu berdaya yaitu memiliki sekumpulan orang/massa. Apabila kelompok itu memiliki massa yang besar dan mampu bertahan serta berkembang menjadi lebih besar maka kelompok itu dapat dikatakan berdaya.

3. Teori Ekologi (Kelangsungan Organisasi)

Organisasi merupakan sesuatu yang telah melekat dalam kehidupan kita, karena kita adalah makhluk sosial. Kita hidup di dunia tidaklah sendirian, melainkan sebagai manifestasi makhluk sosial, kita hidup berkelompok, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Struktur organisasi merupakan kerangka antar hubungan satuan-satuan organisasi yang didalamnya terdapat pejabat, tugas serta wewenang yang masing-masing mempunyai peranan tertentu. Struktur organisasi akan tampak lebih tegas apabila dituangkan dalam bentuk bagan organisasi.

Seseorang masuk dalam sebuah organisasi tentu dengan berbagai alasan karena kelompok akan membantu beberapa kebutuhan atau tujuannya seperti perlindungan, cinta dan kasih sayang, pergaulan, kekuasaan, dan pemenuhan sandang pangan. Berbagai tujuan tersebut memperlihatkan bahwa kehidupan saling pengaruh antar orang jauh lebih bermanfaat daripada kehidupan seorang diri. Seseorang pada umumnya mempunyai kebutuhan yang bersifat banyak yang menginginkan

dipenuhinya lebih dari satu macam kebutuhan, sehingga keberadaan kelompok merupakan suatu keharusan. Menurut Lubis dan Husaini (1987) bahwa teori organisasi adalah sekumpulan ilmu pengetahuan yang membicarakan mekanisme kerjasama dua orang atau lebih secara sistematis untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teori organisasi merupakan sebuah teori untuk mempelajari kerjasama pada setiap individu. Hakekat kelompok dalam individu untuk mencapai tujuan beserta cara-cara yang ditempuh dengan menggunakan teori yang dapat menerangkan tingkah laku, terutama motivasi, individu dalam proses kerjasama. Pada teori ekologi, membahas tentang organisasi sebagai wadah untuk sekumpulan masyarakat dengan tujuan yang sama agar tertatur, jelas, dan kuat. Orientasi organisasi mengacu pada sekumpulan orang/massa yang harus dimiliki kelompok untuk dapat memiliki power/daya. Kelompok yang memiliki organisasi dengan kuat dan berkelanjutan maka kelompok ini dikatakan berdaya.

4. Teori Konflik

Konflik akan selalu muncul dan akan selalu dapat ditemukan dalam semua level kehidupan masyarakat. Dalam interaksi, semua pihak bersinggungan dan sering melahirkan konflik. Belajar dari konflik yang kemudian disadari menghasilkan kerugian para pihak akan memunculkan inisiatif meminimalisir kerugian itu. Caranya adalah mengupayakan damai untuk kembali hidup bersama. Dalam konteks demikian, konflik didefinisikan bukan dari aspek para pelaku konflik, tetapi merupakan sesuatu yang givendalam interaksi sosial. Malahan konflik menjadi motor pergaulan yang selalu melahirkan dinamika dalam masyarakat. Dikenal beberapa pendekatan teoritis untuk menjelaskan konflik. Sebagai kenyataan sosial. Diantaranya pendekatan ketimpangan dalam dunia ekonomi yang menjelaskan bahwa munculnya konflik dikarenakan ketidakseimbangan antara permintaan dan ketersediaan yang menciptakan kelangkaan. Sementara disisi lain, individu bersifat individualis, mementingkan diri sendiri untuk mendapatkan surplus yang ada. Adanya kesamaan antara individu membuka peluang terjadinya perebutan pada satu komoditi dan sebaliknya juga membuka kerjasama di antara para pelaku (Chalid, 2005). Pada proses pemberdayaan yang

dilakukan di suatu lingkungan social (masyarakat) akan sangat sering menemui konflik. Konflik yang terjadi berkaitan erat dengan ketidakpercayaan dan adanya perubahan kepada mereka. Perubahan terhadap kebiasaan, adat istiadat dan berbagai norma social yang sudah tertanam sejak lama di dalam masyarakat. Hal ini sesuai pendapat Stewart, 2005 dalam Chalid (2005) Terdapat tiga model penjelasan yang dapat dipakai untuk menganalisis kehadiran konflik dalam kehidupan masyarakat, pertama penjelasan budaya, kedua, penjelasan ekonomi, ketiga penjelasan politik. Perspektif budaya menjelaskan bahwa konflik dalam masyarakat diakibatkan oleh adanya perbedaan budaya dan suku. Dalam sejarah, konflik cenderung seringkali terjadi karena persoalan perbedaan budaya yang melahirkan penilaian stereotip. Masing-masing kelompok budaya melihat sebagai anggota atau bagian dari budaya yang sama dan melakukan pertarungan untuk mendapatkan otonomi budaya. Terdapat perdebatan tentang pendekatan primordial terhadap realitas konflik. Sebagian antropolog ada yang menerima dan sebagian menolak. Argumentasi kalangan yang menolak beralasan bahwa terdapat masalah serius bila hanya menekankan penjelasan konflik dari aspek budaya semata. Pendekatan budayatidak memasukkan faktor-faktor penting dari aspek sosial dan ekonomi. Pandangan teori konflik mengacu pada dua aspek, yang pertama tentang ekonomi/uang yaitu berkaitan dengan modal sebagai sarana untuk kelompok dapat dikatakan berdaya dan mandiri. Aspek kedua menyangkut tentang organisasi, apabila kelompok dapat memajemen konflik dengan baik, maka keutuhan dan kekuatan organisasi/ kelompok orang akan terus kuat dan lestari sehingga mereka akan memiliki daya dari sisi finansial dan sisi keanggotaan massa.

5. Teori Mobilisasi Sumberdaya

Jasper, (2010) menyatakan gerakan sosial terdiri dari individu-individu dan interaksi di antara anggota suatu masyarakat. Pendekatan pilihan rasional (rational choice) menyadari akan hal ini, tetapi versi mereka memperhitungkan individu sebagai yang abstrak untuk menjadi realistis. Pragmatisme, feminisme, dan yang terkait dengan berbagai tradisi yang mendorong lahirnya studi tentang aksi-aksi individu (individual action) dan aksiaksi kolektif (collective

action) sejak tahun 1960-an, yakni penelitian tentang perlawanan (social resistance), gerakan sosial (social movement) dan tindakan kolektif (collective behavior) berkembang di bawah inspirasi dari teori-teori besar tersebut. Dua dari mereka di antaranya dipengaruhi oleh pandangan Marxisme, terutama sosiologi makro versi Amerika yang menekankan teori mobilisasi sumber daya (resource mobilization theory) dan interaksi dengan negara. Rusmanto, (2013) menyimpulkan bahwa untuk mengetahui keinginan seseorang akan sangat terkait dengan tujuan di akhir orang tersebut. Seseorang dari pertanyaan tersebut mengarah kepada sebuah tujuan. Dalam hal ini, maka tujuan adalah pusat pendekatan yang strategis sebagai taktik, meskipun dalam pemahaman umum, telah keliru memahami bahwa strategi merupakan instrumen tujuan yang bersifat sementara mencerminkan budaya dan emosi. Pada konteks pemberdayaan masyarakat maka teori mobilisasi menjadi salah satu dasar yang kuat, karena untuk menjadi seorang atau kelompok masyarakat yang berdaya/ memiliki power selain uang, knowledge maka people juga mempunyai peranan yang penting. Kumpulan orang akan memberikan kekuatan, kekuatan itu akan memberikan power pada orang atau masyarakat itu.

6. Teori Constructivist

Glaserfeld (1987) menyatakan konstruktivisme sebagai “teori pengetahuan dengan akar dalam “filosofi, psikologi dan cybernetics”. Von Glaserfeld mendefinisikan konstruktivisme radikal selalu membentuk konsepsi pengetahuan. Ia melihat pengetahuan sebagai sesuatu hal yang dengan aktif menerima yang apapun melalui pikiran sehat atau melalui komunikasi. Hal itu secara aktif teruama dengan membangun pengetahuan. Kognisi adalah adaptif dan membiarkan sesuatu untuk mengorganisir pengalaman dunia itu, bukan untuk menemukan suatu tujuan kenyataan. Konstruktivisme pada dasarnya adalah suatu pandangan yang didasarkan pada aktivitas siswa dengan untuk menciptakan, menginterpretasikan, dan mereorganisasikan pengetahuan dengan jalan individual (Windschitl, dalam Abbeduto, 2004). Teori Konstruktivisme didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Beda dengan teori behavioristik yang memahami hakikat

belajar sebagai kegiatan yang bersifat mekanistik antara stimulus dan respon, sedangkan teori konstruktivisme lebih memahami belajar sebagai kegiatan manusia membangun atau menciptakan pengetahuan dengan memberi makna pada pengetahuannya sesuai dengan pengalamannya. Teori konstruktivisme juga mempunyai pemahaman tentang belajar yang lebih menekankan pada proses daripada hasil. Hasil belajar sebagai tujuan dinilai penting, tetapi proses yang melibatkan cara dan strategi dalam belajar juga dinilai penting. Pada proses pemberdayaan masyarakat pendekatan teori belajar secara konstruktivisme perlu di tanamkan dan diupayakan agar masyarakat mampu menkonstruksi pemahaman untuk berubah. Pemberdayaan masyarakat hendaknya tetap mempertahankan nilai-nilai yang sudah melekat di masyarakat selama nilai tersebut baik dan benar. Nilai-nilai kebersamaan, keikhlasan, gotong-royong, kejujuran, kerja keras harus di bangun dan di konstruksikan sendiri oleh masyarakat untuk menciptakan perubahan agar lebih berdaya. Keterkaitan dengan konsep pemberdayaan maka aspek ilmu (knowledge) yang ada di dalam masyarakat perlu dibangun dengan kuat dan di konstruksikan di dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan uraian tentang konsep dan teory pemberdayaan maka disimpulkan sebagai berikut :

1. Konsep pemberdayaan adalah sebuah proses berkelanjutan yang mengupayakan transfer kekuasaan yang didasari *penguatan modal social* (Kepercayaan (*trusts*), Patuh Aturan (*role*), dan Jaringan (*networking*)), disambut partisipasi dan komunikasi aktif dengan metode bottom-up yang dilandasi sikap saling percaya dari masyarakat untuk mengubah dan menentukan nasibnya untuk pencapaian suatu tujuan tertentu (kesejahteraan ekonomi).
2. Teori pemberdayaan adalah Sekumpulan konsep, definisi, dan proposisi yang menyajikan pandangan sistematis melalui pengkhususan hubungan antar variabel dengan tujuan menjelaskan dan meramalkan/menduga suatu poses pemberdayaan di dalam masyarakat.

B. Dimensi-dimensi Pemberdayaan Masyarakat

1. Dimensi Kemampuan

Kemampuan berasal dari kata mampu yang berarti kuasa (bisa, sanggup) melakukan sesuatu, sedangkan kemampuan berarti kesanggupan, kecakapan, kekuatan (Tim Penyusun Kamus Besar Bahasa Indonesia, 1989: 552-553). Kemampuan (ability) berarti kapasitas seorang individu untuk melakukan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. (Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge, 2009: 57). Dari pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kemampuan adalah kesanggupan atau kecakapan seorang individu dalam menguasai suatu keahlian dan digunakan untuk mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan. Lebih lanjut, Stephen P. Robbins & Timonthy A. Judge (2009: 57-61) menyatakan bahwa kemampuan keseluruhan seorang individu pada dasarnya terdiri atas dua kelompok faktor, yaitu : a. Kemampuan Intelektual (Intellectual Ability), merupakan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan berbagai aktifitas mental (berfikir, menalar dan memecahkan masalah). b. Kemampuan Fisik (Physical Ability), merupakan kemampuan melakukan tugas-tugas yang menuntut stamina, ketrampilan, kekuatan, dan karakteristik serupa.

2. Kemampuan Kognitif

Kognitif berhubungan dengan atau melibatkan kognisi. Sedangkan kognisi merupakan kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan (termasuk kesadaran, perasaan, dsb) atau usaha mengenali sesuatu melalui pengalaman sendiri. Kemampuan kognitif adalah penampilan-penampilan yang dapat diamati sebagai hasil-hasil kegiatan atau proses memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Menurut Anas Sudijono (2001: 49) ranah kognitif adalah ranah yang mencakup kegiatan mental (otak). R o b e r t M . Gagne dalam W . S . Winkel (1996: 102) juga menyatakan bahwa "ruang gerak pengaturan kegiatan kognitif adalah aktivitas mentalnya sendiri." Lebih lanjut Gagne menjelaskan bahwa "pengaturan kegiatan kognitif mencakup penggunaan konsep dan kaidah yang telah dimiliki, terutama bila sedang menghadapi suatu problem." A.de Block dalam W.S. Winkel (1996: 64) menyatakan bahwa: Ciri khas belajar kognitif terletak dalam belajar memperoleh dan menggunakan bentuk-bentuk representasi yang mewakili obyek-obyek yang dihadapi, entah obyek itu

orang, benda atau kejadian/peristiwa. Obyek-obyek itu direpresentasikan atau dihadirkan dalam diri seseorang melalui tanggapan, gagasan, atau lambang, yang semuanya merupakan sesuatu yang bersifat mental.

Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemampuan kognitif adalah penampilan yang dapat diamati dari aktivitas mental (otak) untuk memperoleh pengetahuan melalui pengalaman sendiri. Pengaturan aktivitas mental dengan menggunakan kaidah dan konsep yang telah dimiliki yang kemudian direpresentasikan melalui tanggapan, gagasan, atau lambang. Benjamin S. Bloom dkk berpendapat bahwa taksonomi tujuan ranah kognitif meliputi enam jenjang proses berpikir yaitu: a. Pengetahuan (knowledge), adalah kemampuan seseorang untuk mengingat-ingat kembali (recall) atau mengenali kembali tentang nama, istilah, ide, gejala, rumus-rumus dan sebagainya, tanpa mengharapkan kemampuan untuk menggunakannya. Pengetahuan atau ingatan ini merupakan proses berpikir yang paling rendah. b. Pemahaman (comprehension) adalah kemampuan seseorang untuk mengerti atau memahami sesuatu setelah sesuatu itu diketahui dan diingat.

Dengan kata lain, memahami adalah mengetahui tentang sesuatu dan dapat melihatnya dari berbagai segi. Seorang peserta didik dikatakan memahami sesuatu apabila ia dapat memberikan penjelasan atau memberi uraian yang lebih rinci tentang hal itu dengan menggunakan kata-katanya sendiri. Pemahaman merupakan jenjang kemampuan berpikir yang setingkat lebih tinggi dari ingatan atau hafalan. c. Penerapan (application) adalah kesanggupan seseorang untuk menerapkan atau menggunakan ide-ide umum, tata cara ataupun metode-metode, prinsip-prinsip, rumus-rumus, teori-teori dan sebagainya, dalam situasi yang baru dan konkret. Aplikasi atau penerapan ini adalah merupakan proses berpikir setingkat lebih tinggi dari pemahaman. d. Analisis (analysis), mencakup kemampuan untuk merinci suatu kesatuan kedalam bagian-bagian sehingga struktur keseluruhan atau organisasinya dapat dipahami dengan baik. e. Sintesis (synthesis) adalah kemampuan seseorang untuk merinci atau menguraikan suatu bahan atau keadaan menurut bagian-bagian yang lebih kecil dan mampu memahami hubungan di antara bagian-bagian atau faktor-faktor yang satu dengan faktor-faktor

yang lainnya. Sintesis merupakan suatu proses yang memadukan bagian-bagian atau unsur- unsur secara logis, sehingga menjelma menjadi suatu pola yang berstruktur atau berbentuk pola baru. Jenjang sintesis kedudukannya lebih tinggi setingkat dari analisis. f. Evaluasi (evaluation) adalah merupakan jenjang berpikir paling tinggi dalam ranah kognitif menurut Bloom. Penilaian atau evaluasi disini merupakan kemampuan seseorang untuk membuat pertimbangan terhadap suatu situasi, nilai, atau ide, misalnya jika seseorang dihadapkan pada beberapa pilihan, maka ia akan mampu memilih satu pilihan yang terbaik, sesuai dengan patokan atau kriteria yang ada. (Anas Sudijono,2001: 49-52).

3. Dimensi Fasilitas

Menurut (Tjiptono F. , 2014) “Fasilitas merupakan sumber daya fisik yang harus ada sebelum sesuatu ditawarkan kepada konsumen”. Fasilitas merupakan sesuatu yang penting dalam usaha jasa oleh karena itu fasilitas yang ada yaitu kondisi fasilitas, desain interior dan eksterior serta kebersihan harus dipertimbangkan terutama yang berkaitan erat dengan apa yang dirasakan konsumen secara langsung. Menurut (Kotler P. , 2016) “Fasilitas adalah segala sesuatu yang bersifat peralatan fisik dan disediakan oleh pihak penjual jasa untuk mendukung kenyamanan konsumen”. Sedangkan menurut (Daradjat, 2014), “Fasilitas adalah segala sesuatu yang dapat mempermudah upaya dan memperlancar kerja dalam rangka mencapai suatu tujuan. Dalam suatu perusahaan untuk mencapai tujuan diperlukan alat pendukung yang digunakan dalam proses atau aktivitas diperusahaan tersebut. Fasilitas yang digunakan oleh setiap perusahaan bermacam-macam bentuk, jenis dan manfaatnya. Semakin besar aktivitas perusahaan maka semakin lengkap pula sarana pendukung dan fasilitas untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Menurut pendapat Dimiyati dan Mudjiono (1999;24) fasilitas belajar merupakan sarana dan prasarana pembelajaran. Prasarana meliputi gedung sekolah, ruang belajar, lapangan olahraga, tempat ibadah, ruang kesenian dan peralatan olahraga. Sarana prasarana meliputi buku pelajaran, buku bacaan, alat dan fasilitas laboratorium sekolah dan berbagai media pembelajaran, yang lain. Sedangkan menurut H.M Daryanto (2006;51) secara etimologi fasilitas terdiri dari sarana dan prasarana belajar, bahwa sarana belajar adalah alat langsung untuk mencapai tujuan pendidikan,

misalnya lokasi atau tempat, bagunan dan lain-lain, sedangkan prasana adalah alat yang tidak langsung untuk mencapai tujuan pendidikan, misalnya, ruang buku, perpustakaan, labolatorium dan sebagainya. Menurut (Nirwana, 2014) beberapa faktor yang mempengaruhi fasilitas dalam suatu jasa, antara lain; 1. Desain fasilitas. 2. Nilai Fungsi 3. Estetika 4. Kondisi mendukung 5. Peralatan penunjang Beberapa pendapat pada dasarnya memiliki pengertian yang sama. Fasilitas yang dimaksud pada penelitian ini adalah fasilitas bongkar muat pada PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Belawan. Menurut (Tjiptono F. , 2014), "Indikator fasilitas ada enam, yaitu: 1) Pertimbangan/perencanaan spasial 2) Perencanaan ruangan 3) Perlengkapan/perabotan 4) Tata cahaya dan warna 5) Unsur pendukung 6) Pengambilan keputusan Indikator yang dimaksud pada penelitian ini adalah indikator fasilitas bongkar muat pada PT. Pelindo 1 (Persero) Cabang Belawan.

4. Dimensi Komunikasi

Teori komunikasi adalah satu pandangan dan strategi yang akan membentuk alat dan rangka kerja untuk sesuatu perkara yang hendak dilaksanakan. Dalam proses komunikasi teori akan membina bentuk dan kaidah komunikasi yang hendak dibuat. Melalui penulisan ini penjelasan tentang beberapa teori komunikasi akan dibuat.¹¹ Terdapat dua aspek utama yang dilihat secara tidak langsung dalam bidang ini sebagai satu bidang pengkajian yang baru. Aspek pertama ialah perkembangan dari beberapa sudut pandang atau kejaidian, seperti teknologi komunikasi, perindustrian, dan politik dunia. Teknologi komunikasi, contohnya radio, televisi, telefon, setelit, rangkaian komputer telah menghasilkan ide untuk mengetahui kesan perkembangan teknologi komunikasi terhadap individu, masyarakat⁹ dan penduduk di sebuah negara. Perkembangan politik dunia, memperlihatkan kesan politik terhadap publik sehingga menimbulkan propaganda dan pendapat umum. Seterusnya, perkembangan perindustrian, seperti perminyakan dan perkapalan menuntut perlunya komunikasi yang berkesan untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas agar mencapai maksud atau tujuan organisasi tersebut. Aspek kedua ialah dari sudut kajian para pelajar yang berminat untuk mengkaji bidang-bidang yang berkaitan dengan komunikasi seperti mereka yang dari bidang psikologi sosial mengkaji penggunaan teknologi

baru terhadap kesan tayangan animasi kepada anak-anak, propaganda dan dinamika kelompok. Penjelasan atas politik dunia, seperti menganalisis propaganda Nazi yang mampu mempengaruhi pendengar sehingga mereka patuh dan bersatu. Selanjutnya, kajian awal menyelidik atas perindustrian yang pada separuh abad ke-20 tertuju pada pemenuhan keinginan sektor pemasaran untuk mengetahui komunikasi dengan lebih dekat setelah pengiklanan menunjukkan kepentingannya. Oleh karena itu, bidang komunikasi mengambil langkah dan maju ke depan setelah berlakunya pengembangan dari sudut teknologi komunikasi, perindustrian, dan politik dunia, serta kajian-kajian yang telah dilakukan. Sehingga bidang komunikasi menjadi bidang pengkajian yang baru dan mulai diminati oleh banyak orang. Namun, bidang yang menjadi asas kepada bidang komunikasi ialah bidang-bidang sains sosial, seperti sosiologi, pendidikan, psikologi sosial, pengurusan, antropologi dan psikologi.

Pengertian mengenai ilmu komunikasi, pada dasarnya mempunyai ciri yang sama dengan pengertian ilmu secara umum, perbedaannya ialah pada objek kajiannya. Ilmu komunikasi berfokus pada peristiwa-peristiwa komunikasi antar manusia.^[2] mengenai hal itu Berger & Chafee (1987) menyatakan bahwa Ilmu komunikasi adalah suatu pengamatan terhadap produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang melalui pengembangan teori-teori yang dapat diuji dan digeneralisasikan dengan tujuan menjelaskan fenomena yang berkaitan dengan produksi, proses, dan pengaruh dari sistem-sistem tanda dan lambang. Istilah komunikasi atau dalam bahasa Inggris *communication* berasal dari kata latin *communicatio*, dan bersumber dari kata *communis* yang berarti sama, sama di sini adalah sama makna.^[3] definisi yang dikumpulkan oleh Dance (1970), akhirnya Stappers berhasil membuat enam kategori dari multi makna definisi komunikasi, sebagaimana dikutip oleh Djajusman (1985, 14-15) sebagai berikut:

Aktivitas dari suatu pihak. Rumusannya antara lain: "Communication is the discriminatory of an organism to a stimulus" (Stevens, 1950) Aktivitas datang dari pihak lain: mempengaruhi. Rumusannya antara lain: "The process by which an individual (the communicator) "transmits" stimuli (usually verbal symbols) to modify the behavior of other individuals"

(Hovland, 1948) Hubungan adalah central.^[3] antara lain: "Communication is essentially relationship set up by the transmission of stimuli and the evocations of response" (Cherrey, 1964) Hasil adalah yang utama: "sharing" atau pemilikan.^[3] antara lain: "It is a process that makes common to or several what was the monopoly of one or some" (Gode, 1959) Transmisi informasi.^[3] antara lain: "Communication is an information transformation process which originates at a mind and ends at a minds" (Toda, 1967) Penggunaan lambang.^[3] Rumusannya antara lain: "To designate interaction by means of signs and symbols" (Cullen, 1939).

Elemen dasar komunikasi menjadikan objek studi tentang teori komunikasi:

- **Source** (Sumber): Shannon menyebut unsur ini sebagai "sumber informasi", yang "menghasilkan pesan atau urutan pesan yang akan dikomunikasikan ke terminal penerima."^[5]
- **Sender** (Pengirim): Shannon menyebut unsur ini sebagai "pemancar/penyebarnya", yang "beroperasi pada pesan dalam beberapa cara untuk menghasilkan sinyal yang cocok untuk meneruskannya melalui saluran tersebut." Oleh Aristoteles, unsur ini disebut "speaker" (orator).
- **Channel**: Bagi Shannon, saluran tersebut adalah "hanya media yang digunakan untuk mengirimkan sinyal dari pemancar ke penerima."
- **Receiver** (Penerima): Untuk Shannon, penerima adalah "melakukan operasi kebalikan dari yang dilakukan oleh pemancar, dengan merekonstruksi pesan dari sinyal."
- **Destination** (Tujuan): Untuk Shannon, tujuan adalah "orang (atau suatu hal) kepada siapa pesan ini ditujukan".
- **Message** (Pesan): dari bahasa Latin *mittere*, "untuk mengirim". Pesannya berupa sebuah konsep, informasi, komunikasi, atau pernyataan yang dikirim dalam bentuk, ditulis, direkam, atau bentuk visual verbal kepada penerima.
- **Feedback** (Tanggapan)
- **Elemen entropik, positif dan negative**

Komunikasi lisan

komunikasi lisan secara langsung adalah komunikasi yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang saling bertatap muka secara langsung dan tidak ada jarak atau peralatan yang membatasi mereka.⁶¹ lisan ini terjadi pada saat dua orang atau lebih saling berbicara/ berdialog, pada saat wawancara, rapat, berpidato. komunikasi lisan yang tidak langsung adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara alat seperti telepon, handphone, VoIP, dan lain sebagainya karena adanya jarak dengan si pembicara dengan lawan bicara.

Komunikasi tulisan

komunikasi tulisan adalah komunikasi yang dilakukan dengan perantara tulisan tanpa adanya pembicaraan secara langsung dengan menggunakan bahasa yang singkat, jelas, dan dapat dimengerti oleh penerima. Komunikasi tulisan dapat berupa surat-menyurat, sms, surat elektronik, dan lain sebagainya. komunikasi tulisan juga dapat melalui naskah-naskah yang menyampaikan informasi untuk masyarakat umum dengan isi naskah yang kompleks dan lengkap seperti surat kabar, majalah, buku-buku. dan foto pun dapat menyampaikan suatu komunikasi secara lisan namun tanpa kata-kata. Begitu pula dengan spanduk, iklan, dan lain sebagainya.

5. Dimensi Kewenangan

Wewenang atau kewenangan dalam istilah sering di samakan dengan istilah Belanda "bevoegdheid" yang berarti wewenang atau berkuasa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.²¹ Kewenangan yang diberikan langsung oleh peraturan perundang-undangan, contohnya Presiden berwenang membuat Undang-Undang, Perppu, Peraturan Pemerintah adalah kewenangan atributif. Dari semua sikap yang mempengaruhi pemerintahan, yang utama ialah sikap mengenai kesetiaan kepada wewenang kekuasaan politik. Wewenang disebut sah secara penuh apabila warga negaranya mendukung rezim itu dan tunduk kepada undang-undang

politik azasi, yaitu undang-undang bahwa apa yang dikatakan oleh penguasa harus ditati sebagai syarat bagi kelangsungan hidup rezimnya. Bila rakyat menolak untuk mendukung suatu rezim tetapi tunduk kepada undang-undangnya, maka rezim itu bersifat paksaan. Bila suatu rezim kehilangan baik dukungan maupun ketaatan dari para warga negaranya, kekuasaannya akan menghadapi perlawanan. Ada beberapa definisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar hukum, yaitu sebagai berikut : a. Menurut Ferrazi kewenangan yaitu sebagai hak untuk menjalankan satu atau lebih fungsi manajemen, yang meliputi pengaturan (regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan pengawasan (supervisi) atau suatu urusan tertentu.²³ b. Ateng Syafrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus dibedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan wewenang (competence, bevoegdheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.²⁴ c. Bagir Manan menyatakan wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi negara wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat. d. Menurut Philipus M. Hadjon, wewenang (bevoegdheid) di deskripsikan sebagai kekuasaan hukum (rechtsmacht). Jadi dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan kekuasaan.²⁵ e. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan. Kewenangan (authority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatu bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang (Competence, bevoegdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja. Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang – wewenang (Rechtsbevoegdheden). Jadi, wewenang adalah kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-undangan untuk melakukan hubungan hukum.

6. Dimensi Kepercayaan (Trust)

Trust dalam kamus terjemahan Echols dan Hasan diartikan kepercayaan atau percaya. Sementara Kamus Webster's Third New Internasional Dictionary menjelaskan Trust is an implication of assured toward another which may rest on blended evidence of experience and more subjective grounds such as knowlewdge, affection, admiration, respect, or reverence (Gave, 1966: 1545). Intisari dari trust yang dikemukakan dalam kamus Webster's Third New Internasional Dictionary adalah implikasi dari sikap yakin terhadap orang/hal lain yang didasarkan pada bukti-bukti campuran/perpaduan berbagai pengalaman dan pada dasarnya lebih subjektif seperti pengetahuan, kasih sayang, kekaguman, rasa hormat, atau penghormatan. Dalam kajian psikologi, Rotter mengatakan trust diartikan sebagai suatu kecenderungan seseorang untuk yakin pada orang lain (dalam Mckinght dkk, 2002: 336).

Sementara Yamagisi(1998) menjelaskan trust adalah keyakinan orang kepada maksud baik orang lain yang tidak merugikan mereka, peduli pada hak mereka, dan melakukan kewajibannya. Moorman, dkk (dalam Zulganef dan Murni, 2008: 176) mengatakan trust sebagai perilaku seseorang untuk bersandar (rely on) kepada reliabilitas dan integritas orang lain dalam memenuhi harapannya dimasa yang akandatang. Menurut Das dan Teng (dalam Ojha & Gupta, 1998: 107) trust sebagai derajat dimana seseorang yang percaya menaruh sikap positif terhadap keinginan baik dan keandalan orang lain yang dipercayanya di dalam situasi yang berubah-ubah dan beresiko.

Sementara itu Mayer (dalam Ojha & Gupta, 1998: 107) merumuskan trust sebagai keinginan suatu pihak untuk menjadi pasrah/menerima tindakan dari pihak lain berdasarkan pengharapan bahwa pihak lain tersebut akan melakukan sesuatu tindakan tertentu yang penting bagi pihak yang memberikan kepercayaan, terhadap kemampuan memonitor atau mengendalikan pihak lain. Dan Doney et.al. (dalam Ojha & Gupta, 1998: 107) memberikan definisi trust sebagai sesuatu yang diharapkan dari kejujuran dan perilaku kooperatif yang berdasarkan saling berbagi norma-norma dan nilai yang sama. Govier (dalam Tschannen-Moran, 2001: 314) berpendapat bahwa orang yang bisa dipercaya adalah orang

yang predictable, berbicara dengan carefully, terutama saat membuat komitmen, menepati janji dan tidak pernah menipu.

Sementara itu, Tschannen-Moran dan Hoy (1999: 189) mengatakan trust adalah kesediaan seseorang atau kelompok untuk menjadi rentan terhadap pihak lain didasarkan pada keyakinan dari tindakan terakhirnya dalam menunjukkan benevolent(niat baik), reliable(dapat dipercaya), competent(kompetensi), honest(kejujuran), dan open(keterbukaan). Timbulnya trust dipengaruhi oleh pengalaman dimasa lalu. Forsyth berpendapat pengalaman positif yang konsisten dimasa lalu dengan satu pihak akan meningkatkan rasa saling percaya sehingga akan menumbuhkan harapan akan hubungan yang baik di masa yang akan datang (dalam Arsono, 2002: 7). Berdasarkan paparan di atas mengenai trust, maka dapat diartikan trust(kepercayaan) adalah suatu kesediaan seseorang untuk mempercayai orang/hal lain karena adanya niat baik, jujur, kompetensi, keterbukaan dan dapat diandalkan sehingga membuat trustee konsekuen dengan resiko yang muncul.

Tschannen-Moran dan Hoy (1998: 189) melalui teori kepercayaannya, beliau membagi lima karakteristik yang merupakan komponen utama yang digunakan untuk menilai dan mengukur trust yaitu : a. NiatBaik(Benevolence) yaitu kepercayaan akan kesejahteraan atau kepemilikan seseorang terhadap perlindungan dan perhatian orang lain atau kelompok yang dipercayainya. Sikap dan keinginan yang baik akan menumbuhkan hubungan kepercayaan ini. b. Keandalan (Reliability) yaitu seseorang bergantung kepada pihak lain untuk mendapatkan kenyamanan. c. Kompetensi (Competence) yaitu adanya keyakinan bahwa seseorang mampu melakukan suatu pekerjaan sesuai yang dikehendaki. d. Jujur (Honesty) yaitu berkaitan dengan perwatakan, integriti dan ketulenan tingkah laku seseorang yang menjadi dasar dari kepercayaan. e. Keterbukaan (Openness) yaitu adanya rasa untuk saling memahami antara satu dengan yang lain. Menurut Zand kepercayaan akan meningkat bila seseorang atau suatu pihak mau bersikap terbuka terhadap pengaruh dari pihak lain (dalam Laksmana, 2002: 7). Sementara itu, menurut Bryk dan Scheider, 2002 (dalam Vodicka, 2006: 29) orang yang memiliki trust ditandai dengan: a. Consistency, yaitu adanya ketetapan dalam memberikan pesan kepada orang lain tanpa membedakan satu

sama lain. Dengan demikian tingkat keyakinan seseorang akan semakin besar karena adanya rasa aman dari ketetapan tersebut yang menghasilkan suatu kepercayaan. b. Compassion, yaitu kepedulian yang tinggi penting dalam hubungan saling percaya. Dengan saling berkasih sayang menyisaratkan bentuk perlindungan sehingga tidak akan muncul perasaan merugikan orang lain. c. Communication, yaitu berfokus pada bagaimana berbagi informasi yang mana informasi tersebut tidak akan dieksploitasi bebas. Dengan kata lain, hal ini mengacu pada keterbukaan sebagai strategi dalam menjaga kerahasiaan yang bersifat pribadi. d. Competency, yaitu adanya tanggung jawab dan konsistensi seseorang dalam suatu pekerjaan dan seberapa baik hasil yang diperoleh. Trust adalah perilaku seseorang untuk bersandar (rely on) kepada reliabilitas dan integritas orang lain dalam memenuhi harapannya dimasa yang akandatang (Moorman, dkk dalam Zulganef dan Murni, 2008: 176). Menurut Falcone & Castelfranci (2004: 4), trust merupakan suatu fenomena yang dinamis yang terjadi secara intrinsik pada suatu keadaan yang alamiah, dimana trust merupakan hal yang menyangkut masalah mental yang didasarkan oleh situasi seseorang dan konteks sosialnya, misalnya ketika seseorang untuk mengambil suatu keputusan, ia akan lebih memilih keputusan berdasarkan pilihan dari orang-orang yang lebih dapat ia percayai dari pada yang kurang ia percayai.

C. Pemberdayaan masyarakat dan Kemandirian

Pengertian mengenai kemandirian ini mempunyai banyak penafsiran berbeda dari para ahli tetapi pada dasarnya hampir semua pendapat tersebut mempunyai persamaan. Dengan demikian dapat dikatakan tidak terdapat perbedaan yang serius karena pada hakekatnya pendapat tersebut adalah mempunyai tujuan yang sama, hanya saja yang menyajikannya dan menginformasikan tema dari arti kemandirian itu agak berbeda. Setiap manusia dilahirkan dalam kondisi yang tidak berdaya, ia akan bergantung pada orangtua dan orang-orang yang berada di lingkungannya hingga waktu tertentu (dalam Fatimah, 2008). Kemandirian berasal dari kata "Autonomy" yaitu sebagai sesuatu yang mandiri, atau kesanggupan untuk berdiri sendiri dengan keberanian dan tanggungjawab atas segala tingkah laku

sebagai manusia dewasa dalam melaksanakan kewajibannya guna memenuhi kebutuhannya sendiri. Kartono (2000). Kemandirian merupakan suatu sikap otonomi bahwa seseorang secara relatif bebas dari pengaruh penilaian, pendapat dan keyakinan orang lain. Reber (dalam Fatimah, 2008). Havighurst (dalam Rini, 2006) menjelaskan kemandirian adalah kebebasan individu untuk dapat menjadi orang yang berdiri sendiri, dapat membuat rencana untuk masa sekarang dan masa yang akan datang serta bebas dari pengaruh orang tua. Parker menambahkan bahwa, individu yang mandiri akan mempunyai kepercayaan terhadap gagasan-gagasannya sendiri dan kemampuan menyelesaikan sesuatu hal sampai tuntas, dan tidak ada keragu-raguan dalam menetapkan tujuan serta tidak dibatasi oleh kekuatan akan kegagalan. Menurut Barnadib (dalam Fatimah, 2008)) kemandirian meliputi 'prilaku mampu berinisiatif, mampu mengatasi hambatan/masalah, mempunyai rasa percaya diri dan dapat melakukan sesuatu sendiri tanpa bantuan orang lain. Pendapat ini diperkuat oleh Kartini dan Dali (2000) yang mengatakann bahwa, kemandirian adalah hasrat untuk mengerjakan segala sesuatu bagi dirinya sendiri. Dan kemandirian merupakan kemampuan tanpa campur tangan pihak lain (Sanjaya,2008) Kemandirian yang diekspresikan dalam perilaku sehari-hari mengandung unsur-unsur emosi, kata hati, moral intelektual, sosial ekonomi dan sikap. Kelima unsur-unsur steresebut saling berkaitan antara satu sama lainnya. Jado dapat dikatakan bahwa kemnadirian akan tercapai jika individu memiliki sikap tergantung, bebas menentukan pilihan sendiri dan mental yang lebih matang. Wujud lain dari kemandirian ini adalah berupa sikap yang tegas dan konsekuen perkataan dan perbuatannya Wiyusni (2002) Dari penjelasan para pakar tentang kemandirian tersebut dapat ditarik pernyataa bahwa, kemandirian mengandung pengertian berikut: 1) suatu keadaan dimana seseorang yang memiliki hasrat bersaing untuk maju demi kebaikan dirinya; 2) mampu mengambil keputusan dan inisiatif untuk mengatasi masalah yang dihadapi; 3) memiliki kepercayaan diri dalam mengerjakan tugas-tugas; 4) bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya. Istilah "kemandirian" berasal dari kata dasar "diri" yang mendapat awalan "ke" dan akhiran "an", kemudian membentuk satu kata keadaan atau kata benda. Karena kemandirian berasal dari kata "diri", maka pembahasan

mengenai kemandirian tidak bisa lepas dari pembahasan tentang perkembangan diri itu sendiri, yang dalam konsep Carl Rogers di sebut dengan istilah self, karena diri itu merupakan inti dari kemandirian. 1 Istilah kemandirian menunjukkan adanya kepercayaan akan sebuah kemampuan diri dalam menyelesaikan masalah tanpa bantuan dari orang lain. Individu yang mandiri sebagai individu yang dapat menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapinya, mampu mengambil keputusan sendiri, mempunyai inisiatif dan kreatif, tanpa mengabaikan lingkungan disekitarnya. Menurut beberapa ahli "kemandirian" menunjukkan pada kemampuan psikososial yang mencakup kebebasan untuk bertindak, tidak tergantung dengan kemampuan orang lain, tidak terpengaruh lingkungan, dan bebas mengatur kebutuhanya sendiri. Menurut Robert Havighurst sebagaimana di kutip Desmita, membedakan kemandirian atas empat bentuk kemandirian, yaitu : a. Kemandirian Emosi Merupakan kemampuan mengontrol emosi sendiri dan tidak tergantung kebutuhan emosi orang lain b. Kemandirian Ekonomi Kemandirian ekonomi yaitu kemampuan mengatur ekonomi sendiri dan tidak tergantungnya kebutuhan ekonomi pada orang lain. c. Kemandirian Intelektual Kemandirian itelektual yaitu kemampuan untuk mengatasi berbagai masalah yang dihadapi d. Kemandirian Sosial Kemandirian sosial merupakan kemampuan untuk mengadakan interaksi dengan orang lain dan tidak bergantung pada aksi orang lain. Pemberdayaan masyarakat sesungguhnya ditujukan untuk membentuk masyarakat yang mandiri tidak saja secara ekonomi tetapi juga menyangkut aspek lainnya seperti politik , pendidikan, sosial atau berbagai hal yang menyangkut kehidupan masyarakat dan lain sebagainya. Dengan pemberdayaan diharapkan masyarakat mampu berlaku mandiri, memiliki posisi yang kuat bagi dirinya ketika situasi tidak berpihak manakala sebuah kebijakan hanya menguntungkan kelompok tertentu. Bukan persoalan yang mudah memang untuk merubah situasi ketidakberdayaan menjadi masyarakat yang memiliki daya karena terdapat berbagai kendala atau faktor-faktor penghambatnya, masyarakat yang sudah lama terpuruk dalam belunggu tanpa daya terbentuk menjadi masyarakat yang apatis, peragu, malas dan tidak memiliki kepercayaan atas sebuah perubahan menuju ke arah yang lebih baik. Tujuan yang ingin dicapai dari

pemberdayaan masyarakat menurut Sulistiyani (2004 : 80) adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak, dan mengendalikan apa yang mereka lakukan tersebut. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu. Dari paparan tersebut dapat kita simpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan. Kemiskinan dapat dilihat dari indikator pemenuhan kebutuhan dasar yang belum mencukupi/layak. Kebutuhan dasar itu, mencakup pangan, pakaian, papan, kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Sedangkan keterbelakangan, misalnya produktivitas yang rendah, sumberdaya manusia yang lemah, kesempatan pengambilan keputusan yang terbatas. Kemudian ketidakberdayaan adalah melemahnya kapital sosial yang ada di masyarakat (gotong royong, kepedulian, musyawarah, dan kswadayaan) yang pada gilirannya dapat mendorong pergeseran perilaku masyarakat yang semakin jauh dari semangat kemandirian, kebersamaan, dan kepedulian untuk mengatasi persoalannya secara bersama. Memahami arti pemberdayaan masyarakat nampaknya masih berkisar terhadap persoalan ekonomi, memang tidak salah karena realitasnya kondisi masyarakat

D. Pemberdayaan Masyarakat dan Pendapatan masyarakat

Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial, konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat "people-centered, participatory, empowering, and sustainable" (Chambers dalam Kartasamita, 1997: 6). Upaya memberdayakan masyarakat, Kartasamita (1997: 13) mengemukakan pemikirannya bahwa dalam kerangka memberdayakan masyarakat, dapat dilihat dari tiga sisi, yakni: 1) Menciptakan iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Di sini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi

yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya, karena kalau demikian akan punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. 2) Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (empowering). Dalam rangka ini diperlukan langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan suasana. Penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. 3) Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang sangat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan dan derajat kesehatan, serta akses ke dalam sumber-sumber kemajuan ekonomi, seperti; modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Masukan berupa pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar, baik fisik seperti; irigasi, jalan, dan listrik, ataupun sosial seperti; sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat dijangkau oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan, di mana terkonsentrasi penduduk yang keberdayaannya cukup minim. Untuk itu perlu ada program khusus bagi masyarakat yang kurang berdaya, karena program-program umum yang berlaku untuk semua, tidak selalu dapat menyentuh lapisan masyarakat ini. Pemberdayaan masyarakat bukan untuk membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian (charity), karena pada dasarnya setiap apa yang dinikmati, harus dihasilkan atas usaha sendiri (yang hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain). Dengan demikian maka tujuan akhirnya adalah memandirikan masyarakat, memampukan, dan membangun kekuatan untuk memajukan diri ke arah kehidupan yang lebih baik secara berkesinambungan. Menurut Ginandjar Kartasmita (1996:249), pemberdayaan ekonomi rakyat adalah "Upaya yang merupakan pengalihan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi rakyat untuk meningkatkan produktivitas rakyat sehingga, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat, dapat ditingkatkan produktivitasnya". Dalam situs yang ditulis oleh Daniel Sukalele

(wordpres.com diakses tgl. 25 Juni 2015) pemberdayaan dimaksudkan bahwa: a. Pemberdayaan adalah upaya yang membangun daya masyarakat dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. b. Pemberdayaan diarahkan guna meningkatkan ekonomi masyarakat secara produktif sehingga mampu menghasilkan nilai tambah yang tinggi dan pendapatan yang lebih besar. Upaya peningkatan kemampuan untuk menghasilkan nilai tambah paling tidak harus ada perbaikan akses terhadap empat hal, yaitu akses terhadap sumber daya, akses terhadap teknologi, akses terhadap pasar dan akses terhadap permintaan.

E. Pemberdayaan Masyarakat dan Kearifan Lokal

Dalam program pengembangan atau pemberdayaan masyarakat terdapat gagasan perubahan dari bawah (bottom up program). Hal ini merupakan konskuensi logis yang harus dilakukan oleh pembuat program pemberdayaan masyarakat berdasarkan asas ekologis dan perspektif kebutuhan mereka sendiri dan bagaimana memenuhinya. Masyarakat di tingkat local setempat paling mengetahui apa yang mereka butuhkan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan program pemberdayaan masyarakat berdasarkan kearifan local budaya masyarakat setempat adalah:

Menghargai pengetahuan lokal

Masyarakat local adalah masyarakat yang memiliki pengetahuan, pengalaman, kebutuhan kearifan, dan keahlian mengenai potensi daerahnya serta kekuatan dan kelebihanya termasuk permasalahan yang ada di daerahnya. Pekerja masyarakat adalah untuk mendengar dan belajar dari masyarakat, bukan untuk mengajari masyarakat tentang masalah dan kebutuhan mereka (Holoand & Blacburn, 1998). Menghargai pengetahuan local adalah salah satu hal terpenting dari setiap pekerjaan pengembangan masyarakat dan hal ini dapat disimpulkan bahwa “masyarakat sekitar lah yang paling tahu” kondisi asli di lingkungan setempat.

Menghargai kebudayaan lokal

Suatu kebudayaan lokal masyarakat juga dapat terkikis oleh pemaksaan nilai-nilai dominan dari luar, dengan demikian menghilangkan nilai dan menganggap rendah pengalaman masyarakat lokal (Kleymeter, 1994). Seorang pekerja masyarakat dapat dengan mudah menjadi bagian hilangnya kebudayaan lokal setempat tanpa disadarinya. Seorang pekerja masyarakat yang akan merancang dan melaksanakan program pemberdayaan masyarakat harus berhati-hati untuk tidak mengasumsikan superioritas kebudayaannya sendiri. Jika seorang pekerja masyarakat merasa tidak mampu mengakui dan bekerja sesuai kebudayaan lokal setempat, upaya-upaya dalam program pemberdayaan tidak akan berhasil.

Menghargai sumber daya lokal

Salah satu prinsip penting dari pemberdayaan masyarakat adalah prinsip keswadayaan. Keswadayaan berarti bahwa masyarakat pada hakikatnya bergantung pada sumber daya yang ada pada mereka sendiri. Artinya, untuk mencapai keswadayaan seorang pekerja masyarakat dan sasaran program pemberdayaan perlu bersinergi untuk mengembangkan dan menggunakan sumber daya lokal setempat secara kreatif. Sumber daya lokal yang ada di masyarakat setempat juga sangat beragam, diantaranya adalah keterampilan masyarakat setempat, manusia, keahlian, sarana dan prasarana serta sumber pendanaan dalam keberlangsungan dan keberhasilan program pemberdayaan kelompok khususnya program pemberdayaan yang berbasiskan ekonomi kreatif

Menghargai keterampilan lokal

Menghargai keterampilan lokal masyarakat setempat juga sama pentingnya dengan menghargai pengetahuan lokal masyarakat setempat karena dengan menghargai keterampilan lokal secara tidak langsung juga memberdayakan masyarakat sekitar. Dengan menghargai keterampilan lokal, kita juga menghargai masyarakat lokal, memberikan kepada masyarakat setempat sebuah kesempatan untuk memberikan kontribusi bermakna dan memperkuat tingkat keswadayaan dan modal social dalam lingkungan masyarakat sekitar. Penting bagi seorang pekerja masyarakat untuk menyadari bahwa banyak anggota masyarakat memiliki keterampilan-keterampilan yang

tidak dikuasainya. Pemberdayaan masyarakat yang berhasil juga bergantung pada pemanfaatan keterampilan-keterampilan tersebut untuk membantu proses pemberdayaan masyarakat

Menghargai proses lokal

Proses-proses yang digunakan dalam pemberdayaan masyarakat terdapat proses-proses masyarakat lokal yang mengerti dan diterima dengan baik oleh masyarakat lokal setempat (McCowan, 1996). Pada kenyataannya, banyak pekerja masyarakat memaksakan pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya mengenai proses-proses pemberdayaan yang akan dilakukan bersama.

Bekerja dalam solidaritas

Pembahasan tentang menghargai pengetahuan, kebudayaan, sumberdaya, keterampilan dan proses-proses lokal, menekankan salah satu prinsip penting pemberdayaan masyarakat (Haung, 2000).

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. Konsep dan Teori Partisipasi

Banyak ahli memberikan pengertian mengenai konsep partisipasi. Bila dilihat dari asal katanya, kata partisipasi berasal dari kata bahasa Inggris “participation” yang berarti pengambilan bagian, pengikutsertaan (John M. Echols & Hasan Shadily, 2000: 419). Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil -hasil pembangunan (I Nyoman Sumaryadi, 2010: 46). Pengertian tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi, (2001: 201-202) dimana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R.Tilaar, (2009: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. Menurut Sundariningrum dalam Sugiyah (2001: 38) mengklasifikasikan partisipasi menjadi 2 (dua) berdasarkan cara keterlibatannya, yaitu : a. Partisipasi Langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu menampilkan kegiatan tertentu dalam proses partisipasi. Partisipasi ini terjadi apabila setiap orang dapat mengajukan pandangan, membahas pokok permasalahan, mengajukan keberatan terhadap keinginan orang lain atau terhadap ucapannya. b. Partisipasi tidak langsung Partisipasi yang terjadi apabila individu mendelegasikan hak partisipasinya. Cohen dan Uphoff yang dikutip oleh Siti Irene Astuti D (2011: 61-63) membedakan partisipasi menjadi empat

jenis, yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan pemanfaatan. Dan Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini terutama berkaitan dengan penentuan alternatif dengan masyarakat berkaitan dengan gagasan atau ide yang menyangkut kepentingan bersama.

Wujud partisipasi dalam pengambilan keputusan ini antara lain seperti ikut menyumbangkan gagasan atau pemikiran, kehadiran dalam rapat, diskusi dan tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan meliputi menggerakkan sumber daya dana, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program. Partisipasi dalam pelaksanaan merupakan kelanjutan dalam rencana yang telah digagas sebelumnya baik yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan maupun tujuan. Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi dalam pengambilan manfaat tidak lepas dari hasil pelaksanaan yang telah dicapai baik yang berkaitan dengan kualitas maupun kuantitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari presentase keberhasilan program. Keempat, partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan pelaksanaan program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Partisipasi dalam evaluasi ini bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi adalah keterlibatan suatu individu atau kelompok dalam pencapaian tujuan dan adanya pembagian kewenangan atau tanggung jawab bersama. Usaha untuk melestarikan sumber daya dan menjamin layanan sosial dan kesejahteraan masyarakat perlu perencanaan dan tindakan kebijakan diperlukan kontribusi partisipasi masyarakatnya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan (González-García et al., 2019). Teori partisipasi telah diungkapkan oleh Midgley, et al, (1986) yang mengemukakan bahwa anteseden historis partisipasi masyarakat termasuk warisan ideologi barat, pengaruh pengembangan masyarakat dan kontribusi pekerjaan sosial dan radikalisme masyarakat. Komunitas dalam pendekatan partisipatif untuk pengembangan adalah sebagai

sosial alami diinginkan dalam nilai-nilai dan manifestasi dalam bentuk sebuah organisasi (Clever, 1999).

Partisipasi mempunyai arti yang sangat luas sehingga artinya dapat berbeda-beda (Kely & Vlaenderen, 1995). Menurut Pelling (1998) partisipasi adalah lebih pada alat sehingga dimaknai partisipasi sebagai keterlibatan masyarakat secara aktif dalam keseluruhan proses kegiatan, sebagai media penumbuhan kohesifitas antar masyarakat, masyarakat dengan pemerintah juga menggalang tumbuhnya rasa memiliki dan tanggung jawab pada program yang dilakukan. Partisipasi sepadan dengan arti peran serta, ikut serta, keterlibatan atau proses bersama saling memahami, merencanakan, menganalisis, dan melakukan tindakan oleh sejumlah anggota masyarakat. Walaupun adanya perbedaan pendapat dalam literatur tentang asal-usul teori partisipasi teori berasal dari ilmu politik dan teori pembangunan (Midgley & Hall, 2004). Pentingnya partisipasi tumbuh dari pengakuan yang dimiliki orang dalam ekonomi rendah di dunia yang menderita akibat perkembangan, sehingga semua orang perlu dilibatkan dalam pengambilan keputusan, implementasi dan manfaat sehingga tidak ada definisi yang disepakati (Midgley & Hall, 2004). Penyebab partisipasi dan pemberdayaan merupakan hasil partisipatif proses pengembangan sehingga partisipasi adalah tentang pengambilan keputusan (Pelling, 1998).

Partisipasi mendukung komitmen organisasi (Lam, Wong, Chan, Leung, & Mei-chun, 2019) dalam (i) produksi yang lebih bersih, (ii) mengurangi konsumsi sumber daya, dan (iii) mengurangi emisi, dan juga menunjukkan respons emosional positif terhadap organisasi untuk perlindungan lingkungan dan membawa manfaat bagi pelanggan melalui upaya lingkungan mereka. Partisipasi dapat diidentifikasi menjadi empat afirmasi yang merangkum pentingnya partisipasi dalam pembangunan (Gow & Vansant, 1983): (i) Orang-orang dianggap penting dalam menyelesaikan masalah, (ii) Masyarakat lokal cenderung menjadi lebih baik dalam konteks lingkungan mereka sendiri, (iii) Orang-orang yang menyediakan tenaga kerja sukarela, waktu, uang dan bahan untuk suatu proyek, (iv) Orang lokal yang melakukan kontrol terhadap kualitas dan manfaat pembangunan sampai terbentuknya sebuah keberlangsungan. Konsep partisipasi masyarakat telah diimplementasikan di seluruh dunia sejak tahun 1970-an dan digunakan secara luas di

bidang pembangunan (mis. Pembangunan pedesaan, pembangunan berkelanjutan, pengembangan masyarakat) dan pemerintah (Kelly, 2001). Partisipasi komunitas dapat diperkuat oleh modal sosial namun hal ini belum ada bukti empirisnya dan ini harus dibuktikan dalam penelitian lebih lanjut (Midgley & Hall, 2004). Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka.

Lukmanul Hakim, (2015:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar. Pembahasan selanjutnya adalah tentang apa yang dimaksud dengan kata partisipasi. Dengan mengutip ungkapan-ungkapan dari Kamus Oxford, mulai membahas partisipasi dalam "tindakan atau fakta mengambil bagian dalam, memiliki atau membentuk bagian dari". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, bermoral atau tidak bermoral. Ini bisa bersifat paksaan atau bebas, dimanipulasi atau spontan. Partisipasi pada awalnya adalah definisi politik murni yang dikembangkan pada 1950-an dan 1960-an. Selama tahun 1970-an, partisipasi mulai dikaitkan dengan tahapan administrasi dengan menambahkan latihan kerja dan proses pelaksanaan sehingga orang atau pertemuan dapat mencari situasi yang tidak dapat didamaikan dan bersaing untuk mendapatkan sedikit sumber daya.

B. Dimensi-dimensi Partisipasi Masyarakat

1. Keterlibatan mental

Keterlibatan mental adalah interaksi sosial dengan orang, kelompok atau organisasi (Moorhead, sue.dkk, 2013). Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D (2009: 31-32), keterlibatan mental adalah pelibatan seseorang atau beberapa

orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas segala keterlibatan. Pengertian lain tentang keterlibatan sosial dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2001: 201-202), di mana keterlibatan sosial dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan Individu, kelompok, atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, keterampilan. Keterlibatan sosial dapat juga berarti bahwa individu, kelompok mengenal masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya. Klien yang mengalami masalah dalam keterlibatan sosial akan memiliki tanda dan gejala yang dapat timbul dalam dirinya.

Perilaku yang sering ditunjukkan oleh klien dalam masalah keterlibatan sosial lebih banyak menarik diri, menjauh dari orang lain, jarang berkomunikasi, tidak ada kontak mata, malas, tidak beraktifitas, menolak hubungan dengan orang lain (Townsend, 2009). Untuk mengatasi hal ini kita perlu menggunakan peningkatan sosialisai bermain peran dalam meningkatkan keterampilan individu. peningkatan sosialisasi yang di dasarkan pada teori bahwa tanda dan gejala fisiologis berhubungan interaksi antara pikiran, perilaku dan emosi (pednealut, 2008). Pelatihan keterampilan sosial terbukti efektif untuk pasien skizofrenia untuk memperbaiki defisit perilaku sosial.

Program pelatihan keterampilan sosial untuk pasien skizofrenia meliputi keterampilan bercakapcakap, keterampilan manajemen konflik, keterampilan keasertifan, keterampilan hidup di dalam komunitas, keterampilan berteman dan berkenan, keterampilan bekerja dan kejujuran, serta keterampilan manajemen pengobatan (Sadock, 2013). Pelatihan keterampilan sosial merupakan salah satu teknik modifikasi perilaku yang mulai banyak digunakan, terutama untuk membantu penderita kesulitan bergaul. Pelatihan keterampilan sosial bertujuan untuk mengajarkan kemampuan berinteraksi dengan orang lain kepada individu-individu yang tidak terampil menjadi terampil berinteraksi dengan orang-orang disekitarnya, baik dalam hubungan formal maupun informal. Salah satu teknik yang

dapat digunakan dalam pelatihan keterampilan sosial yaitu dengan bermain peran yang dilakukan dengan cara mendengarkan petunjuk yang disajikan model atau terapis terlebih dahulu dilanjutkan dengan latihan dari pasien (Ramdhani, 2012). Hadi sepoetro (2013) mengatakan bahwa pelatihan keterampilan sosial berpengaruh terhadap peningkatan keterampilan sosial pada klien isolasi sosial di Desa Paringan Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo ($p=0,028$), sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Wakhid (2013) menunjukkan bahwa latihan keterampilan sosial dapat meningkatkan kemampuan sosialisasi pada klien isolasi sosial dan harga diri rendah ($p=0,000$). Keterlibatan karyawan merupakan hal yang penting untuk pertumbuhan jangka panjang perusahaan dan meningkatkan keuntungan di persaingan industri yang semakin menantang. Persaingan industri yang semakin ketat belakangan ini, mengakibatkan banyak perusahaan perlu menyusun ulang strategi untuk meningkatkan eksistensinya.

Karyawan di dalam suatu perusahaan tidak hanya menjadi bagian dalam melaksanakan fungsi perusahaan, akan tetapi menjadi aset berharga dalam keberhasilan perusahaan tersebut. Keterlibatan karyawan merupakan keadaan psikologis dimana karyawan merasa berkepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang melebihi job requirement yang diminta Mercer, dalam Ramadhan dan Sembiring (2014). Kegagalan perusahaan dapat dilihat dari penurunan keterlibatan karyawan yang dapat terlihat dari rendahnya perilaku karyawan di dalam sebuah perusahaan seperti bermalas-malasan dalam bekerja, sering terlambat saat kerja, tidak mentaati aturan perusahaan serta kurangnya kepedulian terhadap pekerjaan dan rekan kerja. Employee engagement atau keterlibatan karyawan adalah komitmen emosional yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan. Karyawan akan merasa bahwa visi dan misinya sejalan dengan perusahaan.

Dengan demikian karyawan tersebut memiliki komitmen yang kuat dengan visi dan misi perusahaan serta memiliki kepedulian yang tinggi terhadap tugas yang menjadi tanggung jawabnya. Karyawan akan dengan senang hati mengerjakan tugasnya dan tidak menganggapnya sebagai beban. Karyawan yang terlibat secara emosional dalam organisasi perusahaan

membawa banyak keuntungan baik bagi dirinya sendiri maupun bagi perusahaan. Berikut ini beberapa keuntungan (yang diperoleh perusahaan) ketika sumber daya manusianya memiliki keterlibatan emosional yang besar terhadap visi-misi perusahaan. Keterlibatan/engagement meningkatkan produktivitas kerja, di mana produktivitas pada ujungnya turut meningkatkan kepuasan pelanggan. Dan kepuasan pelanggan merupakan pangkal dari meningkatnya penjualan, yang berarti meningkatnya keuntungan. Perkembangan bisnis dewasa ini "memaksa" organisasi untuk mencari cara terbaik dalam memajukan bisnis agar mampu bersaing dengan organisasi lainnya.

Salah satu cara sederhana namun diyakini dapat meningkatkan kemajuan bisnis adalah melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan. Manfaat langsung dari hal tersebut terhadap organisasi ialah pengambilan keputusan relatif lebih baik, logis, dan ideal karena merupakan hasil dari pemikiran bersama sehingga meminimalisir resiko dan dampak negatif yang muncul. Tidak hanya terhadap organisasi secara langsung, manfaat keterlibatan karyawan juga dapat dirasakan oleh masing-masing karyawan, karena ketika mereka merasa mendapat manfaat dari perlakuan perusahaan, hal tersebut dapat menjadi habit dan budaya yang akan meningkatkan komitmen karyawan untuk tetap tinggal di organisasi. Keterlibatan Karyawan atau Employee engagement merupakan keadaan psikologis dimana karyawan merasa berkepentingan dalam keberhasilan perusahaan dan termotivasi untuk meningkatkan kinerja ke tingkat yang melebihi job requirement yang diminta, Ramadhan dan Sembiring (2014). Lebih lanjut employee engagement dianggap sebagai sesuatu yang dapat memberikan perubahan pada individu, tim, dan perusahaan. Keterlibatan karyawan dapat dikatakan sebagai "sumber daya" yang dapat diinvestasikan untuk memacu perkembangan organisasi ataupun perusahaan. Karyawan yang antusias terhadap pekerjaan, tenggelam dalam kegiatan kerja dan gigih saat berhadapan dengan tantangan dan rintangan yang ada merupakan ciri karyawan yang memiliki perasaan untuk terlibat yang tinggi terhadap pekerjaan yang ada (Bakker, 2017).

2. Keterlibatan emosional

Emosi merupakan suatu hal krusial yang penting bagi perusahaan keluarga (Stanley, 2010). The Merriam Webster Dictionary mendefinisikan emosi secara umum sebagai sebuah pernyataan perasaan atau reaksi mental sadar (seperti marah atau takut), yang secara subjektif dialami sebagai perasaan yang kuat, biasanya mengarah pada suatu objek spesifik, dan secara khas ditandai dengan perubahan fisik dan perilaku. Pengaturan secara sadar mengenai emosi dan norma-norma yang berkaitan dengan emosi dalam keluarga lintas generasi dapat dipastikan sebagai faktor keberhasilan yang krusial untuk keberlangsungan jangka panjang perusahaan (Rau, 2013). Di sisi lain, adanya perbedaan persepsi-persepsi dari predesesor dan suksesor mengenai arah masa depan perusahaan ialah area utama konflik (Frey, et al., 2004).

Model suksesi dari Whatley (2011) mengadaptasi kelebihan dan mengatasi kelemahan dari model-model suksesi yang telah ada. Fokus utama pendekatan ini terletak pada proses “dialektik” pada empat area kunci untuk mendapatkan suksesi yang efektif, yaitu: 1. Aturan dasar: nilai, visi, petunjuk, dan komunikasi transfer. 2. Pengembangan: mengidentifikasi celah (gap) dalam keterampilan, pengetahuan, dan pelatihan (dari internal maupun eksternal perusahaan keluarga). 3. Transisi Hand-off: masa pergantian yaitu pada waktu pendahulu meninggalkan jabatan dan diisi penerusnya pada posisi tertentu. 4. Transfer kapital: keputusan struktur kepemilikan, kontrol, termasuk masalah legalitas hukum dan perpajakan. Pada model baru ini, konteks perusahaan keluarga dan transfer kapital diidentifikasi sebagai faktor keterbukaan, sedangkan aturan-aturan dasar, transisi hand-off, konteks keluarga, kinerja, evaluasi, dan umpan balik diidentifikasi sebagai faktor-faktor emosional. Selain itu, elemen perkembangan diidentifikasi baik sebagai faktor keterbukaan maupun faktor emosional.

Pembedaan faktor keterbukaan dan emosional ini penting untuk memastikan keuntungan dari pencapaian maksimal dari akumulasi pengetahuan dalam proses suksesi. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pria dan perempuan pengusaha memiliki sikap-sikap yang berbeda. Perempuan pemilik perusahaan lebih cenderung untuk fokus dan lebih berhati-hati pada perencanaan suksesi (Mass Mutual Financial Group &

Raymond Institute, 2003). Perempuan lebih tidak hirarkis, mencari informasi, dan lebih condong untuk melihat pada pihak luar bagi masukan ketika membuat keputusan suksesi (Center for Women's Business Research, 2004; Buttner, 2001). Bagi perempuan, secara simultan berperan sebagai ibu dan manajer perusahaan ialah sangat normal. Mereka melihat anak-anak tumbuh dan menjadi dewasa, serta disebabkan mereka sering menjadi orang pertama yang dituju selama masa-masa sulit dalam hidup anak, perempuan bersama mereka melalui kesuksesan dan kegagalan, waktu senang dan sedih (Cadieux, et al., 2002). Brush, dan kawan-kawan (2009) menemukan bahwa kontras dengan pria, perempuan melihat operasional bisnis mereka dan bisnis itu sendiri sebagai hubungan jaringan kerja yang kooperatif daripada sekedar sebagai pusat keuntungan.

Sikap ini menjelaskan mengapa mereka lebih terbuka untuk berbagi, lebih menaruh kepercayaan, lebih bersifat mendamaikan, lebih tidak mengarahkan, lebih penuh perhatian, dan kurang kompetitif dalam kesepakatan-kesepakatan bisnis mereka. Dengan gaya manajemen "feminin" yang berbeda dari gaya manajemen pria, maka ada kemungkinan tipe dinamika suksesi yang berbeda dalam bisnis yang dikelola perempuan (Cadieux, et al., 2002).

Tipe dinamika suksesi yang berbeda ini sangat mungkin melibatkan variasi-variasi emosi yang khas pula, di mana rasa aman bagi predesesor dan rasa nyaman bagi suksesor pada proses suksesi sangat mungkin terdukung oleh hubungan yang telah terbangun dengan baik antara dua individu utama tersebut. Manusia memiliki beberapa kecerdasan di dalam dirinya. Kecerdasan intelektual atau IQ selama ini sering dijadikan tolak ukur kesuksesan seseorang khususnya dalam karir. Kecerdasan lain yaitu SQ atau kecerdasan spiritual juga tidak kalah pentingnya. Selain kecerdasan tadi ada hal lain yang tak kalah penting yaitu kecerdasan emosional atau EQ. Penelitian menjelaskan bahwa EQ berkontribusi 2 kali lebih penting dalam mempengaruhi kesuksesan dibandingkan IQ. Mengapa kecerdasan emosional penting? Ini dikarenakan EQ berperan sangat penting dalam proses menghadapi kehidupan sosial yang harus berinteraksi dengan orang lain. Tak adanya EQ, Anda tidak akan bisa menjalankan hidup sebagai individu yang berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Seperti yang disebut sebelumnya bahwa EQ memiliki peranan yang penting.

Hal ini disebabkan karena kecerdasan emosional yang tinggi dan membuat seseorang mampu menguasai 5 soft skill ini:

Self Awareness: Mampu mengenali emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan dan batasan diri. Seseorang yang memiliki kesadaran pada diri sendiri dapat mudah untuk mendengar, menerima, dan menjalankan kritik dari orang lain.

Self Regulation: Mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Seseorang dengan self regulation yang tinggi, akan tahu kapan harus mengeluarkan emosinya.

Motivation: Seseorang yang cerdas secara emosional adalah orang yang dapat memotivasi dirinya sendiri. Motivasi dalam melakukan sesuatu akan datang pada sendirinya.

Empathy: Empati membuat seseorang memahami dan menumbuhkan koneksi dengan orang lain secara emosional. Anda juga akan peduli dan tulus dalam berhubungan dengan siapapun.

Social Skill: Skill bernegosiasi tentu sangat penting dalam dunia pekerjaan. Dengan memiliki social skill tinggi, Anda dapat memiliki kemampuan berkomunikasi dan membangun relasi dengan baik.

Dengan menguasai soft skill di atas, Anda akan memiliki hubungan yang menyenangkan di dunia pekerjaan. Berikut adalah manfaat-manfaat yang dapat Anda dapatkan dengan memiliki EQ yang tinggi:

1) **Komunikasi yang efektif**

Dengan komunikasi yang efektif, Anda dapat mencapai kerja tim yang jauh lebih baik. Kecerdasan emosional yang tinggi dapat membuat seseorang mampu mendengarkan dan memberi respon secara baik dengan rekan kerja.

2) **Mengatasi tekanan pekerjaan dengan baik**

Besarnya tekanan di dunia pekerjaan membuat orang kehilangan emosinya dan dapat merugikan banyak orang. Dengan memiliki kecerdasan emosional yang tinggi memiliki

self awareness yang tinggi akan lebih mudah mengatur tingkat stres yang dialami.

3) Mampu menerima masukan

Kritik tentunya sangat penting agar seseorang menjadi lebih berkembang. Seseorang yang cerdas EQ nya, dapat menerima kritik dengan baik tanpa melakukan pembelaan diri.

3. Sumbangsih atau Kontribusi

Kontribusi adalah pemberian andil sesuatu kegiatan peranan, masukan ide dan lain sebagainya.¹ Menurut Soerjono Soekanto Kontribusi juga biasa dikenal dengan peranan, sedangkan menurut Gross Mason dan Mceachern peran adalah sebagian perangkat harapan-harapan yang dikenal pada individu yang menempati kedudukan sosial tertentu.² Kontribusi berasal dari bahasa inggris contribute, contribution, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan.

Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Menurut Soerjono dan Djoenaesih, kontribusi adalah ikut serta ataupun ataupun memberikan baik itu ide, tenaga dan lain sebagainya dalam kegiatan. Adapun yang dimaksud dengan kontribusi adalah pemberian atau ikut andil dalam suatu kegiatan baik berupa informasi, ide-ide, tenaga, demi untuk mencapai sesuatu yang direncanakan.³ Dari penjelasan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa istilah kontribusi itu adalah peranan, masukan, ide juga perilaku yang dilakukan individu.

Dengan demikian peranan berarti bagian dari pelaksanaan fungsi dan tugas yang dilaksanakan dalam suatu kegiatan atau kepentingan guna mencapai suatu yang di harapkan berarti. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensinya dan efektivitas hidupnya, hal ini dilakukan dengan menajamkan posisi perannya. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan. Profesionalisme, financial dan lainnya. Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga baitul maal

wa tamwil yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya.

Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.¹⁴ Sehingga kontribusi di sini dapat diartikan sebagai sumbangan pemikiran, keahlian, maupun tenaga yang diberikan oleh para sumber daya insani dalam suatu lembaga *baitul maal wa tamwil* yang dapat membawa pengaruh positif maupun negatif bagi lembaga. Kontribusi merupakan suatu tindakan yaitu berupa bentuk nyata yang dilakukan oleh individu atau lembaga yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Kontribusi menurut kamus besar bahasa Indonesia adalah sumbangan atau pemberian, jadi kontribusi adalah pemberian andil setiap kegiatan, peranan, masukan, ide dan lainnya.

Sedangkan menurut kamus Ekonomi, kontribusi adalah sesuatu yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya, atau kerugian tertentu dan bersama-sama. Dari rumusan pengertian kontribusi yang dikemukakan di atas maka dapat diartikan bahwa kontribusi adalah suatu keterlibatan yang dilakukan oleh individu atau sebuah lembaga yang kemudian memposisikan dirinya terhadap peran dalam sebuah kerja sama, dan memberikan dampak nilai dari aspek sosial dan ekonomi. Kontribusi berasal dari bahasa Inggris *contribute*, *contribution*, yang memiliki arti keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Kontribusi dalam pengertian sebagai tindakan yaitu berupa perilaku yang dilakukan oleh individu yang kemudian memberikan dampak baik positif maupun negatif terhadap pihak lain. Dengan

kontribusi berarti individu tersebut juga berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas hidupnya. Hal ini dilakukan dengan cara menajamkan posisi perannya. Sesuatu yang kemudian menjadi bidang spesialis, agar lebih tepat sesuai dengan kompetensi. Kontribusi dapat diberikan dalam berbagai bidang yaitu pemikiran, kepemimpinan, profesionalisme, finansial, dan lainnya.

4. Situasi Kelompok

Manusia adalah makhluk multidimensi, manusia berkembang dengan dua fungsi, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk yang bersifat individualitas mengembangkan dan mengaktualisasikan dirinya didalam kelompok sosial. Sedangkan manusia sebagai makhluk sosial, merupakan makhluk yang tidak bisa hidup sendiri tanpa orang lain. Manusia tidak akan bisa menjadi manusia jika tidak hidup dengan manusia. Manusia hanya akan dapat mengembangkan diri jika berinteraksi dengan manusia.

Manusia tidak bisa lepas dari manusia lainnya. Di dalam kehidupan manusia akan selalu terjadi interaksi. Interaksi yang terjadi dapat berupa antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok. Dalam interaksinya dengan individu atau kelompok lain akan membentuk sikap-sikap individu yang mempengaruhi kepribadiannya.

Oleh karena itu manusia membutuhkan kelompok sosial untuk mengembangkan potensi dirinya serta dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Dalam kelompok sosial individu dapat memperoleh kepuasan dalam pemenuhan kebutuhannya, dia dapat menjadi lebih percaya diri di kelompoknya, lebih merasa dihargai, dan dibutuhkan. Tapi terkadang didalam kelompok social individu juga bisa mengalami kekecewaan, diacuhkan, dan mengalami kesulitan dalam berinteraksi dan beradaptasi. Ada banyak jenis kelompok sosial di masyarakat. Kelompok social itu sendiri terjadi karena adanya interaksi antara dua orang atau lebih sehingga antara yang satu dengan yang lainnya saling tergantung sehingga membentuk pola-pola tertentu yang mengikat. Situasi ini merupakan situasi di dalam kelompok, di mana kelompok sosial tempat orang-orangnya berinteraksi itu merupakan suatu

keseluruhan tertentu, misalnya suatu perkumpulan, suatu partai, dan anggota -anggotanya sudah mempunyai saling hubungan yang lebih mendalam antara yang satu dengan yang lain, saling hubungan yang tidak berlaku pada hari itu saja mereka berkumpul, tetapi saling hubungan itu sudah terdapat sebelumnya. selain hubungan -hubungan pribadi antara orang -orang dalam situasi kelompok sosial itu, terdapat juga hubungan struktural dan hierarkis, yaitu antara orang -orang yang menjadi pemimpin dan staf kelompok serta anggota-anggota biasa. hubungan tersebut berdasarkan pembagaaian tugas antara anggota -anggotanya, yang menuju ke suatu kepentingan bersama.

selain itu, kelompok sosial sudah mempunyai ciri-ciri dan peraturan-peraturannya yang khas baginya, sehingga memang merupakan suatu Contoh : Suatu kelas di sekolah, dengan ketua kelasnya, komisariss-komisariss kelas, anggota pemimpin, dan anggota lainnya, yang masing-masing mempunyai tugasnya. kelas itu mempunyai tujuan bersama, dan makin giat anggota -anggotanya melaksanakan tugasnya, makin produktif pula usaha kelompoknya, serta makin kokoh persatuan antaranggota kelompok. Tiap-tiap perkumpulan, dengan susunan pimpinan dan pembantunya, anggaran dasar dan rumahtangga, merupakan kelompok sosial, berbeda dengan keadaan kebersamaan di mana orang-orang kebetulan berada di sana tanpa ada hubungan struktural atau hubungan batin yang khas.

Demikianlah tiap-tiap situasi sosial itu dapat kita golongkan kepada keadaan kebersamaan atau kepada keadaan kelompok sosial. dalam pada itu terdapat pula situasi-situasi sosial yang menunjukkan sifat -sifat di antara golongan yang pertama dan yang ke dua, misalnya situasi ketika kelompok sosial itu sedang di dalam pembentukannya dan sedang beralih dari situasi-situasi kebersamaan menuju ke situasi kelompok. tetapi kebanyakan situasi sosial itu dapat kita golongkan kepada salah satu dari kedua golongan itu. dengan demikian situasi massa seperti yang di uraikan oleh *Gustave le Bon* itu lebih mirip kepada situasi kebersamaan (lihat ciri-ciri massa atau crowd), daripada situasi kelompok sosial.

5. Pembagian Tugas

Pembagian kerja merupakan rangkaian tugas yang harus dikerjakan berdasarkan klasifikasi pekerjaan yang telah ditentukan dimana saling berhubungan erat antara bagian satu dengan bagian yang lainnya. Agar tidak terjadi *over time* maka setiap karyawan harus mampu memajemen tugas pekerjaannya. **Pembagian kerja** (Inggris: *division of labour*) adalah konsep spesialisasi pekerjaan dalam suatu masyarakat. Secara historis, peningkatan pembagian kerja dikaitkan dengan pertumbuhan perdagangan, kebangkitan kapitalisme, dan peningkatan kompleksitas proses industri. Konsep dan implementasi pembagian kerja telah diamati dalam budaya Sumeria (Mesopotamia) kuno, di mana penugasan pekerjaan di beberapa kota bertepatan dengan peningkatan perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi. Pembagian kerja umumnya juga meningkatkan produktivitas produsen dan pekerja individu. Setelah Revolusi Neolitikum, peternakan dan pertanian menghasilkan persediaan makanan yang berlimpah, yang meningkatkan populasi dan mengarah pada spesialisasi tenaga kerja, termasuk profesi baru seperti pengrajin, tentara, dan kelas elit.

Spesialisasi ini dilanjutkan dengan proses industrialisasi, dan pabrik-pabrik era Revolusi Industri. Oleh karena itu, banyak ekonom klasik serta beberapa insinyur mesin seperti Charles Babbage adalah pendukung pembagian kerja. Selain itu, meminta pekerja melakukan satu atau sedikit tugas menghilangkan periode pelatihan panjang yang diperlukan untuk melatih pengrajin, yang digantikan dengan pekerja tidak terampil yang dibayar lebih rendah tetapi lebih produktif. Pembagian kerja mutlak diperlukan, sebab tanpa adanya pembagian kerja mereka akan bekerja menurut kemauan sendiri-sendiri tanpa menghiraukan tujuan organisasi atau organisasi secara keseluruhan yang berakibat tidak tercapainya tujuan organisasi atau paling tidak tujuan organisasi akan terhambat pencapaiannya. Oleh karena itu di dalam suatu organisasi perlu sekali adanya pembagian kerja yang baik yang dapat memberikan penjelasan bagi para pegawai untuk melaksanakan tugas dengan baik sesuai dengan beban kerja yang menjadi tanggung jawab, sehingga proses organisasi dapat berjalan dengan lancar. Pembagian kerja yang efektif harus diikuti dengan penempatan pegawai pada tempat yang tepat.

Selain penempatan pegawai pada tempat yang tepat juga perlu diperhatikan tentang penyesuaian beban kerja. Pengertian pembagian kerja Menurut Hasibuan Pembagian kerja yaitu informasi tertulis yang menguraikan tugas dan tanggung jawab, kondisi pekerjaan, hubungan pekerjaan, dan aspek- aspek pekerjaan pada suatu jabatan tertentu dalam organisasi. 1 Pembagian kerja harus disesuaikan dengan kemampuan seseorang pegawai, karena mungkin saja seorang pegawai sanggup diberi tugas yang banyak, namun bagaimana dengan penyelesaiannya. Pembagian kerja dilakukan dengan asumsi bahwa semakin kecil tugas yang dibebankan maka akan semakin cepat penyelesaiannya dari waktu, semakin ringan dari segi tenaga yang digunakan, semakin mudah dalam penggunaan pikiran, semakin hemat pula biaya yang digunakan. Mengenai Pembagian Kerja, Abdul Syani mendefinisikan pembagian kerja adalah suatu pemecahan tugas dengan sedemikian rupa sehingga setiap orang atau karyawan dalam organisasi bertanggung jawab dan melaksanakan aktivitas tertentu saja. 2 Pembagian kerja tidak melulu berdasarkan jenis kelamin, Pada abad 20-an dalam perkembangannya pembagian peran sosial antara laki-laki dan perempuan tidak melulu berdasarkan atas budaya patriarki, hal tersebut di dukung majunya teknologi dan informasi yang secara pesat berubah.

Perubahan terjadi karena adanya tuntutan bagi perempuan, dimana perempuan tidak lagi dituntut dalam ranah domestik tetapi mulai terjun ke berbagai aktivitas atau kegiatan yang menuntut mereka bercengkrama dengan kehidupan sosial bahkan ada yang sampai merambah ke dunia politik. Tetapi hal tersebut tidak berlaku bagi perempuan yang memang lebih tertarik sebagai ibu rumah tangga seperti mengurus anak dan mengurus suami. hal tersebut di dukung karena sifat perempuan tersebut yang berpandangan tradisional atau feminisme. Perempuan kurang dapat berperan dalam beberapa aspek karena kondisi perempuan yang dianggap kurang menguntungkan di banding dengan laki-laki. Tetapi banyak kenyataan dilapangan bahwa kini perempuan pun mampu bekerja di bidang pekerjaan yang di dominasi oleh laki-laki. Namun, apa jadinya apabila yang terjadi sebaliknya. T. Hani Handoko (2000:47) mengemukakan bahwa Pembagian kerja adalah suatu pernyataan tertulis yang menguraikan fungsi, tugas-tugas, tanggung jawab, wewenang, kondisi kerja, dan

aspek-aspek pekerjaan tertentu lainnya. Dengan adanya pembagian kerja, karyawan dapat dilatih sesuai dengan bidangnya karena melalui keahlian yang dimilikinya tersebut sehingga karyawan dapat memberi sumbangan maksimal terhadap pencapaian tujuan. Pembagian kerja juga dapat membantu dalam penempatan karyawan dengan menggunakan prinsip *the right man in the right place* yaitu orang yang ditempatkan pada tempat yang tepat berdasarkan pada latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, ketrampilan, jenis kelamin, dan lain sebagainya sehingga akan memberikan jaminan terhadap kestabilan, kelancaran, dan efektivitas kerja. Efektivitas organisasi terjadi jika masing-masing karyawan melaksanakan pekerjaannya yang menjadi tanggung jawabnya sendiri secara efektif.

6. Pencapaian Tujuan

Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) awalnya dikemukakan oleh Edwin Locke (1968) yang mengatakan adanya hubungan antara tujuan yang ditetapkan dengan prestasi kerja (kinerja). *Goal setting theory* merupakan salah satu bentuk teori motivasi. Konsep dasar teori ini adalah seseorang yang memahami tujuan (apa yang diharapkan oleh organisasi kepadanya) akan mempengaruhi perilaku kerjanya. Menurut teori ini salah satu dari karakteristik perilaku yang mempunyai tujuan yang umum diamati ialah bahwa perilaku tersebut terus berlangsung sampai perilaku itu mencapai penyelesaiannya, sekali seseorang mulai sesuatu (seperti suatu pekerjaan, sebuah proyek baru), ia terus mendesak sampai tujuan tercapai. Teori ini juga menyatakan bahwa perilaku individu diatur oleh ide (pemikiran) dan niat seseorang.

Sasaran dapat dipandang sebagai tujuan atau tingkat kerja yang ingin dicapai oleh individu. *Goal setting theory* mengisyaratkan bahwa seorang individu berkomitmen pada tujuan. Jika seorang individu berkomitmen untuk mencapai tujuannya, maka hal ini akan mempengaruhi tindakannya dan mempengaruhi konsekuensi kerjanya. Teori ini juga menjelaskan bahwa penetapan tujuan yang menantang (sulit) dan dapat diukur hasilnya akan dapat meningkatkan prestasi kerja (kinerja) yang diikuti dengan kemampuan dan keteampilan kerja. Berdasarkan pendekatan *goal setting theory*, kinerja instansi pemerintah daerah diasumsikan sebagai

tujuannya, sedangkan variabel *good governance*, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern pemerintah sebagai faktor penentu. Jika faktor tersebut diterapkan secara baik maka kinerja pemerintah daerah yang baik akan tercapai. Teori penetapan tujuan (*goal setting theory*) ialah sebuah teori yang menggambarkan bentuk suatu model individual yang akan bergerak dengan tujuan yang jelas dan pasti. Seseorang akan memiliki motivasi yang tinggi apabila dia memiliki tujuan yang jelas, yang artinya individu akan bertekad untuk tidak menurunkan atau meninggalkan tujuan tersebut, yang kemungkinan besar terjadi apabila sasaran tersebut ditentukan sendiri dan bukannya ditugaskan. Penetapan tujuan tidak hanya berpengaruh pada pekerjaan saja, tetapi juga merangsang karyawan untuk mencari atau menggunakan metode kerja yang paling efektif.

Namun menurut dalam kasus lain, seseorang justru akan memiliki kinerja terbaik jika mendapat tugas dari pimpinannya (Robbins, 2006). Asumsi dari teori ini terarah kepada perorangan yang memiliki komitmen terhadap targetan yang kemungkinan terbesar dapat terealisasi jika targetan tersebut ditentukan sendiri dan bukan ditugaskan. Akan tetapi dalam kasus lain, perorangan justru dapat mendapatkan kinerja yang lebih baik jika berdasarkan upaya sendiri atau memang di haruskan dari organisasi sebagai suatu kebijakan (Ramandei, 2009). Berdasarkan penjelasan di atas, sasaran yang diterapkan bersama umpan balik sehingga akan menunjukkan hasil yang lebih baik dari pada tidak adanya umpan balik dan niat bekerja membawa target yang hendak dicapai sehingga hal tersebut merupakan sumber dari adanya motivasi kerja.

Artinya, target dapat menginformasikan kepada karyawan keperluannya untuk di kerjakan dan dapat menunjukan seberapa banyak yang harus dilakukan. Dalam teori ini menunjukkan bahwa target yang bersifat sulit dan spesifik dapat menimbulkan tingkat kinerja yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan tidak adanya suatu sasaran yang ditetapkan (Robbins, 2006). Individu berkerja dengan apa yang telah ditetapkan dalam bentuk peraturan, maka usaha dalam mencapai tujuan tersebut juga besar. Bentuk peraturan dapat memperluas kemungkinan dalam pencapaian tujuan jika tujuan tersebut diterapkan sesuai dengan nilai yang dimiliki karyawan. Dilihat dari uraian diatas dapat diasumsikan untuk

mendapatkan kinerja yang bagus maka perlunya diselaraskan dengan tujuan organisasi dan tujuan individu atau perorangan. Yang nantinya tujuan organisasi ini berbentuk peraturan-peraturan yang telah terbentuk didalamnya, akan tetapi bagi tujuan individu tersebut dapat disesuaikan dengan motivasi tertentu yang termotivasi dengan faktor individu itu sendiri.

C. Partisipasi dan Efektivitas Penyelenggaraan Pemerintahan

Sondang P. Siagian (2001) memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu penyelesaian tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas nilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu. Efektivitas organisasi dalam pelaksanaan program pembangunan ditentukan oleh adanya faktor pendukung. Starman dalam (Kunarjo, 2002: 126) menyatakan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa pandangan tentang pelaksanaan program pembangunan memerlukan adanya faktor yang mendukung terselenggaranya suatu program kegiatan yang bermutu, tepat waktu, dan tepat sasaran dengan mengaktifkan secara efektif faktor pendukung berupa partisipasi masyarakat. Bintoro Tjokromidjojo mengemukakan partisipasi masyarakat sebagai: a) keterlibatan dalam penentuan arah, strategi dan kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah; b) keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab dalam bentuk sumbangan dalam mobilisasi pembiayaan pembangunan, kegiatan produktif yang serasi, pengawasan sosial atas jalannya pembangunan, dan lain-lain; c) keterlibatan dalam memetik hasil dan manfaat pembangunan secara berkeadilan (Susantyo, 2007: 15).

Berkaitan dengan hal tersebut, partisipasi masyarakat dapat dikatakan sebagai keterlibatan masyarakat secara umum dalam proses pembangunan. Dimana masyarakat dapat berperan dalam suatu proses pembangunan berkelanjutan. Kemudian Soetomo mengatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan suatu peran dimana terdapat adanya pembangunan untuk menuju kepada peningkatan taraf hidup masyarakat tersebut (Soetomo, 2012: 116). Karenanya, partisipasi

masyarakat dalam lingkungan pedesaan merupakan manifestasi terhadap peran masyarakat dalam mendukung suatu perubahan sosial melalui hubungan timbal balik antara masyarakat dan desa. Artinya bahwa adanya ketergantungan antara masyarakat dengan desa dalam upaya peningkatan atau kemajuan baik masyarakatnya maupun desanya secara universal. Pembangunan yang efektif membutuhkan keterlibatan (partisipasi) dari masyarakat itu sendiri. Sehingga selain demi pembangunan yang efektif akan terwujud juga peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat itu sendiri.

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dengan maksud dan tujuan agar masyarakat dapat menjaga hasil dari pada pembangunan karena merasa bahwa pembangunan itu juga milik mereka karena telah dilibatkan dalam program tersebut. Alasan utama mengapa partisipasi masyarakat menjadi sangat penting, yaitu: Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat ukur untuk memperoleh informasi mengenai kondisi dan kebutuhan masyarakat setempat yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal. Masyarakat akan mempercayai proyek atau pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya karena mereka akan lebih mengetahui perihal proyek tersebut. Adanya anggapan bahwa merupakan hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat itu sendiri. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu penentu bagi keberhasilan pelaksanaan pembangunan.

Dilain pihak bahwa pembangunan desa diarahkan pada kewajiban antara pemerintah dan masyarakat. Bahkan di dalam pokok-pokok kebijaksanaan pembangunan desa dirumuskan bahwa mekanisme pembangunan desa adalah merupakan perpaduan yang harmonis dan serasi antara dua kelompok kegiatan utama yang berbagai kegiatan pemerintah sebagai kelompok kegiatan pertama dan berbagai kegiatan partisipasi masyarakat sebagai kelompok utama yang kedua. Dalam pasal 78 Undang-Undang No 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan

kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Dijelaskan pada bagian yang ketiga bahwa dalam pembangunan desa harus mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan guna mewujudkan perdamaian dan keadilan sosial. Dari uraian tersebut jelaslah sudah, bahwa keberhasilan pelaksanaan pembangunan desa bukan saja ditentukan oleh adanya peranan pemerintah. saja melainkan juga tergantung dari peran serta atau partisipasi masyarakat

D. Partisipasi Politik

Partisipasi politik menandakan sikap dan peran masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan politik. Jenis partisipasi ini bisa diselenggarakan dan dilakukan lewat berbagai cara. Adanya partisipasi politik dapat mengubah masyarakat yang semula apatis menjadi aktif. Menurut Ramlan Surbakti dalam buku Memahami Ilmu Politik (2005), partisipasi politik adalah segala bentuk keikutsertaan atau keterlibatan warga negara biasa (yang tidak memiliki wewenang) dalam menentukan keputusan yang dapat mempengaruhi hidupnya. Dikutip dari buku Partisipasi Politik Masyarakat: Teori dan Praktik (2016) karya Rahmawati Halim dan Muhlin Lalongan, partisipasi poliitk bisa dilakukan secara individual ataupun kolektif. Partisipasi politik lebih berfokus pada kegiatan yang dilakukan, dan bukan terfokus pada sikap politiknya. Partisipasi politik memiliki dua pendekatan, yaitu pendekatan politik kelompok dan hak-hak politik. Melansir dari jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013) (2014) karya Tia Subekti, kegiatan partisipasi politik bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, serta efektif atau tidak. Partisipasi politik bisa diartikan sebagai peran warga negara dalam proses pemerintahan. Bentuk partisipasi ini dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan, sehingga secara langsung atau tidak, memang berpengaruh bagi kehidupan masyarakat suatu negara

Dalam jurnal Partisipasi Politik Masyarakat dalam Pemilihan Umum Legislatif di Kota Denpasar (2020) karya Ni Ketut Arniti, partisipasi politik merupakan contoh perwujudan negara demokrasi, yang mana masyarakat berperan untuk memilih pejabat negara dalam penyelenggaraan aktivitas pemerintahan. Partisipasi politik memiliki sejumlah manfaat yaitu: Sebagai bentuk dukungan kepada pemerintah dan penguasa. Untuk memperlihatkan kelemahan atau kekurangan pemerintah, supaya dapat diperbaiki. Sebagai bentuk tantangan terhadap penguasa dan pemerintah, agar perubahan struktural serta sistem politik dapat terjadi.

Mengutip dari jurnal Partisipasi Politik dan Perilaku Memilih pada Pemilu 2014 (2015) karya RR Emilia Yustiningrum dan Wawan Ichwanuddin, partisipasi politik memiliki tiga faktor utama yang berpengaruh, yaitu: Faktor psikologis Faktor ini berkaitan erat dengan identifikasi individu atau masyarakat terhadap suatu partai politik. Proses identifikasi ini dapat dipengaruhi oleh orang terdekat, seperti orang tua dan keluarga. Selain itu, faktor psikologis juga meliputi ketertarikan individu dalam membicarakan isu mengenai politik. Faktor ekonomi atau rasional Faktor ini dipengaruhi oleh evaluasi atau pemikiran individu terkait kondisi ekonomi dirinya, keluarga, serta nasional. Pemikiran tentang faktor ini jelas berpengaruh pada pilihan dan bagaimana bentuk partisipasi politiknya. Faktor sosiologis Faktor ini meliputi aspek agama, pendidikan, tempat tinggal, usia, jenis kelamin, serta tingkat ekonominya.

Seluruh aspek ini berpengaruh pada partisipasi politik individu atau masyarakat, khususnya dalam penentuan pemimpin atau pejabat pemerintahan Partisipasi politik memiliki banyak bentuk atau jenis. Namun, setidaknya ada tiga bentuk umum dari partisipasi politik. Berikut penjelasannya: Partisipasi aktif Adalah bentuk partisipasi politik yang dilaksanakan dengan pengajuan usul mengenai kebijakan umum beserta pilihan alternatifnya. Selain itu, partisipasi politik secara aktif juga dilakukan dengan melakukan kritik serta perbaikan atas berbagai kebijakan yang dibuat pemerintah, membayar pajak, dan ikut serta dalam pemilihan kepala daerah. Partisipasi pasif Adalah bentuk partisipasi politik yang dilakukan dengan menaati, menerima, serta melaksanakan saja seluruh keputusan pemerintah. Artinya masyarakat hanya

sekadar menerima dan mengikuti saja, tanpa menyatakan pengajuan usul ataupun kritik. Selain dua jenis tersebut, partisipasi politik juga dapat dibedakan lagi menjadi tiga, yakni: *Apatis*: artinya masyarakat menolak dan menarik diri dari proses politik. *Spectator*: artinya masyarakat setidaknya pernah ikut serta dalam pemilihan umum. *Gladiator*: artinya masyarakat terlibat aktif dalam proses politik, misalnya menjadi anggota partai, pekerja kampanye, serta aktivis masyarakat. Partisipasi politik juga dapat dibagi menjadi dua jenis, yakni: Partisipasi politik secara konvensional Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan melakukan diskusi politik, pembentukan dan penggabungan organisasi politik, kampanye, dan lain sebagainya. Partisipasi politik secara non konvensional Bentuk partisipasi ini dilakukan dengan cara demonstrasi, mogok, serta pembangkangan tanpa disertai kekerasan.

BAB V

KONSEP DAN TEORI AKSI & TINDAKAN PEMERINTAHAN

A. Teori Aksi

Teori aksi adalah pandangan dari ilmu sosiologi yang menekankan kepada individu sebagai sebuah subjek. Teori aksi memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberinya makna. **Teori Aksi** atau **Teori Tindakan** adalah salah satu teori yang berasal dari paradigma definisi sosial. Pelopor dari Teori Aksi adalah Maximilian Weber, sedangkan penyempurnaan dan pengembangannya dilakukan oleh Talcott Parsons. Teori aksi adalah pandangan dari ilmu sosiologi yang menekankan kepada individu sebagai sebuah subjek. Teori aksi memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberinya makna. Teori Aksi hanya mengalami sedikit perkembangan dari pemikiran Weber. Teori Aksi mencapai puncak perkembangannya pada tahun 1940 melalui beberapa karya dari para ahli sosiologi, seperti Florian Znaniecki, Robert Morrison MacIver, Talcott Parsons, dan Robert Hinkle. Peran penting dari Teori Aksi adalah mengembangkan teori interaksi simbolik dan teori fenomenologi. Teori aksi adalah pandangan dari ilmu sosiologi yang menekankan kepada individu sebagai sebuah subjek. Teori aksi memandang tindakan sosial sebagai sesuatu yang secara sengaja dibentuk oleh individu dalam konteks yang telah diberinya makna. Konsep dari Teori Aksi dilandasi oleh pemikiran yang dicetuskan oleh Maximilian Weber. Pemikiran Weber adalah bahwa pengetahuan tentang tujuan subjektif dan maksud pelaku tindakan harus dipahami oleh pengamat sebelum mulai memahami makna dari tindakan sosial yang dilakukan oleh pelaku.

Gagasan Weber tentang Teori Aksi muncul dari paradigma definisi sosial dan filsafat humanis. Weber memiliki pemikiran bahwa struktur sosial termasuk bagian yang tidak dapat dipisahkan dari pranata sosial. Keberlanjutan perkembangan hubungan dapat berlangsung dengan

mengetahui tujuan dari suatu hubungan sosial. Weber menyatakan bahwa manusia yang hanya mematuhi struktur sosial hanya akan melupakan prinsip dari tindakan manusia. Setiap tindakan dan perilaku individu dalam hubungan sosial terhadap orang lain harus memiliki maknanya tersendiri. Weber berpendapat bahwa masyarakat adalah produk dari tindakan-tindakan individu. Tindakan sosial merupakan segala tindakan individu selama masih mempunyai makna atau arti subjektif bagi dirinya yang ditujukan untuk individu lain. Sebuah tindakan yang dilakukan kepada benda mati atau objek fisik lain tanpa keterkaitan dengan tindakan individu lain, maka hal itu tidak dapat disebut sebagai tindakan sosial. Diperlukan metode penafsiran pemahaman untuk memahami konsep Teori Aksi yang digagas Weber. Individu yang meneliti tindakan individu lain, harus memahami secara subjektif serta menginterpretasi tindakan si aktor. Weber juga merumuskan bahwa perasaan dan akal menjadi penyebab munculnya tindakan dan perilaku antara hubungan individu. Akhirnya individu lain akan berusaha untuk memahami ataupun menafsirkan sehingga dari hubungan tindakan antar individu tersebut menghasilkan proses sebab-akibat. Setiap individu yang melakukan tindakan pada individu lain maka ia akan memperoleh reaksi dari tindakan itu. Teori Aksi menyatakan bahwa tindakan manusia muncul sebagai subjek dan objek dalam dua kondisi yang berbeda. Tindakan muncul dari kesadaran sendiri sebagai objek, sementara itu tindakan juga dapat muncul karena situasi dari luar diri. Manusia bertindak atau berperilaku untuk mencapai tujuan tertentu saat berposisi sebagai subjek. Dalam bertindak, manusia menggunakan segala cara yang sesuai untuk mencapai tujuan. Kelangsungan tindakan manusia hanya dibatasi oleh kondisi yang tak dapat diubah dengan sendirinya. Manusia memilih mengevaluasi tindakan yang akan, sedang dan yang telah dilakukannya. Dalam Teori Aksi, manusia memiliki tiga macam tindakan, yaitu tindakan tradisional, tindakan afektif, dan tindakan rasional. Tindakan tradisonal adalah sebuah tindakan mengikuti tradisi, sedangkan tindakan afektif merupakan tindakan yang dilandasi oleh hawa nafsu. Tindakan rasional berbeda dengan tindakan tradisional maupun tindakan afektif. Tindakan rasional terbagi menjadi tindakan rasional instrumental dan tindakan rasional nilai. Tindakan rasional

instrumental merupakan tindakan yang memertimbangkan penggunaan alat yang efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. Sedangkan tindakan rasional nilai lebih menekankan pada kesadaran akan nilai yang luhur. Pengaruh dari Teori Aksi dimulai pada tahun 1940, setelah sebelumnya berbagai karya tulis ilmiah yang membahas sosiologi dan aksi sosial diterbitkan oleh para sosiolog Eropa. Dukungan terhadap Teori Aksi dimulai oleh Robert Morrison MacIver dengan menerbitkan bukunya yang berjudul *sociology : Its Structure and Change* pada tahun 1931. Florian Znaniecki meneruskan dukungan terhadap Teori Aksi dengan menerbitkan sebuah buku berjudul *The Method of Sociology* pada tahun 1934 dan dilanjutkan dengan penerbitan buku berjudul *Social Actions* pada tahun 1936. Perluasan dukungan Teori Aksi dicapai setelah Talcott Parsons menerbitkan bukunya yang berjudul *The Structure of Social Action* pada tahun 1937. Ketiga tokoh ini kemudian memperluas pengaruh Teori Aksi hingga ke Amerika Serikat. Amerika yang sebelumnya terpengaruh oleh Comte dan Spencer mulai meminati Teori Aksi yang digagas oleh Vilfredo Pareto, Emile Durkheim dan Maximilian Weber. Perkembangan ide-ide sosiologi Amerika Serikat kemudian mulai menerima pengaruh dari Teori Aksi. Teori aksi tidak memberikan sumbangan yang begitu penting terhadap perkembangan ilmu sosial di Amerika Serikat. Peran penting dari Teori Aksi adalah mengembangkan teori interaksionisme simbolis dan teori fenomenologi.

B. Tindakan Pemerintahan

Pengertian pemerintahan dibedakan menjadi dua, yaitu, pertama, pemerintahan dalam arti luas, yaitu pemerintahan yang terdiri dari tiga kekuasaan yang masing-masing terpisah satu sama lain. ketiga kekuasaan itu adalah : kekuasaan legislative, kekuasaan eksekutif dan kekuasaan yudikatif, pemerintahan kekuasaan itu berdasarkan teori trias politica dari Montesquieu. kedua, pemerintahan dalam arti sempit ialah badan pelaksana kegiatan eksekutif saja tidak termasuk badan kepolisian, peradilan dan badan perundang-undangan. pemerintahan dalam arti sempit itu dapat disebut dengan istilah lain, yaitu "administrasi negara". pemerintah adalah subjek hukum, sebagai pendukung hak dan kewajiban. Premis yang

mendasarinya ialah bahwa setiap hubungan sosial akan mempunyai konsekuensi tertentu dalam hal legitimasi. Betapapun dalam kenyataan kita melihat bahwa seorang administrator atau birokrat tidak akan bisa menghindari tindakan-tindakan politis. Aktivitas politis dari birokrat tampak dari adanya keluasaan bertindak (diskresi) administratif yang dimilikinya. Diskresi administratif adalah segala aktivitas untuk mengemukakan saran, melapor, menjawab, mengambil inisiatif, menyampaikan info, menferivikasi, memperingatkan, mengadukan, menolak, dan merundingkan sesuatu yang berpengaruh terhadap lembaga-lembaga publik (Wahyudi Kumoroto 2011: 120-121).

Dalam melakukan aktifitasnya, pemerintah melakukan dua macam tindakan, tindakan biasa (*feitelijkehandelingen*) dan tindakan hukum (*rechtshandelingen*). Dalam kajian hukum, yang terpenting untuk dikemukakan adalah tindakan dalam katagori kedua, *rechtshandelingen*. tindakan hukum pemerintahan adalah tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan. tindakan pemerintahan memiliki beberapa unsur yaitu sebagai berikut : 1. perbuatan itu dilakukan oleh aparat pemerintah dalam kedudukannya sebagai penguasa maupun sebagai alat perlengkapan pemerintahan (*bestuursorganen*) dengan prakarsa dan tanggung jawab sendiri; 2. perbuatan tersebut dilaksanakan dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan; 3. perbuatan tersebut dimaksudkan sebagai sarana untuk menimbulkan akibat hukum di bidang hukum administrasi; 4. perbuatan yang bersangkutan dilakukan dalam rangka pemeliharaan kepentingan negara dan rakyat. Dalam melaksanakan tugas dan menyelenggarakan kepentingan umum, pemerintah banyak melakukan kegiatan atau perbuatan-perbuatan. Keaktivitas atau pembuatan itu pada garis besarnya dibedakan ke dalam dua golongan, yaitu: 1. *Rechtshandelingen* (golongan perbuatan hukum) 2. *Feitelijke handelingen* (golongan yang bukan perbuatan hukum) Dari kedua golongan perbuatan tersebut yang penting bagi hukum administrasi negara adalah golongan perbuatan hukum (*hechts handelingen*), sebab perbuatan tersebut langsung menimbulkan akibat hukum tertentu bagi hukum administrasi Negara, oleh karena perbuatan hukum ini membawa akibat pada hubungan hukum atau keadaan hukum yang ada, maka perbuatan tersebut

tidak boleh mengandung cacat, seperti kehilangan (dwaling), penipuan (bedrog), paksaan (dwang). Secara keseluruhan, fungsi pemerintahan terdiri atas berbagai macam tindakan pemerintah, seperti keputusan-keputusan, ketetapan-ketetapan yang bersifat umum, tindakan hukum dan tindakan nyata. Netherlands Bestuursrecht (1987), menguraikan empat macam bentuk penguasa yaitu: 1. Pemelihara ketertiban, pemeliharaan ketertiban pada tingkat pertama adalah pengawasan supaya dapat terlaksana secara teratur. 2. Pengelolaan keuangan, melalui pajak, pungutan-pungutan lain, pendapatan sendiri. 3. Tuan tanah. Sejak dulu, pihak penguasa merupakan tuan tanah. 4. Pengusaha, beberapa kegiatan dalam pemerintah hanya dapat dilaksanakan oleh pihak penguasa mengingat sifatnya atau karena diharuskan sesuai Pentingnya filsafat pemerintahan terletak pada kenyataan bahwa pemerintah merupakan kekuatan dunia yang paling menentukan hidup matinya seorang manusia dan selamat atau hancurnya dunia.

Kuntjoro dalam Taliziduhu Ndraha mendefinisikan pemerintah sebagai sebuah lembaga, dan fungsi lembaga itulah disebut pemerintahan. Kybernology sebaliknya menggunakan pendekatan empirik, pemerintahan didefinisikan sebagai suatu kegiatan atau proses, yaitu proses penyediaan dan distribusi layanan publik yang tidak diprivatisasikan dan layanan civil kepada setiap orang pada saat dibutuhkan (Taliziduhu Ndraha 2011: 387-428). Freies Ermessen merupakan konsekuensi logis dari konsepsi welfare state, akan tetapi dalam kerangka negara hukum, Freies Ermessen ini tidak dapat digunakan tanpa batas. Atas dasar itu, Sjachran Basah mengemukakan unsur-unsur freies ermessen dalam suatu negara hukum yaitu sebagai berikut : 1. ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik; dengan undang-undang 2. merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara; 3. sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum; 4. sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri; 5. sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba; 6. sikap tindak itu dapat dipertanggung jawab baik secara moral kepada tuhan yang maha esa maupun secara hukum Negara memegang peranan penting dalam mengarahkan dan mengendalikan bentuk perdebatan atau discourse yang muncul untuk mengerti peran dari negara dan memahami konsep negara. Namun,

negara mempunyai arti yang luas, yaitu suatu badan yang menguasai segala pranata (administratif, politik, yuridis) yang mengatur jalur kekuasaan dan distribusi sumber daya, serta menguasai semua aparat yang mempunyai kemampuan kopersif. Walaupun negara mencakup juga pemerintah, ia tidak indentik dengan pemerintah.

Pemerintah terbatas pada lembaga-lembaga yang berada dalam struktur politik tertentu dan berfungsi menjalankan pemerintah (Ratna Saptari dan Brigitte Holzner 1997: 212). Kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah bersumber pada tiga hal, atribusi, delegasi, dan mandat. atribusi ialah pemberian kewenangan oleh pembuat undang-undang sendiri kepada suatu organ pemerintahan baik yang sudah ada maupun yang baru sekali. Menurut Indroharto, legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang itu dibedakan antara: yang berkedudukan sebagai original legislator di negara kita di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk konstitusi (konstituante) dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang, dan di tingkat daerah adalah DPRD dan pemerintah daerah yang melahirkan peraturan daerah.

C. Perilaku Pemerintahan

Perilaku organisasi adalah merupakan ilmu tentang perilaku tiap individu dan kelompok serta pengaruh tiap individu dan kelompok terhadap organisasi, maupun perilaku interaksi antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok dalam organisasi demi kemanfaatan suatu organisasi. Perilaku organisasi juga dikenal sebagai Studi tentang organisasi. Studi ini adalah sebuah bidang telaah akademik khusus yang mempelajari organisasi, dengan memanfaatkan metode-metode dari ekonomi, sosiologi, ilmu politik, antropologi dan psikologi. Seperti halnya ilmu sosial, perilaku organisasi berusaha untuk mengontrol, memprediksikan, dan menjelaskan. Namun ada sejumlah kontroversi mengenai dampak etis dari pemusatan perhatian terhadap perilaku pekerja. Ada tiga tingkatan analisis pada perilaku organisasi, yaitu : Individu, Kelompok, Organisasi. Adapun empat unsur/elemen utama perilaku organisasi antara lain: Pandangan psikologi, Pandangan ekonomi, Pandangan

bahwa individu dipengaruhi aturan org dan pemimpinnya, Pandangan tentang penekanan kepada tuntutan manajer untuk mencapai tujuan organisasi. Unsur – unsur / elemen perilaku organisasi diatas mengidentifikasi macam organisasi dilihat dari budaya organisasi tersebut, yang dapat dikelompokkan menjadi : Organisasi formal, Organisasi Informal dan Social environment Ada empat model/framework di dalam perilaku organisasi, yang akan mempengaruhi operasi dari organisasi,yaitu:

1. Autocratic : Model ini berbasis pada kekuatan, dengan orientasi managerial yang berwenang, maksudnya adalah bahwa karyawan/pegawai sangat tergantung pada pimpinan atau boss, ini membuat pencapaian kinerja karyawan/pegawai rendah.
2. Custodial : Model yang berbasis pada ekonomi atau benefit, dengan orientasi pada uang, maksudnya bahwa karyawan/pegawai merasa aman, nyaman dan mendapat keuntungan setelah berada didalam organisasi, pencapaian dalam model ini adalah passive cooperation.
3. Supportive : Model ini berbasis akan kepemimpinan, karyawan/pegawai berorientasi pada kinerja (job performance) dan partisipasi.Karyawan/pegawai pada model ini mengejar status dan pengenalan, pencapaian kinerja dapat dicapai dengan meningkat.
4. Collegial : Adalah model yang berdasarkan Partnership/persekutuan/perseroan, dan berorientasi pada kerjasama/teamwork.Karyawan/pegawai pada model ini mempunyai bertanggung-jawab dan kesadaran berdisiplin, dalam pencapaiannya karyawan/pegawai memiliki antusias dalam berkinerja.

Perilaku organisasi dalam beberapa jenis pendekatan manajemen:

1. Manajemen tradisional: Tiap individu memiliki perilaku tertentu dalam tiap proses perencanaan, organisasi, pergerakan dan pengawasan. iap kelompok/unit kerja memiliki karakteristik tertentu dalam berinteraksi di dalam maupun antar kelompok/unit kerja.
2. Manajemen berdasarkan sasaran : Tiap individu atau kelompok mempunyai interest tertentu dalam menentukan

sasaran kerja tiap unit dan bahkan penentuan sasaran organisasi.

3. Manajemen strategik : Tiap individu atau kelompok memiliki pandangan yang berbeda dalam menganalisa lingkungan, penentuan visi dan misi, perumusan strategi, implementasi strategi maupun pengendalian strategi.
4. Manajemen mutu terpadu : Tiap individu atau kelompok memiliki tolok ukur mutu yang berbeda dan memiliki komitmen mutu yang berbeda pula..

Perilaku organisasi saat ini merupakan bidang studi yang berkembang. Jurusan studi organisasi pada umumnya ditempatkan dalam sekolah-sekolah bisnis, meskipun banyak universitas yang juga mempunyai program psikologi industri dan ekonomi industri pula. Bidang ini sangat berpengaruh dalam dunia bisnis dengan para praktisi seperti Peter Drucker dan Peter Senge yang mengubah penelitian akademik menjadi praktik bisnis.

Perilaku organisasi menjadi semakin penting dalam ekonomi global ketika orang dengan berbagai latar belakang dan nilai budaya harus bekerja bersama-sama secara efektif dan efisien. Namun bidang ini juga semakin dikritik sebagai suatu bidang studi karena asumsi-asumsinya yang etnosentris dan pro-kapitalis. Perilaku manusia sangat berbeda antara satu dengan lainnya. Perilaku itu sendiri adalah suatu fungsi dari interaksi antara seseorang individu dengan lingkungannya. Ditilik dari sifatnya, perbedaan perilaku manusia itu disebabkan karena kemampuan, kebutuhan, cara berpikir untuk menentukan pilihan perilaku, pengalaman, dan reaksi affektifnya berbeda satu sama lain. Pendekatan yang sering dipergunakan untuk memahami perilaku manusia adalah pendekatan kognitif, reinforcement, dan psikoanalitis. Berikut penjelasan ketiga pendekatan tersebut dilihat dari; penekanannya, penyebab timbulnya perilaku, prosesnya, kepentingan masa lalu di dalam menentukan perilaku, tingkat kesadaran, dan data yang dipergunakan:

1. Penekanan. Pendekatan kognitif menekankan mental internal seperti berpikir dan menimbang. Penafsiran individu tentang lingkungan dipertimbangkan lebih penting dari lingkungan itu sendiri. Pendekatan penguatan (reinforcement) menekankan pada peranan lingkungan

dalam perilaku manusia. Lingkungan dipandang sebagai suatu sumber stimuli yang dapat menghasilkan dan memperkuat respon perilaku. Pendekatan psikoanalitis menekankan peranan sistem personalitas di dalam menentukan sesuatu perilaku. Lingkungan dipertimbangkan sepanjang hanya sebagai ego yang berinteraksi dengannya untuk memuaskan keinginan.

2. Penyebab Timbulnya Perilaku. Pendekatan kognitif, perilaku dikatakan timbul dari ketidakseimbangan atau ketidaksesuaian pada struktur kognitif, yang dapat dihasilkan dari persepsi tentang lingkungan. Pendekatan reinforcement menyatakan bahwa perilaku itu ditentukan oleh stimuli lingkungan baik sebelum terjadinya perilaku maupun sebagai hasil dari perilaku. Menurut pendekatan psikoanalitis, perilaku itu ditimbulkan oleh tegangan (tensions) yang dihasilkan oleh tidak tercapainya keinginan.
3. Proses. Pendekatan kognitif menyatakan bahwa kognisi (pengetahuan dan pengalaman) adalah proses mental, yang saling menyempurnakan dengan struktur kognisi yang ada. Dan akibat ketidak sesuaian (inconsistency) dalam struktur menghasilkan perilaku yang dapat mengurangi ketidak sesuaian tersebut. Pendekatan reinforcement, lingkungan yang beraksi dalam diri individu mengundang respon yang ditentukan oleh sejarah. Sifat dari reaksi lingkungan pada respon tersebut menentukan kecenderungan perilaku masa mendatang. Dalam pendekatan psikoanalitis, keinginan dan harapan dihasilkan dalam Id kemudian diproses oleh Ego dibawah pengamatan Superego.
4. Kepentingan Masa lalu dalam menentukan Perilaku. Pendekatan kognitif tidak memperhitungkan masa lalu (ahistoric). Pengalaman masa lalu hanya menentukan pada struktur kognitif, dan perilaku adalah suatu fungsi dari pernyataan masa sekarang dari sistem kognitif seseorang, tanpa memperhatikan proses masuknya dalam sistem. Teori reinforcement bersifat historic. Suatu respon seseorang pada suatu stimulus tertentu adalah menjadi suatu fungsi dari sejarah lingkungannya. Menurut pendekatan psikoanalitis, masa lalu seseorang dapat menjadikan suatu penentu yang relatif penting bagi perilakunya. Kekuatan yang relatif dari Id, Ego dan Superego ditentukan oleh interaksi dan pengembangannya dimasa lalu.

5. Tingkat dari Kesadaran. Dalam pendekatan kognitif memang ada aneka ragam tingkatan kesadaran, tetapi dalam kegiatan mental yang sadar seperti mengetahui, berpikir dan memahami, dipertimbangkan sangat penting. Dalam teori reinforcement, tidak ada perbedaan antara sadar dan tidak. Biasanya aktifitas mental dipertimbangkan menjadi bentuk lain dari perilaku dan tidak dihubungkan dengan kasus kekuasaan apapun. Aktifitas mental seperti berpikir dan berperasaan dapat saja diikuti dengan perilaku yang terbuka, tetapi bukan berarti bahwa berpikir dan berperasaan dapat menyebabkan terjadinya perilaku terbuka. Pendekatan psikoanalitis hampir sebagian besar aktifitas mental adalah tidak sadar. Aktifitas tidak sadar dari Id dan Superego secara luas menentukan perilaku.
6. Data. Dalam pendekatan kognitif, data atas sikap, nilai, pengertian dan pengharapan pada dasarnya dikumpulkan lewat survey dan kuestioner. Pendekatan reinforcement mengukur stimuli lingkungan dan respon materi atau fisik yang dapat diamati, lewat observasi langsung atau dengan pertolongan sarana teknologi. Pendekatan psikoanalitis menggunakan data ekspresi dari keinginan, harapan, dan bukti penekanan dan bloking dari keinginan tersebut lewat analisa mimpi, asosiasi bebas, teknik proyektif, dan hipnotis.

D. Kebijakan Pemerintahan

Sebelum dibahas lebih jauh mengenai konsep kebijakan publik, kita perlu mengkaji terlebih dahulu mengenai konsep kebijakan atau dalam bahasa Inggris sering kita dengar dengan istilah *policy*. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dsb); pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip dan garis pedoman untuk manajemen dalam usaha mencapai sasaran. Carl J Federick sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008: 7) mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan) dan kesempatan-kesempatan terhadap pelaksanaan usulan kebijaksanaan

tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Pendapat ini juga menunjukkan bahwa ide kebijakan melibatkan perilaku yang memiliki maksud dan tujuan merupakan bagian yang penting dari definisi kebijakan, karena bagaimanapun kebijakan harus menunjukkan apa yang sesungguhnya dikerjakan daripada apa yang diusulkan dalam beberapa kegiatan pada suatu masalah. Solichin Abdul Wahab mengemukakan bahwa istilah kebijakan sendiri masih terjadi silang pendapat dan merupakan ajang perdebatan para ahli.

Maka untuk memahami istilah kebijakan, Solichin Abdul Wahab (2008: 40-50) memberikan beberapa pedoman sebagai berikut : a) Kebijakan harus dibedakan dari keputusan b) Kebijakan sebenarnya tidak serta merta dapat dibedakan dari administrasi c) Kebijakan mencakup perilaku dan harapan-harapan d) Kebijakan mencakup ketiadaan tindakan ataupun adanya tindakan e) Kebijakan biasanya mempunyai hasil akhir yang akan dicapai f) Setiap kebijakan memiliki tujuan atau sasaran tertentu baik eksplisit maupun implisit g) Kebijakan muncul dari suatu proses yang berlangsung sepanjang waktu h) Kebijakan meliputi hubungan-hubungan yang bersifat antar organisasi dan yang bersifat intra organisasi i) Kebijakan publik meski tidak eksklusif menyangkut peran kunci lembaga-lembaga pemerintah j) Kebijakan itu dirumuskan atau didefinisikan secara subyektif.

Menurut Budi Winarno (2007 : 15), istilah kebijakan (policy term) mungkin digunakan secara luas seperti pada "kebijakan luar negeri Indonesia", "kebijakan ekonomi Jepang", dan atau mungkin juga dipakai untuk menjadi sesuatu yang lebih khusus, seperti misalnya jika kita mengatakan kebijakan pemerintah tentang debirokatisasi dan deregulasi. Namun baik Solihin Abdul Wahab maupun Budi Winarno sepakat bahwa istilah kebijakan ini penggunaannya sering dipertukarkan dengan istilah lain seperti tujuan (goals) program, keputusan, undang-undang, ketentuanketentuan, standar, proposal dan grand design (Suharno :2009 : 11). Irfan Islamy sebagaimana dikutip Suandi (2010: 12) kebijakan harus dibedakan dengan kebijaksanaan. Policy diterjemahkan dengan kebijakan yang berbeda artinya dengan wisdom yang artinya kebijaksanaan. Pengertian kebijaksanaan memerlukan pertimbangan pertimbangan lebih jauh lagi, sedangkan kebijakan mencakup aturanaturan yang ada didalamnya. James E Anderson

sebagaimana dikutip Islamy (2009: 17) mengungkapkan bahwa kebijakan adalah “ a purposive course of action followed by an actor or set of actors in dealing with a problem or matter of concern” (Serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu). Konsep kebijakan yang ditawarkan oleh Anderson ini menurut Budi Winarno (2007: 18) dianggap lebih tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan.

Selain itu konsep ini juga membedakan secara tegas antara kebijakan (policy) dengan keputusan (decision) yang mengandung arti pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada. Richard Rose sebagaimana dikutip Budi Winarno (2007: 17) juga menyarankan bahwa kebijakan hendaknya dipahami sebagai serangkaian kegiatan yang sedikit banyak berhubungan beserta konsekuensi-konsekuensi bagi mereka yang bersangkutan daripada sebagai keputusan yang berdiri sendiri. Pendapat kedua ahli tersebut setidaknya dapat menjelaskan bahwa mempertukarkan istilah kebijakan dengan keputusan adalah keliru, karena pada dasarnya kebijakan dipahami sebagai arah atau pola kegiatan dan bukan sekadar suatu keputusan untuk melakukan sesuatu.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah tindakan-tindakan atau kegiatan yang sengaja dilakukan atau tidak dilakukan oleh seseorang, suatu kelompok atau pemerintah yang di dalamnya terdapat unsur keputusan berupa upaya pemilihan diantara berbagai alternatif yang ada guna mencapai maksud dan tujuan tertentu. Lingkup dari studi kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dan sebagainya. Disamping itu dilihat dari hirarkirnya kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional maupun lokal seperti undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota. Secara terminologi pengertian kebijakan publik (public policy) itu ternyata banyak sekali, tergantung dari sudut mana kita mengartikannya. Easton memberikan definisi kebijakan publik sebagai the authoritative allocation of values for the whole

society atau sebagai pengalokasian nilai-nilai secara paksa kepada seluruh anggota masyarakat. Laswell dan Kaplan juga mengartikan kebijakan publik sebagai a projected program of goal, value, and practice atau sesuatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai dalam praktek-praktek yang terarah. Pressman dan Widavsky sebagaimana dikutip Budi Winarno (2002: 17) mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bias diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah.

Robert Eyestone sebagaimana dikutip Leo Agustino (2008 : 6) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “hubungan antara unit pemerintah dengan lingkungannya”. Banyak pihak beranggapan bahwa definisi tersebut masih terlalu luas untuk dipahami, karena apa yang dimaksud dengan kebijakan publik dapat mencakup banyak hal. Menurut Nugroho, ada dua karakteristik dari kebijakan publik, yaitu: 1) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah untuk dipahami, karena maknanya adalah hal-hal yang dikerjakan untuk mencapai tujuan nasional; 2) kebijakan publik merupakan sesuatu yang mudah diukur, karena ukurannya jelas yakni sejauh mana kemajuan pencapaian cita-cita sudah ditempuh. Menurut Woll sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003:2) menyebutkan bahwa kebijakan publik ialah sejumlah aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah di masyarakat, baik secara langsung maupun melalui berbagai lembaga yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Thomas R Dye sebagaimana dikutip Islamy (2009: 19) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “ is whatever government choose to do or not to do” (apapun yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau untuk tidak dilakukan). Definisi ini menekankan bahwa kebijakan publik adalah mengenai perwujudan “tindakan” dan bukan merupakan pernyataan keinginan pemerintah atau pejabat publik semata. Di samping itu pilihan pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu juga merupakan kebijakan publik karena mempunyai pengaruh (dampak yang sama dengan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu. Terdapat beberapa ahli yang mendefinisikan kebijakan publik sebagai tindakan yang diambil

oleh pemerintah dalam merespon suatu krisis atau masalah publik. Begitupun dengan Chandler dan Plano sebagaimana dikutip Tangkilisan (2003: 1) yang menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pemanfaatan yang strategis terhadap sumberdayasumberdaya yang ada untuk memecahkan masalah-masalah publik atau pemerintah. Selanjutnya dikatakan bahwa kebijakan publik merupakan suatu bentuk intervensi yang dilakukan secara terus-menerus oleh pemerintah demi kepentingan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat agar mereka dapat hidup, dan ikut berpartisipasi dalam pembangunan secara luas. David Easton sebagaimana dikutip Leo Agustino (2009: 19) memberikan definisi kebijakan publik sebagai “ the autorative allocation of values for the whole society”.

Definisi ini menegaskan bahwa hanya pemilik otoritas dalam sistem politik (pemerintah) yang secara sah dapat berbuat sesuatu pada masyarakatnya dan pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu diwujudkan dalam bentuk pengalokasian nilai-nilai. Hal ini disebabkan karena pemerintah termasuk ke dalam “authorities in a political system” yaitu para penguasa dalam sistem politik yang terlibat dalam urusan sistem politik sehari-hari dan mempunyai tanggungjawab dalam suatu masalah tertentu dimana pada suatu titik mereka diminta untuk mengambil keputusan di kemudian hari kelak diterima serta mengikat sebagian besar anggota masyarakat selama waktu tertentu. Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah yang berorientasi pada tujuan tertentu guna memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuanketentuan atau peraturan perundang-undangan yang dibuat pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

E. Implementasi Kebijakan Pemerintahan

Implementasi kebijakan adalah aktivitas yang terlihat setelah dikeluarkan pengarahannya yang sah dari suatu kebijakan yang meliputi upaya mengelola input untuk menghasilkan output atau outcomes bagi masyarakat. Tahap implementasi

kebijakan dapat dicirikan dan dibedakan dengan tahap pembuatan kebijakan. Pembuatan kebijakan di satu sisi merupakan proses yang memiliki logika bottom-up, dalam arti proses kebijakan diawali dengan penyampaian aspirasi, permintaan atau dukungan dari masyarakat. Sedangkan implementasi kebijakan di sisi lain di dalamnya memiliki logika top-down, dalam arti penurunan alternatif kebijakan yang abstrak atau makro menjadi tindakan konkrit atau mikro. Grindle menyatakan, implementasi merupakan proses umum tindakan administratif yang dapat diteliti pada tingkat program tertentu, Sedangkan Van Meter dan Horn menyatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah dan swasta baik secara individu maupun secara kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan. Grindle menambahkan bahwa proses implementasi baru akan dimulai apabila tujuan dan sasaran telah ditetapkan, program kegiatan telah tersusun dan dana telah siap dan telah disalurkan untuk mencapai sasaran.

Implementasi sebagai sebuah upaya untuk menciptakan hubungan yang memungkinkan bagi kebijakan dapat terealisasi sebagai sebuah hasil aktivitas pemerintah. Upaya-upaya tersebut didesain dengan harapan untuk dapat mewujudkan hasil akhir yang telah dipikirkan. Tujuan dan sasaran dari kebijakan diterjemahkan ke dalam sebuah program yang bertujuan untuk mencapai hasil akhir yang diinginkan. Singkatnya, implementasi merupakan sebuah proses untuk mewujudkan rumusan kebijakan menjadi tindakan kebijakan guna mewujudkan hasil akhir yang diinginkan. Kebijakan dalam penelitian ini bermakna juga, bagaimana langkah-langkah pemerintah dalam menjawab pilihan tindakan yang ditempuh oleh pemerintah dapat: (1) kebijakan yang diambil dapat berjalan secara terus-menerus, (2) dapat diimplementasikan dengan baik. Berdasarkan pengertian di atas, maka kebijakan menurut karakternya adalah langsung mempraktekkan dalam bentuk program-program dalam proses pembuatan kebijakan. Analisis kebijakan meneliti sebab, akibat, kinerja dan program publik. Kebijakan tersebut sangat diperlukan dalam praktek pengambilan keputusan di sektor publik, dan karenanya dibutuhkan oleh para politisi, konsultan, dan pengambilan keputusan oleh pemerintah. Program-program yang dilakukan oleh pemerintah senantiasa bisa berjalan dengan baik, hal ini

dikarenakan bisa memajukan daerahnya dalam menghadapi kemajuan masa yang akan datang. Kebijakan diciptakan untuk mengatur kehidupan masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Dalam mengimplementasikan kebijakan publik, ada beberapa model yang perlu digunakan untuk menjadi pedoman atau penuntun agar pada saat pelaksanaan, kebijakan tersebut tidak akan menyimpang dari apa yang sebelumnya telah dirumuskan. Model implementasi kebijakan merupakan kerangka dalam melakukan analisis terhadap proses implementasi kebijakan sebagai alat untuk menggambarkan situasi dan kondisi yang terjadi setelah ditetapkannya kebijakan tersebut, sehingga perilaku yang terjadi di dalamnya dapat dijelaskan.

Oleh karena itu, penggunaan model implementasi kebijakan sangat diperlukan untuk melakukan studi implementasi kebijakan. Ada beberapa model implementasi kebijakan menurut para ahli yang seringkali diterapkan. Pada umumnya, model-model tersebut menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan yang diarahkan pada pencapaian kebijakan. Pendekatan implementasi kebijakan publik yang dikemukakan oleh Grindle dikenal dengan "Implementation as a Political and Administrative Process". Menurut Grindle, keberhasilan implementasi suatu kebijakan publik dapat diukur dari proses pencapaian hasil akhirnya (outcomes) yaitu: tercapai atau tidaknya tujuan yang ingin diraih.¹⁸ Pengukuran keberhasilan tersebut dapat dilihat dari 2 (dua) hal yaitu: Prosesnya Kebijakan, apakah pelaksanaan kebijakan telah sesuai dengan yang ditentukan dengan merujuk pada aksi kebijakannya.

Pencapaian tujuan kebijakan impact atau efeknya pada masyarakat secara individu dan kelompok, tingkat perubahan yang terjadi dan juga penerimaan kelompok sasaran. Selain itu, keberhasilan suatu implementasi kebijakan publik juga sangat ditentukan oleh tingkat keterlaksanaan kebijakan yang terdiri atas isi kebijakan (content of policy) dan lingkungan implementasi (context of implementation) Isi kebijakan meliputi: (1) interest affected, yaitu kepentingan yang dapat mempengaruhi implementasi kebijakan, (2) type of benefits, yaitu jenis manfaat yang menunjukkan dampak positif yang dihasilkan, (3) extend of change envision, yaitu seberapa besar perubahan yang hendak atau ingin dicapai melalui suatu

implementasi sehingga harus mempunyai skala yang jelas, (4) site of decision making, yaitu, letak pengambilan keputusan dari suatu kebijakan yang akan diimplementasikan, (5) program implementer, yaitu implementasi kebijakan atau program yang harus didukung oleh adanya pelaksana yang berkompeten, dan (6) resources committed, yaitu, sumber daya yang harus mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Isi implementasi meliputi : (1) power, interest and strategy of actor involved, yaitu kekuasaan, kepentingan dan strategi dari aktor yang terlibat; 18 Ibid hlm 7-15 23 (2) institution an regime characteristic, yaitu, karakteristik lembaga dan rezim yang sedang berkuasa sebagai lingkungan di mana implementasi kebijakan dijalankan, dan (3) compliance and responsiveness, yaitu sejauh mana tingkat kepatuhan dan respon dari para pelaksana dalam menanggapi implementasi kebijakan yang dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Aini, Nurul dan Philipus. 2004. Sosiologi dan Politik. PT RajaGrafindo Persada: Jakarta.
- Azwar, Saifuddin. 2012. Metode Penelitian. Pustaka Pelajar Offset: Yogyakarta.
- Berger, Peter L. dan Thomas Luckmann. 2012. Tafsir Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta: LP3ES. Buchari,
- Sri Astuti. 2014. Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas. Yayasan Pustaka Obor Indonesia: Jakarta.
- Budiardjo, Miriam. 2002. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta.
- Burhan, Bungin. 2007. Sosiologi Komunikasi:Teori,Paradigma,dan Diskursus Teknologi Komunikasi di Masyarakat. Kencana: Jakarta.
- Castells, Manuel. 2010. The Power of Identity. Blackwell Publishing: United Kingdom. Haboddin,
- Muhtar dan Ariyanto Azis, Aswin. 2013. Revitalisasi Politik Identitas di Indonesia. Pusat Studi Inovasi Pemerintahan dan Kerjasama Antardaerah Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIP: Universitas Brawijaya.
- Haryatmoko. 2014. Etika Politik dan Kekuasaan. PT Kompas Media Nusantara: Jakarta.
- Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan kualitatif dan Kuantitatif. PT Gelora Aksara Pratama: Yogyakarta.
- Maran, Raga Rafael. 2007. Pengantar Sosiologi Politik. PT Rineka Cipta: Jakarta.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. 2015. Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan. Prenadamedia Group: Jakarta.
- Parekh, Bhikhu. 2008. Rethinking Multiculturalism Keberagaman Budaya dan Teori Politik (terjemahan dari Buku MULTICULTURALISM Cultural Diversity and Political Theory, 2nd edition, Bhikhu Parekh PALGRAVE MACMILLAN, Hounmills, Basingstoke, Hampshir RG21 6XS and 175 Fifth Avenue, New York, N. Y. 10010, oleh C.B

- Bambang Kukuh Adi) PT Kanisius (Anggota IKAPI): Yogyakarta.
- 2008. *A New Politics of Identity (Political Principles for an Interdependent World)*. Red Globe Press: London. Ranjabar, Jacobus. 2015. *Perubahan Sosial Teori-Teori dan Proses Perubahan Sosial serta Teori Pembangunan*. Alfabeta: Bandung.
- Soekanto, Soerjono. 2012. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Rajagrafindo Persada: Jakarta.
- Sugiyono. 2015. *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis dan Disertasi*. Alfabeta: Bandung.
- Sukatno, Otto CR. 2018. *Politik Identitas Kesaktian dan Kekuasaan*. Pustaka pelajar: Yogyakarta.
- Strauss Anselm dan Corbin Juliet. 2009. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Pustaka Pelajar: Yogyakarta.
- Supardan, Dadang. 2015. *Pengantar Ilmu Sosial Sebuah Kajian Pendekatan Struktural*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- Usman, Husaini dan Akbar, Purnomo Setiady. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. PT Bumi Aksara: Jakarta.
- W. A. Gerungan. 2002. *Psikologi Sosial*. Bandung: Refika Aditama.
- Wirawan. 2012. *Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma*. Prenada Media Group: Jakarta.
- Rina Martini, dkk, *Sosiologi pemerintahan*, Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta, 2007.
- Suryadi, Budi, *Sosiologi Politik, Sejarah, Definisi dan perkembangan konsep*, penerbit IRCiSoD, Yogyakarta, 2007,
- Ndraha, Taliziduhu, *Kybernologi (Ilmu pemerintahan Baru)*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 2003.
- Mas' oed, Mochtar, Colin Mac Andrews, *Perbandingan Sistem Politik*, Penerbit gajahmada University Press, Yogayakarta, 1984 5. Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*,PT. Raja Grasindo, Jakarta, 2007
- Abbeduto, Leonard. 2004. *Taking Sides: Clashing Views on Controversial Issues in Educational Psychology Third Edition*. McGraw-Hill, Dushkin.

- Adedokun, O.M. C.W, Adeyamo, and E.O. Olorunsula. 2010. The Impact of Communication on Community Development. *J Communication*, 1(2): 101-105.
- Chalid, Pheni. 2005. *Otonomi Daerah Masalah, Pemberdayaan dan Konflik*. Penebar Swadaya. Cetakan pertama. Jakarta.
- Chambers, R. 1985. *Rural Development : Putting The Last First*. London ; New York.
- Depdiknas. 2003. *Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi Ketiga*, Jakarta: Penerbit Balai Pustaka.
- Foy, Nancy. 1994. *Empowering People at Work*, London: Grower Publishing Company.
- Friedman, John. 1992. *Empowerment The Politics of Alternative Development*. Blackwell Publishers, Cambridge, USA.
- Glasserfield, E. (1987). A Constructivist Approach to Teaching. In L. Steffe & J. Gale (Eds.), *Constructivism In Education*. Hillsdale, NJ, Lawrence Erlbaum. (pp. 3-16).
- Ife, J.W. 1995. *Community Development: Creating Community Alternatives-vision, Analysis and Practice*. Melbourne : Longman.
- Jasper, James M. 2010 *Social Movement Theory Today: Toward a Theory of Action?*. Sociology Graduate Center of the City University of New York.
- Jimu, M.I. 2008. *Community Development. Community Development:A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi*. *Africa Development*, Vol. XXXIII, No. 2, 2008, pp. 23-3.
- Koentjaraningrat. 2009: *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Djambangan. Jakarta. Longman.
- Lubis, Hari & Huseini, Martani. 1987. *Teori Organisasi; Suatu Pendekatan Makro*. Pusat Antar Ilmu-ilmu Sosial UI: Jakarta.
- Mubarak, Z. 2010. *Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau Dari Proses Pengembangan Kapasitas Pada Program PNPM Mandiri Perkotaan Di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan*. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah Dan Kota. Undip. Semarang.

- Pearsons, Talcot. 1991. *The Social System*. Routledge is an imprint of Taylor & Francis, an informa company.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Rusmanto, Joni. 2013. *Gerakan Sosial Sejarah Perkembangan Teori Kekuatan dan Kelemahannya*. Zifatama Publishing. Sidoarjo.
- Sadan, Elisheva. 1997. *Empowerment and Community Planning: Theory and Practice of People-Focused Social Solutions*. Tel Aviv: Hakibbutz Hameuchad Publishers.in Hebrew. [e-book].
- Shucksmith, Mark. 2013. *Future Direction in Rural Development*. Carnegie UK Trust. England.
- Sipahelut, Michel. 2010. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Nelayan Di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara*. Tesis. IPB. Bogor.
- Soetomo. 2006. *Strategi-strategi Pembangunan Masyarakat*, Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.
- Suharto E. 2005. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat. Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Sukmaniar. 2007. *Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (Ppk) Pasca Tsunami Dikecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar*. Tesis. UNDIP. Semarang.
- Wilson, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*, London: Grower Publishing Company.

BIODATA PENULIS



Dr. Kisman Karinda, M.Si Lahir di Tondano, 22 Februari 1975. Penulis menyelesaikan pendidikan S1 di Universitas Islam Negeri Malang pada 1999, kemudian menyelesaikan pendidikan S2 di Universitas Muhammadiyah Malang pada 2003, menyelesaikan pendidikan S3 di Universitas Negeri Makasar pada 2023. Perjalanan karir penulis di antaranya yaitu sebagai Sekprodi IP Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai pada tahun 2008- 2011, sebagai Wakil Dekan III FISIP Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai pada tahun 2011-2016, dan sekarang menjadi Dekan FISIP Universitas Muhammadiyah Luwuk Banggai dari tahun 2016.

Berbagai buku dan jurnal terbitan penulis di antaranya yaitu berjudul: Komunikasi Politik dan Pembangunan Daerah, Kepemimpinan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Banggai dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsinya, *Problem and Competence Development Design Of State Civil Apparatus (ASN) in Banggai District Though Education and Training Activities*, *Effort To Overcome Cyber Crime Actions in Indonesia*, *Prototype File Transfer Protocol Application For Lan and Wi-Fi Communication*, *Developing Integrity University Governance Model in Indonesia*, Pengaruh Koordinasi Kepala Desa Terhadap Tingkat Keberhasilan Pembangunan di Desa Lalong Kecamatan Tinangkung Utara kabupaten Banggai Kepulauan, Evaluasi Kinerja Kebijakan Pelayanan Umum Satu Pintu Terhadap Peningkatan Mutu Pelayanan di Kantor Badan Pelayanan Penanaman Modal Terpadu Satu Pintu (BPPMTSP) Kabupaten Banggai, Pengaruh Sumber Daya Manusia Terhadap Kinerja Kepala Desa Bonggan Kecamatan Tinangkung Kabupaten Banggai Kepulauan, *Organizational Enablers For Project Governance Member*, Perilaku Birokrasi Terhadap Kualitas Pelayanan Kependudukan, *Analysis Of The Intensity Of Communication And Coordination Of Government Officials On Twitter Social Media During The Covid-19 Handling in Indonesia*.